

JURNAL KAJIAN WILAYAH

Volume 9

Nomor 1, Juni 2018

DAFTAR ISI

GLOBAL MARITIME FULCRUM, INDONESIA-CHINA GROWING RELATIONS, AND INDONESIA'S MIDDLEPOWERMANSHIP IN THE EAST ASIA REGION Nanto Sriyanto	1-19
THE DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN VIETNAM Mayasuri Presilla	20-33
PERBANDINGAN KETERSEDIAAN UBIN TEKSTUR PEMANDU UNTUK TUNA- NETRA DI TEMPAT UMUM ANTARA KOTA SURAKARTA DAN KOTA NAGOYA Esdaniar Khoirunisa dan Dwi Aries Himawanto	34-45
RISIKO NUKLIR DAN RESPON PUBLIK TERHADAP BENCANA NUKLIR FUKUSHIMA DI JEPANG Upik Sarjiati	46-61
“FATHERING JAPAN”: DISKURSUS ALTERNATIF DALAM HEGEMONI KETIDAKSETARAAN GENDER DI JEPANG Yusy Widarahesty	62-75
RINGKASAN HASIL PENELITIAN GLOBALISASI DAN MASYARAKAT MENUA TIONGKOK: PARIWISATA DAN POTENSI LANSIA Erlita Tantri	76-83
TINJAUAN BUKU ANIME, PORNOGRAFI, DAN PELANGGARAN HAK CIPTA: ASPEK HUKUM DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COOL JAPAN Rifki Indra Maulana	84-89

JURNAL KAJIAN WILAYAH

Volume 9

Nomor 1, Juni 2018

DDC: 327.1**Nanto Sriyanto****POROS MARITIM DUNIA, TUMBUHNYA HUBUNGAN INDONESIA – TIONGKOK DAN KEKUATAN NEGARA MENENGAH INDONESIA DI WILAYAH ASIA TIMUR**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 (1) Januari 2018: 1-19

ABSTRAK

Hubungan Indonesia dengan Tiongkok memulai babak baru dengan penandatanganan kemitraan strategis pada tahun 2005. Penandatanganan tersebut dan kesamaan pada kebangkitan pembangunan infrastruktur di kedua negara mendorong peningkatan arus modal dan kerjasama. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang mengusung program *Global Maritime Fulcrum* (GMF) dengan tujuan membangun konektivitas domestik, telah membuka peluang kerjasama bagi Tiongkok untuk menanamkan modal dan membangun kerjasama yang saling melengkapi dengan program *Belt Road Initiatives* (BRI). Meskipun peluang besar terbuka bagi kedua pihak, masih terdapat ganjalan bagi terbangunnya kerjasama yang lebih mendalam. Prinsip politik luar negeri Indonesia tidak memungkinkan Indonesia untuk sepenuhnya menggantungkan atau beraliansi dengan kekuatan besar di kawasan ataupun global. Indonesia sendiri telah lama menjalankan aktifisme internasional yang berdasarkan prinsip bebas aktif dan keseimbangan dinamis. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar rujukan bagi *middlepowermanship* dalam politik luar negeri Indonesia. Tantangannya dalam hal ini adalah bagaimana upaya Indonesia menyeimbangkan antara kepentingan politik dan ekonominya. Perkembangan hubungan ekonomi dengan Tiongkok dapat membantu Indonesia melaksanakan pembangunan infrastruktur strategis yang akan berdampak pada peningkatan kapabilitas ekonomi. Namun begitu, kedekatan yang tidak terimbangi akan dapat mengganggu politik luar negerinya sebagai kekuatan negara menengah (*middlepowermanship*). Artikel ini bertujuan mengetahui bagaimana Indonesia mengimbangi beragam kepentingan tersebut tanpa mengganggu posisi dan kredibilitasnya sebagai negara kekuatan menengah. Artikel ini berpendapat bahwa tanpa mengabaikan peranan faktor domestik, pada saat yang bersamaan Indonesia perlu membangun jalinan kerjasama dengan negara lain, terutama yang sejalan dengan penguatan sentralitas ASEAN demi perlindungan prinsip keseimbangan dinamis dan peranannya sebagai pen jembatan di antara kekuatan besar.

Kata kunci: *Global Maritime Fulcrum*, *middlepowermanship*, keseimbangan dinamis, pen jembatan, diplomasi membumi.

DDC: 338.1
Mayasuri Presilla

PERKEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK DI VIETNAM

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 (1) Januari 2018: 20-33

ABSTRAK

Produk-produk organik saat ini sangat potensial untuk dikembangkan karena semakin besarnya minat konsumen dunia akan produk makanan yang bebas dari penggunaan bahan-bahan kimia, seperti pupuk dan pestisida kimia, sehingga aman untuk dikonsumsi. Permintaan produk-produk organik terutama datang dari negara-negara Eropa Barat, Amerika Utara, serta Asia Timur. Berbagai keuntungan yang bisa didapatkan dari pertanian organik adalah peningkatan kesehatan tubuh, kesehatan ekosistem (tanah, air, hewan, dan tumbuhan), serta peningkatan penghasilan bagi para petani karena harga produk organik yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk pertanian pada umumnya. Semakin besarnya pangsa pasar produk organik di dunia merupakan kesempatan besar bagi para produsen pertanian untuk beralih dari sistem konvensional ke sistem organik. Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bersama dengan tim peneliti PSDR-LIPI lainnya tentang pertanian berkelanjutan di Vietnam pada tahun 2013, dan ditambah dengan berita-berita terkini tentang pertanian organik Vietnam. Hasil penelitian dan penelusuran menunjukkan bahwa kesempatan untuk meraih pasar organik yang besar belum banyak ditangkap oleh negara-negara produsen dan pengeksport hasil pertanian, misalnya Vietnam. Hingga saat ini, pertanian organik di Vietnam belum berkembang pesat, walaupun keberadaannya telah tersebar di beberapa daerah. Lambatnya perkembangan pertanian organik ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya pembangunan pertanian yang masih berorientasi pada masalah kuantitas dan bukan kualitas, belum ada tuntutan yang besar dari pasar domestik untuk masalah keamanan pangan, dan besarnya biaya investasi untuk sebuah pertanian organik.

Kata kunci: pertanian organik, pasar produk organik, kerangka hukum, investasi besar, dan pertanian

DDC: 362.4

Esdaniar Khoirunisa dan Dwi Aries Himawanto

PERBANDINGAN KETERSEDIAAN UBIN TEKSTUR PEMANDU UNTUK TUNA-NETRA DI TEMPAT UMUM ANTARA KOTA SURAKARTA DAN KOTA NAGOYA

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 (1) Januari 2018: 34-45

ABSTRAK

Aksesibilitas adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan demi terwujudnya keadilan bersama, terutama bagi para penyandang difabel dan orang tua. Salah satu bentuk aksesibilitas adalah ubin tekstur pemandu, yang diperuntukkan sebagai panduan berjalan bagi tunanetra. Ubin tekstur pemandu adalah ubin dengan tekstur khusus sehingga dapat dirasakan oleh tapak kaki ketika berjalan. Ubin ini ditemukan di Jepang tahun 1965, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Hingga akhirnya Indonesia ditengarai sebagai salah satu negara pengguna ubin ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kondisi ketersediaan ubin tekstur pemandu antara di Kota Surakarta dengan Kota Nagoya. Hasil menunjukkan bahwa ubin tekstur pemandu sangat biasa dijumpai di berbagai tempat di Kota Nagoya. Berbeda dengan di Kota Surakarta, banyak tempat-tempat umum penting yang belum dilengkapi dengan ubin tekstur pemandu. Selain itu, banyak ubin tekstur pemandu yang ditemukan di Surakarta kurang memenuhi kelayakan aksesibilitas bagi tunanetra.

Kata Kunci: aksesibilitas, tunanetra, ubin tekstur pemandu

DDC: 304.2

Upik Sarjiati

**RISIKO NUKLIR DAN RESPON PUBLIK TERHADAP BENCANA NUKLIR
FUKUSHIMA DI JEPANG**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 (1) Januari 2018: 46-61

ABSTRAK

Pascabencana nuklir Fukushima, pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi yang aman, murah dan dapat diandalkan kembali diperdebatkan. Berbagai pihak menilai energi nuklir dapat membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan dalam jangka panjang. Di sisi lain, beberapa pihak berpendapat bahwa nuklir masih menjadi sumber energi yang penting bagi pembangunan ekonomi Jepang. Risiko nuklir merupakan salah satu bentuk risiko yang timbul sebagai konsekuensi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa penelitian telah membahas bencana nuklir dari sudut pandang manajemen bencana, politik energi, dan teknik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini menggunakan pendekatan risk society untuk mengkaji kontestasi pengetahuan dalam konstruksi risiko nuklir pasca bencana nuklir Fukushima yang melibatkan pemerintah, akademisi, media, birokrat, ilmuwan, dan Tokyo *Electric Power Company* (TEPCO) sebagai operator reaktor nuklir. Kontestasi pengetahuan dalam konstruksi risiko nuklir mencakup penyebaran dan dampak radiasi nuklir, standar keamanan pangan, dan kategorisasi korban bencana nuklir untuk menentukan pihak yang berhak mendapatkan kompensasi. Kontestasi pengetahuan dan konstruksi risiko nuklir menyebabkan suatu ketidakpastian baru dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, publik melakukan strategi untuk menghadapi risiko nuklir dan ketidakpastian dengan melakukan gerakan anti-nuklir dan citizen science.

Kata Kunci: masyarakat berisiko, nuklir, Fukushima, Jepang

DDC: 306.7

Yusy Widarahesty

**“FATHERING JAPAN”: DISKURSUS ALTERNATIF DALAM HEGEMONI
KETIDAKSETARAAN GENDER DI JEPANG**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 (1) Januari 2018: 62-75

ABSTRAK

Fenomena kesenjangan gender di Jepang telah membawa banyak dampak perubahan di Jepang dari tingkat kelahiran yang menurun dan termasuk munculnya Organisasi Non Profit (NPO) yaitu “*Fathering Japan*” (*Ikumen*) yang didirikan oleh Tatsuya Ando pada 2006, yang mencoba menyajikan bentuk ideologi perlawanan dari mitos hegemoni “*Gender Stereotypes*” di Jepang. Ando mendirikan NPO untuk mendorong ayah hadir di masa depan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membesarkan anak. “Prioritas ayah tradisional Jepang adalah pekerjaan ... mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan bahkan ketika mereka pulang lebih awal,” kata Tetsuya Ando. Dengan demikian, penting untuk mempelajari fenomena sosial dan budaya ini untuk memahami keseluruhan struktur masalah keamanan non-tradisional Jepang yang dapat dilihat melalui “*Fathering Japan*” sebagai diskursus baru. Dengan menggunakan pendekatan diskursus alternatif untuk menganalisis peran gerakan sosial “*Fathering Japan*” (*Ikumen*) sebagai ideologi perlawanan dari mitologi budaya Jepang, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui Analisis Wacana oleh Ernesto dan Chantal Mouffe.

Kata Kunci: *fathering Japan*, diskursus, NPO, ketimpangan gender, Jepang

RINGKASAN HASIL PENELITIAN**DDC: 305.2****Erlita Tantri****GLOBALISASI DAN MASYARAKAT MENUA TIONGKOK: PARIWISATA DAN POTENSI LANSIA**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 (1) Januari 2018: 76-83

ABSTRAK

Tiongkok adalah salah satu Negara yang memiliki jumlah lansia yang cukup besar di dunia. Tahun 2016 saja Tiongkok telah memiliki 230,8 juta jiwa lansia dan tahun 2050, diprediksikan 40 persen penduduk Tiongkok adalah lansia. Meskipun lansia kerap dianggap sebagai beban bagi Negara dan keluarga, namun lansia juga memiliki potensi yang cukup besar terutama dalam aspek ekonomi. Salah satu potensi lansia Tiongkok adalah pada sektor pariwisata. Dalam pariwisata, kegiatan berwisata lansia diikuti dengan berkembangnya teknologi dan jasa yang berkaitan dengan turisme. Tulisan ini berupaya melihat potensi lansia Tiongkok dalam mengisi waktu luang dengan berwisata. Mengisi waktu luang dengan berwisata bukan hanya dapat memperbaiki kondisi kesehatan lansia yang berdampak pada harapan hidup yang semakin panjang, namun juga merangsang berkembangnya industri lansia terkait pariwisata di Tiongkok dan Negara lain.

Kata Kunci: Lansia; waktu luang; pariwisata; Tiongkok

TINJAUAN BUKU**DDC: 343.0****Rifki Indra Maulana****ANIME, PORNOGRAFI, DAN PELANGGARAN HAK CIPTA: ASPEK HUKUM DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COOL JAPAN**

Mark McLelland (Ed), *The End of Cool Japan: Ethical, Legal and Cultural Challenges to Japanese Popular Culture*, Oxford: Routledge, 2017, xv + 224 hlm.

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 (1) Januari 2018: 84-89

JURNAL
KAJIAN WILAYAH

Volume 9

Nomor 1, Juni 2018

DDC: 327.1

Nanto Sriyanto

**GLOBAL MARITIME FULCRUM, INDONESIA-CHINA GROWING RELATIONS,
AND INDONESIA'S MIDDLEPOWERMANSHIP IN THE EAST ASIA REGION**

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 (1) Januari 2018: 1-19

ABSTRACT

The relation between Indonesia and China sparks a new era by the signing of a strategic partnership agreement in 2005. The signing of strategic partnership and similarities in infrastructure booming in both countries initiates the significant flow of capital and cooperation. Under the presidency of Joko Widodo, Indonesia's program of domestic connectivity, which dubbed as Global Maritime Fulcrum (GMF), has opened more extensive opportunity for China to invest and build complementarities of her Belt and Road Initiatives (BRI). Despite the fact that two countries could move into a strategic partnership, other factors have hampered the relations between the two. Indonesia's foreign policy doctrine will not allow herself to become fully aligned with other great power politics in the region. Indonesia has been long pursued an international activism based on free and active doctrine and dynamic equilibrium. These doctrinal factors in another sense become the primary foundation of Indonesia's middlepowermanship foreign policy. The challenge in this case is the contradiction between economic and political interests that has forced Indonesia to balance between her political interests and economic interests. While growing relations with China could help Indonesia implement her strategic infrastructure development that leads to a better economic capability, the situation could erode her aspiration as middle power country (middlepowermanship). This article would like to find how Indonesia juggles between those interest without undermining her position and credibility as an emerging middle power. This article proposes that even though domestic politics plays important role in fostering Indonesia position as middle power countries, at the same time Indonesia needs to strengthen her relations towards other countries and especially manage the centrality of ASEAN in the region to secure principle of dynamic equilibrium and the role of bridge builder.

Keywords: *Global Maritime Fulcrum, middlepowermanship, dynamic equilibrium, bridge builder, down to earth diplomacy*

DDC: 338.1

Mayasuri Presilla

THE DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN VIETNAM

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 (1) Januari 2018: 20-33

ABSTRACT

Organic products nowadays are very potential to be developed because of the increasing demand from consumers around the world on healthy food which are free from chemicals, such as found in fertilizers and pesticides. Demand for organic products mainly comes from countries in the western of Europe, northern America, also East Asia. Besides promoting health for human and the environment, organic farming can also increase income for farmers due to the higher price of organic products compared to ordinary agricultural products. The growing market share of organic products in the world is a great opportunity for agricultural producers to shift from conventional to organic agriculture system. This article is written based on the PSDR-LIPI research about sustainable agriculture in Vietnam in 2013, coupled with current news on Vietnam's organic farming today. The research result shows that the opportunity to reach a large organic market has not been caught by the agricultural producer countries, including Vietnam. Until now, organic agriculture in Vietnam has not developed rapidly, although it has spread in some provinces. The slow growth of organic agriculture is a consequence of several things, such as the orientation of agricultural development which emphasize more on quantity and not quality, lack of legal framework, and complicated and high investment costs for developing organic farming.

Keywords: *organic farming, organic market, legal framework, high investment, agriculture*

DDC: 362.4

Esdaniar Khoirunisa dan Dwi Aries Himawanto

THE COMPARISON OF GUIDE TEXTURE TILES FOR BLIND PEOPLE IN PUBLIC AREAS BETWEEN SURAKARTA AND NAGOYA CITY

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 (1) Januari 2018: 34-45

ABSTRACT

Accessibility is one of the most important components in construction toward the realization of common justice, especially for persons with disabilities and oldster. One of the form of accessibility is a guiding block, or tactile paving, which is designated as a walking guide for the visually impaired. Guiding blocks are paving with a special texture that can be felt by the sole of the foot when walking. This paving was discovered in Japan in 1965, then spread throughout the world. Then finally Indonesia is one of the users of this paving. The purpose of this study was to compare the conditions of guiding block installation between the city of Surakarta and Nagoya City. The results show that guiding blocks are very common in various places in Nagoya City, while in Surakarta there is a contrast condition. Many important public places in Surakarta are not equipped with guiding block. In addition, many guiding block that found in Surakarta are lack of adequate installation of accessibility for the visually impaired.

Keywords: *accessibility, visually impaired, guiding block.*

DDC: 304.2

Upik Sarjiati

NUCLEAR RISK AND PUBLIC RESPONSE TO FUKUSHIMA NUCLEAR DISASTERS IN JAPAN

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 (1) Januari 2018: 46-61

ABSTRACT

In the post-Fukushima nuclear disaster, the use of nuclear as safe, cheap and reliable energy resources is contested. Some actors are considered that nuclear energy is danger for human and environment for long term period. On the other hand, other actors are believed that nuclear is still important energy resources for Japan's economic development. Risk arises as consequences of science and technology development. Some studies explained Fukushima nuclear disaster focusing on disaster management, energy politics, and technical aspect. Different to previous studies, this article aims to analyze contestation of knowledge in risk nuclear construction in the post-Fukushima nuclear disaster. Risk is not only real, but also constructed by various institution and actors such as government, academicians, bureaucrats, scientists, and Tokyo Electric Power Company (TEPCO) as nuclear reactor operator. Contestation of knowledge in nuclear risk construction comprises spreading and impact of nuclear radiation, the food safety standard, and a victim categorization that determine the parties entitled compensation. Contestation of knowledge and construction of nuclear risk urge new uncertainty in modern society. Thus, public take strategies cope with the new uncertainty by carrying out anti-nuclear movement and citizen science.

Keywords: risk society, nuclear, Fukushima, Japan

DDC: 306.7

Yusy Widarahesty

“FATHERING JAPAN” AS AN ALTERNATIVE DISCOURSE FROM THE HEGEMONY OF GENDER GAP IN JAPAN

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 (1) Januari 2018: 62-75

ABSTRACT

The phenomenon of gender gap in Japan has brought many impacts of change in Japan from the declining birth rate and including the emergence of non-profit organizations (NPO) action groups namely “Fathering Japan” (Ikumen) founded by Tatsuya Ando in 2006, which tried to present as a form of resistance ideology from the myth of “Gender Stereotypes” hegemony in Japan. Ando established the NPO to encourage present and future fathers to play a more active role in child-rearing. “The priority of traditional Japanese fathers is work ... they don't know what to do even when they come home early,” said Tetsuya Ando. Thus, it is important to study this social and cultural phenomenon to understand the whole structure of Japanese non-traditional security problem that can be seen through the “Fathering Japan” as a new discourse. By using the discourse alternative approach to analyze the role of the social movement of “Fathering Japan” (Ikumen) as the resistance ideology from Japan cultural mythology, the study was conducted by using qualitative methods through the Discourse Analysis by Ernesto and Chantal Mouffe.

Keywords: fathering Japan, discourse, Non Profit Organization, gender gap, Japan

RESEARCH SUMMARY

DDC: 305.2

Erlita Tantri

GLOBALIZATION AND OLDER PEOPLE IN CHINA: TOURISM AND OLD PEOPLE POTENCY

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 (1) Januari 2018: 76-83

ABSTRACT

China is one of the countries that has a large number of elderlies in the world. In 2016, China has 230.8 million elderly people and it is predicted that 40 percent of China's population in 2050 is elderly. Although the elderly is often regarded as a burden for the State and the family, but fortunately the elderly also has substantial potency, especially in the economic realm. One of the Chinese elderly potency is in tourism. In tourism, elderly travel activities are followed by the development of technology and services that related to tourism. This paper tries to observe the potency of Chinese elderly in their leisure time with travel. Filling leisure time with a tour not only can improve the health conditions of the elderly that affect to longer life expectancy, but also stimulate the development of silver hair industry in tourism for China and other countries.

Keywords: *elderly, leisure time, China*

BOOK REVIEW

DDC: 343.0

Rifki Indra Maulana

ANIME, PORNOGRAPHY, AND COPYRIGHT INFRINGEMENT: LEGAL ASPECTS IN COOL JAPAN POLICY IMPLEMENTATION

Mark McLelland (Ed), *The End of Cool Japan: Ethical, Legal and Cultural Challenges to Japanese Popular Culture*, Oxford: Routledge, 2017, xv + 224 hlm.

Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 9 (1) Januari 2018: 84-89

GLOBAL MARITIME FULCRUM, INDONESIA-CHINA GROWING RELATIONS, AND INDONESIA'S MIDDLEPOWERMANSHIP IN THE EAST ASIA REGION

POROS MARITIM DUNIA, TUMBUHNYA HUBUNGAN INDONESIA – TIONGKOK DAN KEKUATAN NEGARA MENENGAH INDONESIA DI WILAYAH ASIA TIMUR

Nanto Sriyanto

Center for Political Studies-Indonesian Institute of Sciences

Email: nantosriyanto@gmail.com

Diterima: 11-4-2018

Direvisi: 5-5-2018

Disetujui: 31-5-2018

ABSTRAK

Hubungan Indonesia dengan Tiongkok memulai babak baru dengan penandatanganan kemitraan strategis pada tahun 2005. Penandatanganan tersebut dan kesamaan pada kebangkitan pembangunan infrastruktur di kedua negara mendorong peningkatan arus modal dan kerjasama. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang mengusung program Global Maritime Fulcrum (GMF) dengan tujuan membangun konektivitas domestik, telah membuka peluang kerjasama bagi Tiongkok untuk menanamkan modal dan membangun kerjasama yang saling melengkapi dengan program Belt Road Initiatives (BRI). Meskipun peluang besar terbuka bagi kedua pihak, masih terdapat ganjalan bagi terbangunnya kerjasama yang lebih mendalam. Prinsip politik luar negeri Indonesia tidak memungkinkan Indonesia untuk sepenuhnya menggantungkan atau beraliansi dengan kekuatan besar di kawasan ataupun global. Indonesia sendiri telah lama menjalankan aktifisme internasional yang berdasarkan prinsip bebas aktif dan keseimbangan dinamis. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar rujukan bagi middlepowermanship dalam politik luar negeri Indonesia. Tantangannya dalam hal ini adalah bagaimana upaya Indonesia menyeimbangkan antara kepentingan politik dan ekonominya. Perkembangan hubungan ekonomi dengan Tiongkok dapat membantu Indonesia melaksanakan pembangunan infrastruktur strategis yang akan berdampak pada peningkatan kapabilitas ekonomi. Namun begitu, kedekatan yang tidak terimbangi akan dapat mengganggu politik luar negerinya sebagai kekuatan negara menengah (middlepowermanship). Artikel ini bertujuan mengetahui bagaimana Indonesia mengimbangi beragam kepentingan tersebut tanpa mengganggu posisi dan kredibilitasnya sebagai negara kekuatan menengah. Artikel ini berpendapat bahwa tanpa mengabaikan peranan faktor domestik, pada saat yang bersamaan Indonesia perlu membangun jalinan kerjasama dengan negara lain, terutama yang sejalan dengan penguatan sentralitas ASEAN demi perlindungan prinsip keseimbangan dinamis dan peranannya sebagai penjembatan di antara kekuatan besar.

Kata kunci: *Global Maritime Fulcrum, middlepowermanship, keseimbangan dinamis, penjembatan, diplomasi membumi*

ABSTRACT

The relation between Indonesia and China sparks a new era by the signing of a strategic partnership agreement in 2005. The signing of strategic partnership and similarities in infrastructure booming in both countries initiates the significant flow of capital and cooperation. Under the presidency of Joko Widodo, Indonesia's program of domestic connectivity, which dubbed as Global Maritime Fulcrum (GMF), has opened more extensive opportunity for China to invest and build complementarities of her Belt and Road Initiatives (BRI). Despite the fact that two countries could move into a strategic partnership, other factors have hampered the relations between the two. Indonesia's foreign policy doctrine will not allow herself to become fully aligned with other great power

in the region. Indonesia has been long pursued an international activism based on free and active doctrine will not allow herself to become fully aligned with other great power politics in the region. Indonesia has been long pursued an international activism based on free and active doctrine and dynamic equilibrium. These doctrinal factors in another sense become the primary foundation of Indonesia's middlepowermanship foreign policy. The challenge in this case is the contradiction between economic and political interests that has forced Indonesia to balance between her political interests and economic interests. While growing relations with China could help Indonesia implement her strategic infrastructure development that leads to a better economic capability, the situation could erode her aspiration as middle power country (middlepowermanship). This article would like to find how Indonesia juggles between those interest without undermining her position and credibility as an emerging middle power. This article proposes that even though domestic politics plays important role in fostering Indonesia position as middle power countries, at the same time Indonesia needs to strengthen her relations towards other countries and especially manage the centrality of ASEAN in the region to secure principle of dynamic equilibrium and the role of bridge builder.

Keywords: Global Maritime Fulcrum, middlepowermanship, dynamic equilibrium, bridge builder, down to earth diplomacy

INTRODUCTION

Indonesia and China relations have been growing since President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) successfully signing a strategic partnership (2005) and comprehensive strategic partnership (2013) (Mingming & Xiaochun, 2015). In spite of that, since President Joko Widodo take in charge as president in 2014, Indonesia and China could bring a new leap forward since Jokowi main program of Global Maritime Fulcrum (GMF) is regarded as complementary with China's 21st Maritime Silk Road (MSR) (Pradhan, 2016, 11). The program formally launched by President Jokowi during East Asian Summit conference in Myanmar in mid of November 2014. In front of leaders of regional powers and member countries, President Jokowi stated that Indonesia would position herself as a maritime fulcrum between two oceans and take responsibility to play a strategic role amid dynamic of geographic, economic and political turbulence (Witular, 2014b).

Since the launching, GMF has generated discussion on the nature of the program. At the launching, President Jokowi stressed on the external aspect of the program that posited it as Indonesia's strategy in managing regional power dynamics. However several details of GMF could be said that the program put more emphasize on domestic aspect before it could respond positively to regional dynamics. National development concern rather than playing an active role in

the international stage was considered Jokowi's way to distinguish his administration from his predecessor, President SBY (Wicaksana, 2017, 7). Some scholars consider GMF as Jokowi's flagship consist of continuation and distinction with the previous program of MP3EI (Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development) under SBY's presidency (Suproyanto, 2016). Both of the programs contain infrastructure development in Indonesia by building several connectivity projects. Nevertheless, the MP3EI never put emphasize on maritime sector, GMF has shifted away from the idea that was merely connecting center-hub Indonesia's economic center to refocusing to the neglecting maritime aspect in most of Indonesian's awareness (Sukma, 2014).

Besides the fact that GMF concerning more on domestic aspect, Indonesia could not manage in implementing one of the leading elements of the program, internal connectivity, by relying solely on the domestic source. Under the presidency of Jokowi, Indonesia is direly in needs of foreign investment to achieve one aspect of the GMF. Indonesia since then puts its economic diplomacy mainly to attract foreign investment (Setiawan, 2015). In several international forums, Jokowi openly invites international businessmen and foreign capital to invest in Indonesia.

GMF since then has attempted to engage with the regional development of major power foreign policy strategy. GMF is dubbed as complementary with China's 21st

Maritime Silk Road, in which Indonesia could play a significant role to develop both countries programs successfully (Pattiradjawane & Soebagjo, 2015, 180).

China's desire to create maritime connections from its coastal area with countries along Asia-Africa even reach up to Europe locates Indonesia's strategic position as a crucial aspect. Several strategic sea-lanes of communications that could support the idea of China's global maritime connections are under Indonesia jurisdiction. Presiden Xi Jinping also showed Indonesia strategic position when he announced programs of "21st Maritime Silk Road" before Indonesia's Parliament in Jakarta on October 2nd, 2013 (Hong, 2015, 3). Under the Jokowi's presidency, China's proposal for cooperation has moved forward to increase the congruency ideas of 21st Maritime Silk Road and Global Maritime Fulcrum. During his visit to Indonesia in November 2014, China's Foreign Minister Wang Yi made four stages of connectivity between the countries, which consist of connectivity of two countries leader, down to practical cooperation (Chinese Embassy in Norway, 2014).

Despite China's perceived congruency between 21st Maritime Silk Road and Global Maritime Fulcrum, Indonesia is not left without dilemma. The campaign to attract foreign direct investment has pushed Jokowi's administration to juggle with international donor which actually a reinterpretation of certain of the doctrine of Indonesia's foreign policy. During his presidency, SBY proclaimed that Indonesia must maintain its navigation under the global turbulence change, and maintaining dynamic equilibrium among the great power to keep the position of Indonesia's free and independent foreign policy (Tan, 2010, 179). This kind of strategy of foreign policy has pushed SBY administration to keep a policy of "thousand friends and zero enemies" through actively involved in various international initiatives and forums (Connely, 2015, 3). In rather different fashion, President Jokowi and Vice President Jusuf Kala would like to maintain Indonesia's middle power position by selectively engaged global issues, while focusing on strengthening Indonesia's role in the regional dynamic that they considered as related directly

to Indonesia's people and interest (Widodo & Kalla, 2014, 13). Indonesia's foreign policy jargon under Jokowi latter famously quoted as "down to earth diplomacy" and "pro-people diplomacy (Antara, 2 February 2015).

Jokowi's foreign policy during his early time of presidency seems to neglect the centrality of ASEAN. Indonesia appears to put more attention to achieve its domestic programs by focusing on its national interest in economic diplomacy. Challenges are thus considered to maintain its strategic partnership, built during SBY's presidency and cordial relations with all neighbor countries without compromising domestic needs for investment and infrastructure development. Jokowi's seemingly pragmatic foreign policy is required to maintain the balance between its national interests. According to Renne L. Pattiradjawane, Indonesia has to acknowledge that the development of domestic connectivity could be achieved without at least maintaining regional stability (2016, 8). Whether national development would sacrifice the idea of dynamic equilibrium is under serious issues.

Beside external consideration, Global Maritime Fulcrum and China's enthusiasm for cooperation have to encounter domestic challenges. Democratization process has made Indonesia's foreign policy, and international cooperation will involve not only executive branch of the Indonesian government. Several studies have mentioned about the increasing role of parliament and society participation that influences Indonesia's foreign policy. The democratization of Indonesia is also meant for acknowledgment of international-domestic nexus of foreign policy (Pattiradjawane, 2016; Wicaksana, 2017; Nabbs-Keller, 2013, 56-82). Indonesian people would perceive participation of foreign investor, not only from China, in Global Maritime Fulcrum not merely serve their development goals but concomitantly maintain Indonesia's independence in the international forum. In this case, domestic perception is also appeared as a source of Indonesia's aspiration to secure its middlepowermanship role (Santikajaya, 2014).

Under such condition, this article would like to focus on how the congruency of 21st

Maritime Silk Road and Global Maritime would affect Indonesia's role as a bridge builder in maintaining its dynamic equilibrium. This article argues that under the dire needs of foreign capital to support domestic connectivity, Indonesia remains in requirements to maintain its dynamic equilibrium in its economic diplomacy. This idea could be achieved through widening the scope of its horizon in building congruency of Global Maritime Fulcrum with other regional countries. This article will consist several elaborations on the idea of Global Maritime Fulcrum and Indonesia Economic Diplomacy, congruency of GMF and 21st MSR and Indonesia-China relations, and legacy of SBY and Indonesia's middle power foreign policy under Jokowi.

GLOBAL MARITIME FULCRUM AND INDONESIA'S ECONOMIC DIPLOMACY

President Jokowi during his launching speech of GMF in East Asian Summit states that Global Maritime Fulcrum is consist of five pillars; rebuild national maritime culture, maintain and manage marine resources, prioritize the development of maritime infrastructure and connectivity by constructing sea highway that connecting western and eastern port of Indonesia, maritime diplomacy, and maritime defense as a country located between two busy oceans (Witular, 2014a). The five pillars relate to an element of culture and manpower, economic cooperation and development, and political security element. Those five pillars are

principally related and could be seen in isolation from one of another (Bandoro, 2014).

Proyek Tol Laut (Sea Highway) has made Indonesia's GMF seems more inward looking (Negara & Das, 2017, 3). However, according to Rizal Sukma, one of foreign policy advisor since Jokowi-JK campaigning for presidency, Sea Highway Project is one among the three key elements of five pillars that is more concrete agenda in its implementation. The other elements that comprise all three elements of Global Maritime Fulcrum are building identity of marine culture and archipelagic nation and sense of common purpose to strengthening Indonesia's position as a nation located between two strategic oceans (Sukma, 2014).

Implementation of Sea Highway Project is to connect five major ports from western part of Indonesia up to the eastern part. Those five main ports are Belawan in North Sumatra, Tanjung Priok in Jakarta, Tanjung Perak in East Java, Makassar in South Sulawesi, and Bitung in North Sulawesi. The five big ports would be supported with connection to several smaller ports across the archipelagic country. While the five major ports will function as international hub for cargo shipping, they will supply by product from nineteen smaller ports that play as feeder. All the nine teen smaller ports are Malahayati Ports in Aceh, Batam in Riau Archipelagic Province, Talang Duku in Jambi, Palembang in South Sumatera, Panjang, Teluk Bayur in West Sumatera, Tanjung Emas in Central Java, Pontianak in West Kalimantan, Banjarmasin in South Kalimantan, Sampit in Central Kalimantan, Palauan Samarinda in East Kalimantan, Pantoloan in Sulawesi Tengah, Bitung in Sulawesi Utara, Ternate in Maluku Utara, Ambon in Maluku, Jayapura in Papua, and Sorong in Papua Barat.



Source: RPJMN 2015-2019 p. 9-57

Figure 1. 24 Strategic Ports in Source, Coen van Dijk, Pieter van de Mheen, & Martin Bloem, "Indonesia Maritime Hotspot Final Report," (2015, 13) Tol Laut Project

Balikpapan/Kanangau, Samarinda/Palaran in East Kalimantan, Tanau/Kupang in East Nusa Tenggara, Pantoloan in Central Sulawesi, Kendari in South East Sulawesi, Ternate in North Maluku, Ambon in Maluku, Sorong in West Papua and Jayapura in Papua (Communication and Public Information Bureau, Ministry of Transportation of Indonesia, 2015).

Sea Toll Policy is a sub-agenda of Nawacita (Nine Programs) to increase the people productivity and competitiveness in international market. The Tol Laut is to develop internal connectivity in order to equal distribution of development (Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara-LAN, 2015, 46). This is the main point of Sea Highway that distinguishes itself with previously known as Pendulum Nusantara Policy launched under the administration of SBY (Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara-LAN, 2015, 3). The focus on infrastructure has been set up since MP3EI published by SBY's second term of presidency in 2011 (Purba, 2012, 30). The Pendulum Nusantara stopped as shipping cargo program, of those 24 strategic ports. On the other hand, Sea Highway program will also include 160 non-commercial ports as a sub-feeder of Sea Highway, building 50 pioneer shipping and 193 pioneer shipping routes (Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara-LAN, 2015, 48). This is an aspect of pro-people from Jokowi that was put on his campaign program.

Despite the contention of whether Jokowi's sea highway is a genuine project or merely continuation of concept from SBY's administration, the important thing that should be capture is Jokowi's plan to give more attention to implementation all development projects. This fact is reasonable according to Satria Sambijantoro (2014). Even though SBY's administration has successfully achieve economic growth and high standing international stance for Indonesia, the administration could not fully catch the economic potential and the indecisive leadership of SBY has brought about slowness in infrastructure development in Indonesia. Sambijantoro referred to unfinished and postponed infrastructure projects under SBY's administration. More importantly from all the projects are the MP3EI, which was the legacy

of SBY's administration, up to final months of SBY's presidency only completed 3.2 percent of its yearly target in IDR 467 trillion, based on the data from the office of the Ministry of Coordinating Economic (Sambijantoro, 2014).

Therefore, since the initial phase Global Maritime Fulcrum, aspects that catch attention of Jokowi's administration and many international audiences are the elements of economic cooperation and infrastructure development. The third pillar is presumably the most daring project since it will cost at least Rp 699 trillion (US\$ 57.40 billion) to support Global Maritime Fulcrum ambition. The estimated total cost already included the investment of 24 commercial seaports across the archipelago (Rp. 243.6 trillion), 1,481 non-commercial harbors (Rp 198 trillion), and expense for acquiring the vessels needed (Rp 101.7 trillion). All of those investments aim to reduce logistic cost in the archipelagic country. National Development Planning Board (Bappenas), it will reduce the current of logistic expense 23.5 percent of GDP to 19.2 percent in 2019 (Natahadibrata, 2014). Bappenas has already acknowledged that state budget will not fully fund the sum of total investment. Indonesia itself during the national budget of 2016 and 2017 only allocated spending budget for infrastructure IDR 317.1 trillion and IDR 387.3 trillion (Negara & Das, 2017, 4). The two consecutive years budget shows that the state budget is far below the needed amount of capital.

Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) in its Investment Strategic Plan 2015-2019 shows that it will involve at least 30 percent of private participation in the budget plan of infrastructure development in Indonesia. The project also shows that The State Budget will have to cover 40 percent of the total required funding, while the local government will jointly invest in infrastructure around 10 percent (van Dijk, van de Mheen, & Bloem, 2015, 13). This percentage of private participation will be much higher as shown in the National Ports Master Plan. In Public-Private Partnerships (PPP) for developing the marine highway, private sector is expected to contribute up to 70%. Indonesia BKPM identifies four sources of funding for infrastructure development in Indonesia in its

budgeting plan 2015-2019. The full description of composition of budget plan is shown in the table below (van Dijk, van de Mheen, & Bloem, 2015, 12).

Besides the enormous amount of fund that will be used for financing the Sea Highway project, based on source budgeting also could be depicted that problem of coordination would appear among the various actors involved in this mega project. According to the table, Indonesia will have to established strategic coordination not only with the private sectors which are expected to share large sum of budget but also with the local governments in all the provinces and regents involve in this plan. Even though, government of Indonesia believes that it could meet the required fund by establishing Public Private Partnership (PPP) by passing the Presidential Regulation no. 38/2015 which supplanted the Presidential Regulation no. 67/2005 on PPP (PwC Indonesia, 2016, 32). Based on weakness of the rule from several projects in the past under such scheme of cooperation (Purba, 2012, 32), the new Presidential Regulation creates stimulus by offering a more conducive legal framework and increasing number of eligible sectors.

According to study by Aswicahyono and Friawan (2008), several crucial issues hindered the development of Indonesia infrastructure project, which consist of institutional problems, financing issues, pricing issues and competition, corporatization and privatization issue (Aswicahyono & Friawan, 2008, 148). Aswicahyono and Friawan (2008) elaborate institutional issues and financing issues as problem-related with changing institution that Indonesia faces after it decentralized the authority to local government. Decentralization to certain extent has brought about several unsynchronized and uncertainly regulation between central and local government. The crucial problem resulted from decentralization, in the end, leads to hesitation from the private sector to participate in the infrastructure development (Aswicahyono & Friawan, 2008, 149). Another problem caused by contradiction of perception of decentralization by the local elites and the spirit of GMF, which is actually central government program. In this kind of relation, the local government often has vertical conflict with central government especially on issue of natural resources management (Wicaksana, 2017, 10-11).

Table 1. BKPM Investment Strategic Plan 2015-2019

No.	Sector	State Budget	Regional Budget	State-Owned	Private	TOTAL
1	Road	28.3	16.7	5.4	16.7	67.1
2	Railways	12.5	-	0.9	10.2	23.6
3	Sea Transportation	41.5	-	19.9	13.7	75.0
4	Air Transportation	7.1	0.4	4.2	2.1	13.8
5	Land Transportation (included ASDP)	4.2	-	0.8	-	5.0
6	City Transportation	7.5	1.3	0.4	0.4	9.6
7	Electricity	8.3	-	37.1	36.3	81.7
8	Energy (Oil and Gas)	0.3	-	12.6	29.3	42.2
9	Information Technology and Communication	1.0	1.3	2.3	18.6	23.2
10	Water Resources	23.0	5.7	0.6	4.2	33.4
11	Drinking water and waste	18.9	16.5	3.7	2.5	41.6
12	Housing	32.0	3.7	1.0	7.3	44.0
	Total Infrastructure	184.6	45.4	88.9	141.0	460.0
	Percentage	40.14%	9.88%	19.32%	30.66%	100.00%

Source: Coen van Dijk, Pieter van de Mheen, & Martin Bloem, "Indonesia Maritime Hotspot Final Report," (2015, 13)

In financing issue, Aswicahyono and Friawan comment that only smaller amount can be attracted from national private sector. However, attracting international private sector and official development assistance are not an easy way out since the problem of regulation remains the bigger concern of international participation in Indonesia's infrastructure (Aswicahyono & Friawan, 2008, 152).

Indonesia's PPP remains entrapped in cumbersome process since it takes minimum of 40 permits before the project could get permission to commence. In referring to information from Negara and Das (2017), Central Java power plant project took 50 licenses and permits before the construction. Both of the scholars also added that decentralization increases the complexities of the process (Negara & Das, 2017, 10).

The government of Indonesia addresses the problem by creating the Committee for Acceleration of Priority Infrastructure Delivery (KPPIP) as in charge body for monitoring, coordinating and speeding up implementation the program of marine highway. The Committee is a centralized government body consists of Minister of Finance, Minister of PPN (National Development Planning)/Head of Bappenas (National Development Planning Agency), and Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning.

The Coordination Ministry for Economic Affairs takes charge as leading institution of KPPIP. The committee has been instructed to select National Strategic Project (PSN, Proyek Strategis Nasional) as prioritized project based on President Regulation No. 3/2016 on Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects (Negara & Das, 2017, 10). Another Presidential Regulation No. 58/2017 later supersedes the Presidential Regulation No. 3/2016. The national strategic project increases the number of involving project to become 245 and additional 2 programs, which is electricity programs and aircraft industry program (KPPIP, 2017).

Infrastructure project to implement the Global Maritime Fulcrum and especially marine highway shows impact on increasing

trend of government spending on infrastructure. In APBN-P 2016, infrastructure spending increased by 9% from previous year. The rise of government spending in the fiscal year of 2016 appeared to be unchanging even though there was budget cutting before second quarter began.

The budget spending eventually affected several projects in the second phase of budget cutting. This cutting resulted in reschedule or slow down the construction of some of the infrastructure project like Madiun-Kedungbanteng double-track project in East Java, and the Makassar-Parepare railway construction in South Sulawesi.

Effect of decreasing source of state budget even admitted by the Ministry of Public Works and Public Housing, which the official said the impact varies from disrupting or delay of the completion of some multi years project (PwC Indonesia, 2016, 7). Despite the cut in 2016, the fiscal budget of 2017 indicates allocation of IDR 287.73 trillion (around US\$ 30 billion) for infrastructure development. Such amount of allocation of capital is the highest budget to spend which reveals an increase of 22% from the previous year.

KPPIP has decided to spend the allocated money for funding 30 prioritized projects from 2016 to 2019 (HKTDC Research, 2017). For total of 245 projects and 2 programs under the list of the national strategic project, KPPIP estimates the total cost will reach IDR 4.197 trillion. The required capital could be shared among state budget (IDR 525 trillion), SOEs (owned by central government or local government, IDR 1, 258 trillion), and private source (IDR 2,414 trillion) (KPPIP, 2017).

The conditions as mentioned above indicate that Indonesia could not stand alone in order to achieve its strategic project. Not only domestic problems remain critical hindrance for successfully completed the target of sea highway project, but the project has enforced Indonesia to be more effortful in creating opportunity with international counterparts. Internal connectivity in marine highway may attract global investor while concomitantly required domestic attentiveness towards coordinated economic diplomacy.

CONGRUENCY OF GLOBAL MARITIME FULCRUM AND 21ST MARITIME SILK ROAD AND INDONESIA-CHINA RELATIONS

Indonesia and China in the early 21st century commenced warmer bilateral relations. President SBY has successfully contributed in building a solid foundation of the countries by signing a strategic partnership (April 2005) that in subsequent years elevated to a comprehensive strategic partnership (November 2013) (Mingming & Xiaochun, 2015). President SBY signed two important agreements with two different China's leaders. In 2005, SBY's counterparts from China was President Hu Jintao, while in 2013 (Chongbo, 2011, 132), SBY shake a deal with President Xi Jinping. The two agreements were signed during two special occasions. The first one was held in Bandung after the commemoration of 50 years of Asia Africa Conference, which also celebrated as 50 years of bilateral relations between two countries (Sinaga, 2015, 3). The second agreement was reached after the first official visit of President Xi Jinping after assuming the presidency in March the same year. During the visit, Presiden Xi also made a public speech in front of Indonesia Parliament about 21st Maritime Silk Road and proposed to Presiden SBY about his plan to establish later known Asia Infrastructure and Investment Bank (AIIB) (Indonesia, China forge comprehensive strategic partnership in various field, 2013). Under President Jokowi, Indonesia and China agreed to strengthen comprehensive strategic partnership in March 2015, in which maritime partnership gains special attention (MOFA Republic of Indonesia, 2015).

The expansion of bilateral relations between Indonesia and China was preceded by the growing activity of both countries in various international forum. Under the President SBY, Indonesia activism in international forum became more prominent. Besides the strategic partnership with China, Indonesia made many strategic partnership agreements, like with India (2005) (Brewster, 2011, 232), New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP) (2005) (MOFA Republic of Indonesia, 2011), Japan (2006) (MOFA of Japan, 2006), South Korea (2006) (MOFA Republic of

Indonesia, 2007), Vietnam (2013) (Vietnam, RI to upgrade, 2013; Tuan, 2013). President Jokowi also extended the agreement of comprehensive partnership (2010) by signing a strategic partnership with the US during his state visit to Washington in 2015 (Parameswaran, 2015). Foreign policy approach that focuses on building special agreement with immediate neighbor countries is part of maintaining Indonesia's concentric foreign policy and securing its security and economic interest (Anwar, 2013, 11).

Even though China launched its 21st Maritime Silk Road in late of SBY's presidency, it could not be neglected the role of MP3EI of SBY administration in reorienting Indonesia focus on infrastructure. It might be China's moves that firstly seen Indonesia strategic role in supporting the idea of the regional sea-route connectivity. Jokowi's administration in this context plays his role in accentuating the infrastructure program towards more maritime rather than just hub-spoke between the islands in Indonesia, which eventually affects the awareness of responding the geoeconomic and geopolitical change in the regions. The vision brought Indonesia more aware of its potential as a fulcrum of two oceans and continents.

Since the 21st Maritime Silk Road is basically about uniting and expanding the common interest between China and other countries located along the route. The policy will concern on activating potential growth and achieve mutual benefits in more extensive areas. Consequentially the 21st MSR will connect China's port with other countries through maritime connectivity, inter-city cooperation and economic cooperation (Liu, 2014). The proposed sea route spans from ports on the southern coast of China through the Red Sea then reach the Mediterranean Sea in which it will meet the land-based Silk Road in Venice. Thus, there will be two elements of Silk Road, land-based and maritime based. In the Maritime Silk Road, Indonesia will become one important partner since the archipelagic state has strategic sea-route in the connectivity scheme. The decision of President Xi Jinping to give a speech in front of Indonesian Parliament about the 21st Maritime Silk Road symbolically shows the vital position

of Indonesia under the China's plan (Zhao, 2015, 22).

In his speech in front of Indonesia's Parliament, President Xi Jinping emphasized five strategic areas. In his brief, President Xi Jinping focused on the needs and supporting principles required in his proposal. It includes trust; win-win solution; a principle of assisting and helping among all the participant countries; enhancement of mutual understanding and friendship; and finally, the principle of openness and inclusiveness. President Xi understands that the proposal he brings will need support from China's surrounding neighbor. The Maritime Silk Road also, as he elaborates further, will include the aspect of multiculturalism since it will embrace countries from the wide-ranging region and different cultural background. In his speech, President Xi Jinping also mentioned about the ASEAN-China Maritime Fund as one of China's support for regional development that congruent with his ideas (Xi, 2013).

The China's proposal has an element of history in it since it will recreate the success of ancient China during the kingdom era. Not only in the sense of recreating the trade route of Admiral Zheng He but also it should notice that the intended course of the 21st Maritime Silk Road in the ancient time was recorded as prosperous zone before colonization dominated those ports and city (Penennungi, 2015, 5-6). There is optimism that the ancient spirit could be reinvigorated. Nevertheless, there is also skepticism about the lack of original spirit of ancient silk-road compare to the modern maritime silk-road (Koh, 2015).

However, overemphasizing on the historical construct of Silk Road project invites critics. According to Tai Wei Lim, "the constructed nature of the Silk Road is a clear fact." He elaborates further his argument by citing that even both maritime and land-based Silk Road are modern scholar invention. The term "maritime silk road" firstly comes from Japanese scholars who studied the maritime ceramics trade in the 1970s. Land-based Silk Road which connected mainland China to Central Asia up to Europe was about the supply chain of trade through myriad intermediate traders. Based on those

findings, Lim concurs that "Beijing's version of OBOR is a conscious state-constructed route (Lim, 2016, 78). The nostalgic narration since then could not overlook the needs to building good-neighborliness with all those countries involved in the policy (Zhao, 2015, 1).

In comparison with Indonesia's Global Maritime Fulcrum, China's 21st Maritime Silk Road gives more attention on building its global connectivity, while the Indonesia's connectivity proposal is about national development but in parallel with the dynamic of extensive East Asia regional dynamic. The vision could be discerned in the five pillars of Global Maritime Fulcrum announce by President Jokowi (2015) (Sambhi, 2015, 41). Dewi Fortuna Anwar regards the global maritime fulcrum contains an element of foreign policy, as well as an economic development strategy, while at the same time an aspect of defense strategy (Heriyanto, 2015).

Leaders and high officials from Indonesia mostly perceive the development of two strategies as complementary and mutually supportive. On 2 November 2014, Foreign Minister Wang Yi on his official visit and met with President Jokowi and his counterparts Foreign Minister Retno Marsudi comment that, "Jokowi's vision of Indonesia as a maritime fulcrum could complement Beijing's new Maritime Silk Road." He added that both plans aim to strengthen maritime connectivity and enhance the capacity of countries in Southeast Asia to maximize security and the management of maritime resources. China would enthusiastically participate in Indonesia's aim to be a maritime power, mainly by assisting with infrastructure development. President Jokowi commented that "Indonesia is on the way of developing into a maritime power, while China proposes to build the Maritime Silk Road of the 21st century; the two initiatives highly fit with each other" (Zhao, 2015, 22-23). Though President Jokowi also added his previous comment with a rather nationalistic tone and his pro-people policy, "so long as the principle of sovereignty is safeguarded, and the people benefit, we can work together" (Hussein, 2014)

The 21st Maritime Silk Road will involve 17.9 percent of China total trade. The aspect of people-to-people connectivity will create more

opportunity for people movement of more than 15 million between China and ASEAN alone (Liu, 2014). In a total of the 21st MSR, it will cover a total population of 3 billion people. China's Ministry of Commerce estimates it will involve 26% percent of total China's foreign trade (Clover & Hornby, 2015). In the period of 2015 alone, China and ASEAN have been connected by more than 1,000 flights. The description could be more complicated when another mode of transportation is added to the picture since many people in the region remain utilizing traditional naval and river transport. Sub-state level cooperation has been growing by the relation among municipal level in the region which reached 140 twin cities established between ASEAN and China (Do & Ha, 2015, 88-89). Such potential and description like that is what Minister Wang Yi calls out his visit to Indonesia is about connectivity (Chinese Embassy in Norway, 2014).

Sister province between Indonesia and China has been commenced at least since early the 2000s. Inter-province cooperation between Indonesia and China comprise of trading, agriculture, investment, tourism, and technology (Province of Banten, Indonesia, 2010; FGD Transcript, 2011). Even West Java province has connected with four provinces in China like Shandon, Heilongjiang, Guangxi and Sichuan (Wage, 2017). However, the prospect of cooperation comes with hindrance. A problem of influx of migrant workers from China to Indonesia has emerged, due to certain extent, it was part of the agreement. Some infrastructure projects that come with such agreement were Suramadu Bridge in East Java and hydro power station in Jati Gede in West Java (FGD Transcript, 2011).

Complementarity and congruency of the 21st Maritime Silk Road and the Global Maritime Fulcrum more clearly if we consider how Indonesia needs support for funding its program. China is quite sure capable of supporting Indonesia needs on financial and technical skill. Good neighborhood policy of China towards Indonesia was highlighted during Asia financial crisis in late of the 1990s. China contributed by providing almost US\$4 billion for the affected countries like Indonesia, Thailand, Malaysia,

and South Korea (Copper, 2016, 148). Since China becomes a dialogue partner of ASEAN, its role in supporting development in ASEAN countries has been increasing significantly. Trade between China and the members of ASEAN have increased especially after ACFTA (ASEAN China Free Trade). Since the implementation of the free trade agreement, China moved to become ASEAN's largest trading partner, while ASEAN positioned as China's third largest trading partner (Hermawan, 2015, 31-32).

Financial power as the primary instrument may be the source of China upper hand in Indonesia's global maritime fulcrum. As mentioned before, China already allocated funds and founding institution to deliver the power to regional countries that surely needed help to boost infrastructure development. There are Maritime Silk Road Fund and AIIB. The AIIB was built under resistance of US for it may exclude the US and become the instrument for China to exert its influence over regional countries (Perlez, 2014). However, after several western countries, like UK, Australia, South Korea and joined the bank, it may become more multilateralized. China's funding institution may as well play as an alternative for the western dominated financial institution like World Bank, IMF, and ADB (Lim, 2016, 65). The capacity of AIIB could take up the lag of capacity of the western financial institution. Global management consulting firm McKinsey & Co estimates that capital needed for infrastructure in the East Asian region itself is about US\$ 10 trillion between 2010-2020 (Bai, 2014). The established financial institution like the ADB and World Bank, according to *The Economist*, only holds available funding for infrastructure around US\$ 160 billion and US\$ 223 billion (Hermawan, 2015, 32). Another advantage of AIIB is that it could be represented the interests of developing countries with a focus on "infrastructure and connectivity" and less enforcing to borrowers on liberal precept like the western lead institutions (Wong, 2016).

Indonesia under President Jokowi welcomed the founding of AIIB and definitely aims for alternative funding for its maritime and infrastructure ambition. Indonesia would plan

to secure more than US \$ 1.8 billion of loans from AIIB. China's company also welcomed in Indonesia even though criticism about the practice in acquiring project, low-level quality of the completed project, and practice of importing low level migrant workers from China have risen (Syailendra, 2017, 7). Despite the fact that China's eagerness to support Indonesia infrastructure and maritime projects, another point made by senior scholars from Indonesia C.P.F Luhulima who worried about a superimposition of China's MSR towards Indonesia's GMF. This could be discerned if the latter may become integral parts of China's MSR, while Indonesia lost its position to bargain (Luhulima, 2014).

On the congruency and interest of Sino-Indonesia related to infrastructure and maritime cooperation, Tai Wei Lim of SIM University Singapore categorizes it under three type of possible relations. The first one schemes the relations of Sino-Indonesia on the China's interest in "New Normal." The China's needs to keep domestic production, and secure market in neighboring states are behind this perspective. The second scenario predicts relation of both maritime projects as on the pragmatic interest of Indonesia to secure financial support from the China's lead funding institution. The third scenario discerns the relations on strategic interest Indonesia under MSR while at the same time securing its position to manage the building up integrated connectivity under centrality of ASEAN (Lim, 2016, 66). Three possible perspectives of Sino-Indonesia relations are quite discernible while the strategic calculation is on the capacity of Indonesia to keep its foreign policy maneuvers open. In the next part of the article, it will focus on option for Indonesia to manage its middlepowermanship under a rather superimposition situation of the 21st Maritime Silk Road towards Indonesia GMF.

SBY'S LEGACY AND CHALLENGES OF INDONESIA'S MIDDLE POWER FOREIGN POLICY UNDER JOKOWI'S PRESIDENCY

"the relations of major powers are not entirely up to them. Middle and smaller powers too can

help lock the major powers into this durable architecture."

President Susilo Bambang Yudhoyono –
Shangrila Dialogue 2012

Indonesia's foreign policy after 32 years under authoritarian regime has undergone dynamic experiment though it remains intact with its norms as well as identity, free and active foreign policy. The idea has been set up since the speech of Vice President M. Hatta in front of Indonesian provisional parliament (KNIP) in 1948 (Anwar, 1990, 227). Indonesia's foreign policy since the infancy of the republics cannot be separated from the norms (Laksmana, 2011, 162). However, the historical facts show that Indonesia did not become immune from the left and right leaning in its foreign policy. From Soekarno up to Soeharto, Indonesia's claim to maintain its free and active foreign policy. Despite the claims, under Soekarno Indonesia is more leaning to newly independent countries and maintain close relations with Beijing and Moscow. Contrast to that era, due to the economic problem at the onset of his administration, Soeharto kept his foreign policy closer towards the western country for securing his ideas of economic development (Tan, 2007, 153-158). Even though the two leaders have taken a different path, both of the leaders keep maintains the identity of non-alignment and pro-developing/post-colonial countries. Bandung spirits remain the corners stone of Indonesia's foreign policy although with different accentuation (Tan, 2007, 160).

After quite successfully managed democratic transition, Indonesian foreign policy also affected not only by the changing dynamic of balance of power and regional architecture. Indonesia's foreign policy aims as well to maintain economic development after surviving from Asian Financial crisis. Complexities of foreign policy making, and decision related to that matters become higher due to impermeable capacity of international economic situation with domestic situation. President SBY in his initial years of his administration called this uncertain terrain of foreign policy as "turbulent ocean." In his speech in 2005, President SBY coined the term of "navigating the turbulent ocean" in

referring dynamic of international system and increasing linkage of international and domestic issues.

During his ten years of presidency, SBY has been fortunate to have two excellent foreign ministers. Minister Hassan Wirajuda and Minister Marty Natalegawa have lead Indonesia MOFA with managing ability that could complement SBY's attention on this matter. Under SBY's first term of presidency, Minister Wirajuda has put solid institutional foundation for Indonesia's MOFA to keep intact with global challenges, and he introduced the term of intermestic and focused on public diplomacy (Pattiradjawane, 2016, 3). In SBY's second term, Minister Marty Natalegawa proposed a concept of "dynamic equilibrium" which could be defined as non-dominated regional dynamic with stressing on capability of small and medium countries to keep the balance among great power politics. Natalegawa mentioned the concept in an interview with The Jakarta Post daily related to East Asia Summit May 2010 (Pattiradjawane, 2010).

Besides those basic normative foundations, Indonesia's foreign policy also based on geopolitical and geostrategic consideration. Indonesia's vision of regional stability was implemented on the foundation of ASEAN under Soeharto administration. Since the early of the 1970s, one of Indonesia's prominent scholars Soedjatmoko has proposed the idea of dynamic equilibrium. This initial version of dynamic equilibrium is rather synonymous with the concept of Minister Natalegawa (Soedjatmoko 1972a, 15-16; Soedjatmoko 1972b, 37). The distinction of the two ideas is more on period of Cold War international system and current transitional power in new millennium, and especially the growing significance of complex interdependence among the East Asian countries. Concentric circle of foreign policy, therefore, could be named as the cornerstone of Indonesia's foreign policy. The implementation of this policy has been commenced since Soeharto's administration by focusing on ASEAN centrality. Thus, dynamic equilibrium and ASEAN centrality could be discerned as a combination of balance of power consideration, complex interdependence, and normative consideration built under ASEAN

institution (Roberts & Widyaningsih, 2015, 274; A Conversation with Marty Natalegawa, 2010).

One important foreign policy lexicon that has been introduced into Indonesia's foreign policy in the middle power approach. Even though the activism could be traced back to early days of the republic (Kusumaningprang 2017, 152-179), the utilizing concept by Indonesian official could be said taken by SBY's speech in 2012 (Susilo Bambang Yudhoyono, 2012). Besides a literally used of the concept of a middle power country, SBY has come out with a concept of bridge builder. Operationalization of the concept could be perceived as bridging between developing countries and developed countries like when he delivered speech in front of Non-Aligned Movement (NAM) in Havana, Cuba (2006). Indonesia also plays such a role in the western world and Islamic world after the US campaign of Global War on Terror (Tan, 2007, 173). The role taken by Indonesia could be said to have similarities with the concept of middlepowermanship proposed by international scholars, in a sense that it contains element of good global citizenship (Cox, 1989, 862). However, Santikajaya comments that the bridge builder and middlepowermanship could be perceived as two different concepts since the bridge builder clearly makes a distance from being supportive to the US like the role of Canada and Australia (Santikajaya, 2016, 568). In addition to that comparison, Santikajaya distinguishes Indonesia's bridge builder role with the revisionist ambition of BRICS countries. In this case, Indonesia is only assumed to play a soft revisionist towards global order while at the same time play normative bridge builder (Santikajaya, 2016, 570).

The above mention legacy for Indonesia's foreign policy could be neglected by Jokowi's administration. Despite the urgent need for supply of funds and investment, Indonesia must be able to face the challenge of balancing between the economic and political interest in context of developing Global Maritime Fulcrum mega-project (Pattiradjawane, 2016, 6-10). Jokowi's administration also faces the challenge of coordination and management of perception among his ministry and supporting government

agency (Syailendra, 2017, 12). After all of those challenges, Jokowi's and his administration must be able to manage the dynamic of domestic institutional politics in democratic Indonesia. Managing criticism from the opposition in parliament, range of local administration under decentralized Indonesia (Wicaksana, 2017, 6-10), and domestic public opinion (Pattiradjawane, 2016, 16-17), are among the crucial factors should be his priority before he could gain international support.

Citing from several Jokowi's speeches about his Global Maritime Fulcrum ambition, it could be noticed that he already understands the challenge of keeping Indonesia's dynamic equilibrium doctrine intact. Global Maritime Fulcrum based on his speech in Myanmar (2014). He clearly mentioned the changing of regional dynamics based on the rise of China's power in global politics, and extended regionalism towards Indo-Pacific region (Witular, 2014a).

Notwithstanding the understanding of the external situation, Jokowi should pay attention towards managing dynamic equilibrium in his economic diplomacy due to attractiveness and complementarity of his program with regional and major power plans. At the same period of his announcement of his GMF, there are already several similar projects could be fitted with Indonesia's plan. To name a few are the Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) (Negara & Das, 2017, 5), Japan-India's Indo-Pacific (Wicaksana, 2017, 12), and especially China's OBOR (One Belt One Road) or Belt Road Initiatives. Since the commencement of Global Maritime Fulcrum, it could be said that regional competition to support the program has been started especially in the case of China and Japan in terms of infrastructure project, and between China and the US in terms of natural resources investment (Wicaksana 2017, 12, 14). So it could concur that GMF itself pose a new challenge for credibility of Indonesia's dynamic equilibrium. The competitions are other challenges that might have been overlooked by Jokowi's, or it may as well become a challenge to strategically implement the dynamic equilibrium. Despite the speculation, the fact is that Jokowi could not abandon the path of his predecessor and public

perception, as well as hiding behind his rhetoric of pragmatic foreign policy like, "down to earth diplomacy" (MOFA Republic of Indonesia, 2015, 57), since the challenges now have become concentrated on how to manage the sustainability of his mega project and keeping the centrality of ASEAN.

More importantly, it is Jokowi and Jusuf Kalla who inserted the term middle power in their campaign program during the presidential election in 2014. At the same document, Jokowi explained the role of Indonesia as middle power should be achieved through selectively engage regional and global issues while at other points he expected to broaden the concentric circle of Indonesia's foreign policy to anticipate the prospect of Indo-Pacific. In the detail of the program, Jokowi and team seem recognize the centrality of ASEAN, and utilizing both strategic bilateral and multilateral forum (Widodo & Kalla, 2014, 13-14).

While boosting global maritime fulcrum as primary program and catching up with the lagging infrastructure development require special attention to domestic problem due to huge obstacle related to coordination problem, Jokowi's administration has to consider that international dynamics could hamper his program. Balancing is required, thus not only from economic and political interest, but alongside international and domestic, and intermestic problem as well. As it happens in the way Jokowi's decision to join the AIIB and China's lead financial institution. The single decision could have influence on how he tackles issue of securing financial institution for infrastructure development, playing bridging role between developing countries and the western institution that needs to be reform due to "democratic deficit" and lack of voice of Southern countries, but also to ensure that the new AIIB will not dominated by single country. Despite the fact, some of Jokowi's foreign policy tag line could be considered as criticism of over-activism of SBY's foreign policy that contradict his indecisiveness on managing domestic issue, Jokowi's have to remains aware of the big pictures of his foreign policy rather than tackling foreign policy and domestic issue as piecemeal approach under pragmatic rhetoric.

Referring to three possible scenarios on previous part of this article (Lim, 2016, 66), Jokowi have to choose between becoming superimposed by China's Maritime Silk Road, keeping pragmatic foreign policy for the sake of infrastructure development while neglecting dynamic equilibrium, and keeping his program sustain while managing the centrality of ASEAN through cooperation under MPAC.

CONCLUSION

Infrastructure development in Indonesia could be a breakthrough after several years lag behind other countries. Jokowi's decision to focus on global maritime culture has to be seen as a strategy to catch up with that. However, infrastructure has pushed Indonesia on the condition of opening its domestic economy for international actor to participate. Huge gaps between the availability of national capital and the total of financial needs for infrastructure development has enforced Indonesia's government to slim its bureaucratic system and creating special agency to accelerate the development. The government of Indonesia could stand alone to fill the financial gaps, even with the participation of national private sectors. This challenge certainly needs an international cooperation to support the program.

In strategic context global maritime fulcrum is the way Indonesia encounter the dynamic and balance of power in the regional. The sea highway is a supporting element of that strategy that supposed to be domestically oriented before it could be used to support capability of Indonesia under such turbulent region. Notwithstanding the domestic and economic focus of the sea highway has been proven it could create a problem that shows how international and domestic issues are interrelated. Indonesia needs to put more attention on domestic problem since it was due to lack of coordination among national actors that become the main obstacle to implementation of MP3EI. Jokowi leadership and his idiosyncratic of do-able mentality recently have become the engine to solve the chronic problem. Nevertheless, Jokowi leadership seems to focus on pragmatic and piecemeal approach

and pay less attention to the intermestic aspect of the sea highway project, and Global Maritime Fulcrum in general.

An increasing of China's participation in the infrastructure project in Indonesia initially was a modest international partnership as commonly among nation. The strategic partnership between two countries was a solid foundation for the two countries to develop more substantial cooperation. Built upon several mutually agreed basic norms such as Bandung Spirits and focus on infrastructure and connectivity, Indonesia and China have been perceived quickly moves to be a more comprehensive partnership. The two countries have common interest, yet they also have so many differences and problem between them. There was deficit of trust from Indonesian people towards the way Chinese companies operate in Indonesia, and certain problem related to p-to-p that comes out after increasing connectivity between two countries. Capability gap between Indonesia and China has made a number Indonesian decision maker, and scholars look cautiously on growing relations, especially on the so-called similarities of 21st Maritime Silk Road and Global Maritime Fulcrum. There is a concern of Indonesia's maritime project become superimposed by China's maritime because of China has a better position to driven and put Indonesia's maritime project as merely complement. At the possible scenario, Indonesia could play a more strategic role in the idea of connectivity, whether it comes from China, ASEAN, or other players in the region. The idea connectivity should be welcome as long as it could serve for the betterment of people and keeping ASEAN at the center of regional architecture and the dynamic equilibrium remains stable.

Those two problems managing China's involvement in positive dynamic equilibrium should be the concern of President Jokowi. Indonesia should keep its option to cooperate openly. The decision to joint AIIB is part of that idea, to keep the optional financing support open. But more importantly, Indonesia should maintain the role of bridge builder as an aspiration of its middlepowermanship. Therefore, managing credibility among all participants of

possible financial supporter has to be kept intact. Indonesia's membership in AIIB could become a mechanism to play this role by not only to secure the possibility of financial support for infrastructure but to serve Indonesia activism as a bridge builder between the new bank and the established financial institution. Indonesia should consider that its idea of connectivity could have a complementability with various program as long as Indonesia could play its idea of fulcrum or a bridge builder.

REFERENCES

- Anwar, D.F. (1990). "Indonesia's Relations with China and Japan: Images, Perception, and Realities," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 12, No. 3 (December 1990).
- Anwar, D.F. (2013). "Reinvention in Indonesia's foreign policy strategy," *East Asia Forum Quarterly*. Vol. 05 No. 04 October – December 2013.
- Aswicahyono, H& Deni Friawan. (2008). 'Infrastructure Development in Indonesia', in Kumar, N. (ed.), *International Infrastructure Development in East Asia – Towards Balanced Regional Development and Integration*, ERIA Research Project Report 2007-2, (Chiba: IDE-JETRO, 2008).
- Bai, M. (2014). "Will Asian Infrastructure Investment Bank Become a Reality?" *China Today*, October 16, 2014, http://www.china.org.cn/opinion/2014-10/16/content_33780011.htm accessed on 24 September 2017
- Bandoro, B. (2014). "Indonesia's Maritime Role Hinges on 'Pillars'," *Jakarta Globe*, November 27, 2014, <http://jakartaglobe.id/opinion/indonesia-maritime-role-hinges-on-pillars/> accessed 14 October 2017
- Brewster, D. (2011). "The Relationship between India and Indonesia An Evolving Security Partnership?" *Asian Survey*, Vol. 51, No. 2 (March/April 2011)
- Cigui, L. (2014). "Reflections on Maritime Partnership: Building the 21st Century Maritime Silk Road". *China Institute of International Studies* 5 September 2014. http://www.ciis.org.cn/english/2014-09/15/content_7231376.htm Accessed on 10 September 2015
- Clover, C. & Lucy Hornby. (2015). "China's Great Game: Road to a new empire" *Financial Times* 12 October 2015 accessed via <http://www.ft.com/intl/cms/s/2/6e098274-587a-11e5-a28b-50226830d644.html#axzz3qIslbaL1> on 15 October 2015
- Connelly, A. L. (2015). "Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges," *Contemporary Southeast Asia*. 37, no. 1 (2015).
- Copper, J. F. (2016). *China's Foreign Aid and Investment Diplomacy, Volume I Nature, Scope, and Origins*, (New York City: Palgrave Macmillan, 2016)
- Council on Foreign Relations. (2010). 'A Conversation with Marty Natalegawa, Minister of Foreign Affairs, Republic of Indonesia' 20 September 2010, <http://www.cfr.org/indonesia/conversation-marty-natalegawa-minister-foreign-affairs-republic-indonesia/p22984> accessed 5 February 2014.
- Cox, R. W. (1989). "Middlepowermanship, Japan, and Future World Order." *International Journal*. Vol. 44, No. 4 (Autumn, 1989)
- Do, T. S. & Ha Thi Hing Van. (2015). "ASEAN-China Relations since Building of Strategic Partnership and Their Prospects" *International Journal of China Studies*. Vol. 6, No. 2, August 2015.
- Heriyanto, D. (2015). "Five questions: Dewi Fortuna Anwar, Eminent international relations expert, and adviser to Vice President Jusuf Kalla discusses Indonesia." *Strategic Review* 14 July 2015. <http://www.sr-indonesia.com/web-exclusives/view/five-questions-dewi-fortuna-anwar>. accessed on 14 September 2015
- Hermawan, Y. P. (2015). "China's Dual Neighborhood Diplomacy and Indonesia's New Pragmatic Leadership: How Can ASEAN Preserve its Centrality in a New Challenging Dynamic?" *Georgetown Journal of Asian Affairs* Spring/Summer 2015.
- HKTDC Research. (2017). 8 March. "ASEAN in Focus: Indonesia as an Investment Destination," <http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Research-Articles/ASEAN-in-Focus-Indonesia-as-an-Investment-Destination/rp/en/1/1X000000/1X0A9A8Y.htm> accessed on 20 October 2017
- Hussein, Z. (2014). "Indonesia 'key in China's vision of Maritime Silk Road'" *The Straits Times* 04 November 2014 <http://www.indonesia-digest.net/3283maritime.htm> accessed on 17 September 2015
- Koh, T. (2015). "21st Century Maritime Silk Road". *The Straits Times* 04 August 2015 <http://www.straitstimes.com/opinion/21st-century-maritime-silk-road> accessed 13 August 2015.
- Kusumaningprang, R. M. (2017). "The Roots and Evolution of Indonesia's Middle Power Activism" *The Indonesian quarterly*. 45(2):152-179 · July 2017

- Laksmiana, E. A. (2011). "Indonesia's Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter?" *Contemporary Southeast Asia*. Vol. 33, No. 2 (August 2011)
- Lim, Tai Wei. 2016. "Asian Diplomacy: The "Fulcrum" Role of Two Major Powers in East Asia?" *The Journal of Northeast Asian History* Volume 13 Number 2 (Winter 2016)
- Liu, C. (2014). "Reflections on Maritime Partnership: Building the 21st Century Maritime Silk Road". *China Institute of International Studies* 5 September 2014. http://www.ciis.org.cn/english/2014-09/15/content_7231376.htm. Accessed on 10 September 2015
- Luhulima, C.P.F. (2014), 13 December. "Superimposition of China's 'silk road' and Indonesia's maritime fulcrum," *Jakarta Post*, December 13, 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/12/13/superimposition-china-s-silk-road-and-indonesia-s-maritime-fulcrum.html>. Accessed 1 November 2017.
- Nabbs-Keller, G. (2013). "Reforming Indonesia's Foreign Ministry: Ideas, Organization and Leadership." *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs.*, Volume 35, Number 1, April 2013.
- Natahadibrata, N. (2014). "Govt sets out maritime dream," *The Jakarta Post*, 22 November 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/22/govt-sets-out-maritime-dream.html>. Accessed: 28 April 2016.
- Negara, S. D., & Sanchita Basu Das. (2017). "Challenges for Indonesia to achieve its maritime connectivity plan and leverages on regional initiatives", *ISEAS Perspective*. 3: 2017.
- Panennungi, M. A. (2015). "ASEAN-China Economic Relations: A View from Indonesia" Working Paper in Economics and Business Volume V No.2/2015 Department of Economics, Faculty of Economics and Business University of Indonesia.
- Parameswaran, P. (2015). "The new U.S.-Indonesia strategic partnership after Jokowi's visit: Problems and prospects" *Brooking Institute* 2015, December 8, <https://www.brookings.edu/opinions/the-new-u-s-indonesia-strategic-partnership-after-jokowis-visit-problems-and-prospects/> accessed on 12 October 2016
- Pattiradjawane, R. L. (2010). "Indonesia dalam Politik Globalisasi," *Kompas*, 5 May 2010 <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/05/03204351/indonesia.dalam.politik.globalisasi> accessed on 10 October 2017.
- Pattiradjawane, R. L. (2016). "The Indonesian perspective toward rising China: Balancing the national interest," *Asian Journal of Comparative Politics*. 1–23 (2016).
- Pattiradjawane, R. L. & Natalia Soebagio. (2015). "Global Maritime Axis: Indonesia, China, and a New Approach to Southeast Asian Regional Resilience" *International Journal of China Studies*. Vol. 6, No. 2, August 2015.
- Perlez, J. (2014). "U.S. Opposing China's Answer to World Bank," *The New York Times* 9 October 2014, <https://www.nytimes.com/2014/10/10/world/asia/chinas-plan-for-regional-development-bank-runs-into-us-opposition.html> accessed on 14 October 2017
- Pradhan, S. (2016). "China's Maritime Silk Route and Indonesia's Global Maritime Fulcrum: Complements and Contradictions," *Institute of Chinese Studies Occasional Paper # 12* September 2016
- Purba, M. A. (2012). "The Rise of China Economic Power: China Growing Importance to Indonesian Economy," *Research Paper for Masters of Arts in Development Studies*, (the Hague: Graduate School of Development Studies Institute of Social Studies, 2012).
- PwC Indonesia. (2016). "Indonesian Infrastructure Stable foundations for growth: The second edition of PwC's annual Indonesian infrastructure report." 2016 www.pwc.com/id accessed on 10 October 2017
- Roberts, C. B. & Erlina Widyaningsih. (2015). "Indonesian Leadership in ASEAN: Mediation, Agency and Extra-Regional Diplomacy" in Christopher B. Roberts, Ahmad D. Habir, & Leonard C. Sebastian, *Indonesia's Ascent Power, Leadership, and the Regional Order*, (New York: Palgrave MacMillan, 2015)
- Sambhi, N. (2015). "Jokowi's 'Global Maritime Axis': Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead?." *Security Challenges*. Vol. 11, No. 2 (2015).
- Sambijantoro, S. (2014). "Lagging infrastructure clouds SBY's rich economic legacy," *The Jakarta Post* 15 October 2014, <http://www.thejakartapost.com/news/2014/10/15/lagging-infrastructure-clouds-sby-s-rich-economic-legacy.html> accessed on 2 October 2017
- Santikajaya, A. (2014). "Steady as she goes for Indonesian foreign policy, even with a new president," *East Asia Forum*. 27 March 2014, <http://www.eastasiaforum.org/2014/03/27/steady-as-she-goes-for-indonesian-foreign-policy-even-with-a-new-president/> accessed on 14 October 2017
- Santikajaya, A. (2016). "Walking the middle path: The characteristics of Indonesia's rise," *International Journal*. 2016, Vol. 71(4)

- Sinaga, L. C. (2015). "The Dynamics of Indonesia-China Relations in Politics, Defense-Security, and Economy in Southeast Asia: An Indonesian Perspective" in Lidya Christin Sinaga (Ed.), *Indonesia-China Relations: The Dynamics of Politics, Defense-Security, and Economy in Southeast Asia*. – (Jakarta: LIPI Press, 2015)
- Soedjatmoko. (1972a). "China's external policies: Scope and limitations," *The Adelphi Papers*. (1972) 12:92
- Soedjatmoko. (1972b). "The role of the major powers in the east Asian-pacific region," *Survival: Global Politics and Strategy*. 14:1 (1972).
- Sukma, R. (2014), 21 August. "Gagasan Poros Maritime" *Kompas*, 21 August 2014 <http://ekonomi.kompas.com/read/2014/08/21/080000726/Gagasan.%20Poros.Maritim> accessed on 2 October 2017
- Supriyanto, R. A. (2016), 22 February. "Developing Indonesia's Maritime Strategy under President Jokowi," *The Asan Forum*. 22 February 2016, <http://www.theasanforum.org/developing-indonesias-maritime-strategy-under-president-jokowi-1/> accessed on 2 October 2017
- Syailendra, E. A. (2017). "A Nonbalancing Act: Explaining Indonesia's Failure to Balance Against the Chinese Threat," *Asian Security* 2017.
- Tan, P. J. (2007). "Navigating a Turbulent Ocean: Indonesia's Worldview and Foreign Policy," *Asian Perspective*. Vol. 31, No. 3, 2007.
- Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara. (2015). *Kajian Sinergitas Kewenangan dan Hubungan Kerja Antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Fokus Implementasi Kebijakan Pembangunan Tol Laut, (Study on the Synergy of Authority and Working Relationship between Ministries/Agencies and Local Government, Focus on Implementation of Sea Highway Policy)* (Jakarta: PKSAN-HAN - LAN, 2015)
- Tuan, H. A. (2013). "Why the new Vietnamese-Indonesian strategic partnership will strengthen ASEAN" *East Asia Forum* 20 August 2013
- Van Dijk, C.; Pieter van de Mheen, & Martin Bloem. (2015). "Indonesia Maritime Hotspot Final Report," (Rotterdam: Netherland Marine Land, July 2015).
- Wicaksana, I G. W. (2017). "Indonesia's maritime connectivity development: domestic and international challenges," *Asian Journal of Political Science* 2017.
- Wu, C. (2011). "Forging Closer Sino-Indonesia Economic: Relations and Policy Suggestions." *Ritsumeikan International Affairs*. (Vol 10/2011).

Newspapers and Documents

- Xi, J. (2013). "Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament" (Jakarta: ASEAN-China Center, 2013) accessed through http://www.asean-china-center.org/english/2013-10/03/c_133062675.htm on November 1st, 2015
- Yudhoyono, S. B. (2012). "Keynote Address," *The 11th IISS Asian Security Summit The Shangri-La Dialogue Friday 01 June 2012*
- Widodo, J. & Jusuf Kalla. (2014), "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi, dan Program Aksi." (The Way of Change for Sovereign, Independent and Personable Indonesia, Vision Mission, and Action Program). (Jakarta: May 2014).
- Province of Banten. 2010. *Laporan Kunjungan Kerja ke Provinsi Zhejiang, RRT pada Acara Signing Letter of Intent Friendship Cooperation antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang, RRT on August 19–22, 2010*.
- MOFA Republic of Indonesia. 2015. "Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015—2019" (Strategic Plan of Ministry of Foreign Affairs 2015-2019), (Jakarta: MOFA, 2015).
- MOFA Republic of Indonesia. 2007. "Joint Statement between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea" http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1588_KOR-2007-0060.pdf accessed on 9 September 2007.
- MOFA Republic of Indonesia. 2011. "The New Asian-African Strategic Partnership (NAASP)" <https://www.kemlu.go.id/en/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/NAASP.aspx> accessed on 27 April 2017
- MOFA Republic of Indonesia. 2015. "Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic of China and The Republic of Indonesia" (Beijing, MOFA of Indonesia, 26 March 2015) <https://www.kemlu.go.id/Documents/joint%20statement%20RI-Tiongkok/Joint%20Statement.pdf> accessed on 8 August 2016
- KPPIP. 2017. "Proyek Strategis Nasional" (National Strategic Project), <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/#> accessed on 10 October 2017
- Communication and Public Information Bureau Ministry of Transportation of Indonesia. 2015. "Pembangunan Tol Laut Libatkan 24 Pelabuhan" (Development of Sea Highway Involved 24 Ports), 25 Mei 2015 <http://dephub.go.id/berita/baca/pembangunan-tol-laut-libatkan->

- 24-pelabuhan/?cat=QmVyaXRhfA== accessed on 2 October 2017
- Du, Mingming & Ma Xiaochun. 2015. "Ambassador: Indonesia-China cooperation is at its highest level ever," *People's Daily Online* April 17, 2015, accessed through <http://en.people.cn/n/2015/0417/c98649-8879957.html> on October 16, 2015
- Wong, Sue-Lin. 2016, 16 January. "China launches new AIIB development bank as power balance shifts" *Reuters* 16 January 2016, <https://www.reuters.com/article/us-asia-aiib-investment/china-launches-new-aiib-development-bank-as-power-balance-shifts-idUSKCN0UU03Y> accessed on 12 October 2016
- Setiawan, A. (2015). 2 February. "President Jokowi Ask the Indonesian Ambassador Emphasizes the Economic Diplomacy" *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia* 2 February, 2015, accessed through <http://setkab.go.id/en/president-jokowi-ask-the-indonesian-ambassador-emphasizes-the-economic-diplomacy/> on October 9th, 2017
- AntaraNews.com. 2015, 2 February. "Indonesia's international diplomacy to focus on public interest," <http://www.antaraneews.com/en/news/97620/indonesias-international-diplomacy-to-focus-on-public-interest>, accessed on 17 November 2015
- Zhao, H. (2015), 15 March. "China's New Maritime Silk Road: Implications and Opportunities for Southeast Asia." *Trends in Southeast Asia*, 3/15 (2015).
- Wage, W. (2017), 7 May. "Ke China, Aher Pimpin Kerja Sama Sister Province 4 Daerah" (Going to China, Aher Leads Delegation for Sister Province Cooperation with 4 Provinces in China), *Bisnis.com Jawa Barat* 7 May 2017, <http://bandung.bisnis.com/read/20170507/82444/570391/ke-china-aher-pimpin-kerja-sama-sister-province-4-daerah> accessed on 2 October 2017
- The Jakarta Post, 2013, 27 June, "Vietnam, RI to upgrade relationship to strategic partnership," 27 June 2013, <http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/27/vietnam-ri-upgrade-their-relationship-a-strategic-partnership.html> accessed on 3 August 2016.
- AntaraNews.com. 2013, 7 October. "Indonesia, China forge comprehensive strategic partnership in various field." <https://en.antaraneews.com/news/91035/indonesia-china-forge-comprehensive-strategic-partnership-in-various-field> accessed on 14 January 2016
- Chinese Embassy in Norway. 2014, 1 November. "Wang Yi: Forging China-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership in Name and Fact," 1 November 2014, accessed through <http://www.chinese-embassy.no/eng/zyxw/t1207480.htm> on October 16th, 2015
- Witular, R. A. (2014a). 13 November. "Jokowi launches maritime doctrine to the world," *The Jakarta Post*, 13 November 2014, accessed through <http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/13/jokowi-launches-maritime-doctrine-world.html> on 29 October 2015
- Witular, R. A. (2014b). 14 November. "Presenting maritime doctrine," *The Jakarta Post*, 14 November 2014, <http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/14/presenting-maritime-doctrine.html> accessed 29 October 2015
- MOFA of Japan. 2006, 28 November. "Japan-Indonesia Joint Statement 'Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future'" (Tokyo: MOFA of Japan, 28 November 2006) <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/joint0611.html> accessed 9 September 2017

Transcript

FGD Transcript on "Hubungan Indonesia-Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara," *The Amaroossa Hotel-Bandung*, August 22, 2011

THE DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN VIETNAM

PERKEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK DI VIETNAM

Mayasuri Presilla

Research Center for Regional Resources – Indonesian Institute of Sciences

Email: *m_presilla@yahoo.com*

Diterima: 22-2-2018

Direvisi: 22-3-2018

Disetujui: 3-4-2018

ABSTRAK

Produk-produk organik saat ini sangat potensial untuk dikembangkan karena semakin besarnya minat konsumen dunia akan produk makanan yang bebas dari penggunaan bahan-bahan kimia, seperti pupuk dan pestisida kimia, sehingga aman untuk dikonsumsi. Permintaan produk-produk organik terutama datang dari negara-negara Eropa Barat, Amerika Utara, serta Asia Timur. Berbagai keuntungan yang bisa didapatkan dari pertanian organik adalah peningkatan kesehatan tubuh, kesehatan ekosistem (tanah, air, hewan, dan tumbuhan), serta peningkatan penghasilan bagi para petani karena harga produk organik yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk pertanian pada umumnya. Semakin besarnya pangsa pasar produk organik di dunia merupakan kesempatan besar bagi para produsen pertanian untuk beralih dari sistem konvensional ke sistem organik. Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bersama dengan tim peneliti PSDR-LIPI lainnya tentang pertanian berkelanjutan di Vietnam pada tahun 2013, dan ditambah dengan berita-berita terkini tentang pertanian organik Vietnam. Hasil penelitian dan penelusuran menunjukkan bahwa kesempatan untuk meraih pasar organik yang besar belum banyak ditangkap oleh negara-negara produsen dan pengeksport hasil pertanian, misalnya Vietnam. Hingga saat ini, pertanian organik di Vietnam belum berkembang pesat, walaupun keberadaannya telah tersebar di beberapa daerah. Lambatnya perkembangan pertanian organik ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya pembangunan pertanian yang masih berorientasi pada masalah kuantitas dan bukan kualitas, belum ada tuntutan yang besar dari pasar domestik untuk masalah keamanan pangan, dan besarnya biaya investasi untuk sebuah pertanian organik.

Kata kunci: *pertanian organik, pasar produk organik, kerangka hukum, investasi besar, dan pertanian*

ABSTRACT

Organic products nowadays are very potential to be developed because of the increasing demand from consumers around the world on healthy food which are free from chemicals, such as found in fertilizers and pesticides. Demand for organic products mainly comes from countries in the western of Europe, northern America, also East Asia. Besides promoting health for human and the environment, organic farming can also increase income for farmers due to the higher price of organic products compared to ordinary agricultural products. The growing market share of organic products in the world is a great opportunity for agricultural producers to shift from conventional to organic agriculture system. This article is written based on the PSDR-LIPI research about sustainable agriculture in Vietnam in 2013, coupled with current news on Vietnam's organic farming today. The research result shows that the opportunity to reach a large organic market has not been caught by the agricultural producer countries, including Vietnam. Until now, organic agriculture in Vietnam has not developed rapidly, although it has spread in some provinces. The slow growth of organic agriculture is a consequence of several things, such as the orientation of agricultural development which emphasize more on quantity and not quality, lack of legal framework, and complicated and high investment costs for developing organic farming.

Keywords: organic farming, organic market, legal framework, high investment, agriculture

INTRODUCTION

Food safety is a global current issue. More and more people concern about product quality and they demand for healthy food. One alternative farming system to produce healthier food is organic farming. Substantively, organic farming is the oldest form of agriculture on earth. The Food and Agriculture Organization (FAO) sees organic farming as “a system that relies on ecosystem management rather than external agricultural inputs”. Thus, it eliminates the use of chemical inputs, such as synthetic fertilizers and pesticides, drugs, genetically modified seed and breeds, preservatives, additives, and irradiation (FAO, undated). Meanwhile, the International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) (cited by Jimenez, 2006, 11) defines organic farming as an agricultural system with environmentally, socially, and economically sound food production.

There are various benefits of organic farming. First, organic farming produces good quality and healthy food. It also promotes ecological harmony and maintains the health of people, soil, plants, and animals by minimizing or even eliminating the use of chemical inputs. Second, organic producers can obtain job security; spend lower initial investment since organic products do not need expensive chemical inputs and they are drought resistance crops; receive high income as organic consumers are willing to pay more for organic products; and get marketing opportunities, as well as knowledge and skill (Chait, 2016). Because of the benefits, the consumer of organic products and global sales of organic food tends to increase every year, from 15.2 billion US Dollars in 1999 to 90 billion US Dollars in 2016 (Statista, 2018a). The demand for organic products mostly comes from people in European and North American continents. The leading organic markets in 2015 are the United States, followed by Germany, France, China, Canada, UK, Italy, Switzerland, Sweden, and Spain (Lernoud and Willer, 2017a: 147).

The large organic market opens wide opportunities for producer countries to produce organic products and get high profits. According to FiBL-IFOAM survey in 2017, there have been around 2.4 million organic producers throughout the world in 2015. Of this number, 35% are

from Asia. This was followed by Africa (30%) and Latin America (19%). The countries with the most organic producers are India, Ethiopia, and Mexico (Lernoud and Willer 2017b: 63). Unfortunately, Vietnam is not on the list of organic producers, even though it is one of the largest agricultural producers in Asia and it has succeeded to manage its agricultural sector in the last two decades, particularly for rice. Currently, this country is the second largest rice exporter in Southeast Asia and the third largest in the world (Statista, 2018). For that reason, this article examines the growth and trend of organic farming in Vietnam.

AGRICULTURAL SCHEMES IN VIETNAM: FROM FOOD SECURITY TO FOOD SAFETY

Historically, there were several transformations in agriculture sector in Vietnam since the reunification between North and South Vietnam in 1975. Those transformations were earmarked to achieve national food security. First transformation occurred right after the reunification happened. During this period, the Government of Vietnam applied a socialist agricultural system based on the previous model of northern collectivization. Top down approach was implemented, allowing agricultural production in the state's hand. Thus, the state controlled and managed the entire process of agricultural production, including the land use crop decision (Dinh, 1993). The implementation of agricultural collectivization program directly conducted under the leadership of the Vietnam Communist Party (VCP) (Nguyen, 2010).

However, the collective system performed poorly, and Vietnam experienced an economic crisis in the early 1980s. Then, the government of Vietnam adopted more flexible approach of agricultural policy (Diglio and Siddivo, 1998: 549), but still under the collective agricultural program. The approach called as Contract/Directive 100 system, issuing in 1981. This is well known as the second transformation. The introduction of this directive raised agricultural output and changed cropping patterns since it allowed collectives to have contract with individuals to produce agricultural output and sell

the surplus in the private market or state agencies. However, over the long run, the system could not be sustained because of many reasons, such as the top-down planning approach of land use and crop choice, government's inability to procure the contracted harvest, and the lack of security of land tenure (Vo cited by Diglio and Siddivo, 1998: 549). As a consequence, agricultural sector performed stagnant.

Between 1976 and 1985 was a period of slow growth and famine since there was a decline in food production as a consequence of collective agricultural policy. Then in 1986, the Government of Vietnam promoted some radical changes by enacting a series of reform which transformed the country from a centrally-planned economy to market economy with its socialist orientation, called as Doi Moi (renovation). Doi Moi era is the time for Vietnam to bring the agricultural sector as the primary strategy to develop its economy. In the late 1980s, Contract 100 system was replaced by Contract 10 System. With this new contract, some changes were taken by the government, such as placing the units of agricultural production on the hand of farming families, applying land tax index, and allowing land use rights of no more than 3 Ha for farmers. As the result, Vietnam was able to reach self-sufficiency in the late 1980s by increasing rice production (Diglio and Siddivo, 1998: 550). In 1990, Vietnam produced 19.2 million ton of rice. This number doubled to 40 million ton in 2010 and grew to 43.4 million ton in 2016. The increase production not only can meet domestic needs, but also world market demand. Vietnam's export volume increased from 1.6 million in 1990 to 6.8 million tons in 2010 and 8 million tons in 2012. 2012 was the first time for Vietnam transcending Thailand's rice export in the world market (FAO, 2017). However, Vietnamese rice export number decreased to around 6.5 million ton in the following years (2013-2015) (GSO, 2017). The development of agricultural sector brought great contribution to the total GDP and it has played important role in the Vietnamese economy over twenty years.

One of the reasons for Vietnam's success in developing its agricultural sector is to rely on the Green Revolution platform, which strongly

supports the use of agrochemical inputs, for example pesticide, to increase productivity (International Trade Center, 2013). Some steps were taken. In 1988, import tariffs were cut, and in 1992 the government issued Decision No. 1237/1992/HDBT to free the market and to set the price for several good and services (World Bank, 2016: 63). All of these regulations provided convenience for the farmers to get agrochemical inputs. Consequently, the use of pesticides among farmers has increased every year. They consider pesticides as an important component to maintain plant from pests and diseases, reduce farmers' time in pest problems compared with conventional methods, keep the products fresh, and maximize their farming productivity. The use of pesticide progressively grew as Vietnam opened its economy to a market-based system in the mid-1980s. In the next decades, pesticide use in Vietnam increased dramatically from 15,000 in 1991 to 76,000 tons in 2007 (Hoi, 2009: 380) and to about 105,000 tons with an expenditure of US\$744 million in 2012 (ILS cited by Hoi, 2016: 1). The total cost of pesticide imports rose 47 percent year on year. In fact, in the first eight months of 2017, Vietnam spent as much US\$ 660 million on pesticides (Tuoi Tre News, 2017).

Pesticides as well as fertilizer indeed provide satisfactory result, yet their incorrect and excessive use may result in great hazards to human health and also the environment. This is what happened in Vietnam due to lack of farmers' knowledge. The overused of agrochemical inputs in Vietnam get hard reactions from consumers throughout the world. This anxiety is responded by the Government of Vietnam by issuing a "Safety Vegetable" or "Rau An Toan" scheme to convince consumers that Vietnamese Vegetables are in high quality and safe to be consumed (APEC, 2008: 40).

Food safety scheme continued to be the government's concern. One famous program launched by the government of Vietnam was the campaign of "no early spray" in 1994. The aim of the campaign was to reduce the excessive use of chemical pesticides, especially during the first 40 days of planting rice seeds. In 1998, the initiative regulation on the scheme had been temporary issued. The Integrated Pest Management (IPM)

and Safe Vegetable Growing Practices are two examples of training courses that had to be followed by provincial and district authorities (I-Light, 2012). Later in 2003, the government issued the Ordinance of Food Safety and Hygiene with the aim of minimizing the residue impact on human health (Hoi, 2009: 381). The ordinance determines that the safety and hygiene of food is under the responsibility of food business operators. The operators also have an obligation to meet standardization in producing safe food. Simultaneously, the government also regulates the use of pesticides in agriculture. Using less pesticide means less toxic to human body and also contribute to environmental protection. This is an approach that promotes by the government to three key agents (producers, operators, and consumers) (Hoi, 2009: 381).

In 2003, the government of Vietnam also launched a new program called as “Three Reductions Three Gains (3R3G)” (Ba Giam Ba Tang) in Can Tho Province, South Vietnam. Three reductions means to reduce the use of three inputs in agricultural production, i.e. seeds, fertilizers, and pesticides. The reason for this program is because during the period 1990-2004, the majority of farmer believed that the use of three inputs in large quantity will bring good impact on the number of crops (Heong et al, 2010). As the consequences, there are the increased uses of seed by 50%, doubled use in fertilizer, and frequently spraying of pesticides (Huan, et. al., 2009). However, in reality, based on the research, the high and excessive use of those inputs gives negative effects. For example, highly fertilized crops can attract insects to produce more eggs, survive better, live longer, and become ecologically more fit (Lu, Huan, NH, LV Thiet, HV Chien, KL Heong, 2005). Meanwhile, the use of pesticides with high dose intensity causes negative impact on the environment and on the yield, both in terms of quality as well on safety. This situation is considered quite dangerous because agricultural products with low level of quality and safety cannot compete maximally in a free market that prioritizes both. Finally, it will reduce profits.

Throughout the years of 2005-2006, more than three million farmers in Vietnam

adopt 3G3R program (Huan, et.al., 2009b). As more and more farmers are adopting 3R3G program, there is certainly the increase of 3R3G adoption land area, for example, in An Giang Province. In this province, there has been a significant increase in land area for adopting 3R3G program, from less than 50,000 ha in 2004 to more than 250,000 ha in 2005. This means that there has been five-fold increase in just over one year. The positive achievements of the 3R3G program is the reduction use as much as 10% for seeds, 7% for fertilizer, and 30% for insecticides. This reduction can provide benefits to farmers, amounting to USD 44 per ha (Heong, et.al., 2010). Therefore, in 2006, the Ministry of Agriculture and Rural Development launched a 3R3G program as a national priority.

One more program contrived by the government is the “1 Must Do 5 Reductions” (1M5R) program. What is meant by “1 Must Do” here is the necessity to use certified seed; while “5 Reductions” includes a reduction in using of a quantity of seeds, fertilizers, pesticides, water, and reduction in post-harvest lost. This program is a continuation of the 3R3G program and it was conducted in 2008. This program is indirectly aimed to answer the demands of Vietnam’s engagement in the World Trade Organization (WTO) in 2007 which requires further improvement of its agricultural products’ quality (World Bank, undated).

However, those agricultural programs could not turn the world’s attention on safety issue of Vietnamese agricultural products. Food safety in Vietnam still leaves a big question among consumers. Vietnam needs to rectify its agricultural system. An alternative that can be chosen is reviving its organic farming since consumers believe that this kind of farming can produce food in a green and clean manner from the field to the table. Besides, organic farming is also well known as environment friendly agricultural system which can promote sustainable agricultural development.

Organic Farming in Vietnam

The past and current development of organic farming in Vietnam is difficult to be traced. Simmons and Scott (2008: 2) recognize

this difficulty; and according to them, the available information of organic agriculture in Vietnam is very limited. References are mostly articles in newspaper or a description about organic farming projects report. There is no statistical data about the numbers of organic farmers as well as the type and numbers of organic produce and its export to overseas. This lack of information brings adversity to discover recent development of organic agriculture in Vietnam.

As revealed by Voan (2006), organic farming in Vietnam already emerged in the mid 1990s. However, until the late 1990s, the initiative to do organic farming was still very low. The organic area was still limited to organic tea, essential oils, and spices plantation. These products were mostly exported to Europe (Simmons and Scott, 2008). Until the late 2000s, the development of organic farming was still slow, but it showed significant progress in the last 2-3 years with the current various products, such as tea, spices, vegetables, rice, honey, and aquaculture (Voan, 2006). Organic agriculture journey ultimately led to the first organic agricultural congress held in Hanoi in May 2012 by The Vietnam Agriculture Association (VOA) (Vietnam Plus, 2012). This first debut simultaneously signifies the recognition of organic farming in Vietnam.

Based on its survey in 2001, the IFOAM in 2006 and 2007 reports that certified organic land in Vietnam was only 6,475 Ha or 0.07% of the total farming land throughout the country (IFOAM cited by Simmons and Scott, 2008: 4). However, in 2012, Vietnam Farmers Union (VFU) claimed that there are 21,000 Ha of organic farming land or 0.2% of the total arable land in the country. This organic farm land is still smaller compared to that of Cambodia and Thailand (Thanhniem news, 2012). As there is a growing demand of organic products globally, organic land area has expanded in Vietnam. From the report of the FiBL and IFOAM in 2013, the certified organic area in Vietnam reached 31,700 Ha and it grew to 77,000 Ha in 2016 (Vietnam Organic Agriculture Association (VOAA) in Vietnam News, 2017).

There have been about 1,022 organic farms spreading across Vietnam until 2013. The

number of organic farming is currently increased along with the development of international market for organic products. There are 33 out of 63 provinces and cities in Vietnam have organic farming models; ranging from organic vegetable, organic mushroom, organic rice, organic fisheries, organic tea and coffee, organic herbs, and other organic projects. Nevertheless, the scales are still small (VOV, 2017). For organic vegetable, the largest growing area is located in Lam Dong Province, the Central Highlands of Vietnam. This province has 43,800 ha of organic vegetable land, spreading in Da Lat City and surrounding districts: Don Duong, Duc Trong, and Lac Duong.

The organic vegetables they produce are not only for domestic markets in HCMC, Hanoi, Nha Trang, and some big cities in south central coast; but also for international markets, such as Taiwan, Singapore, Japan, EU countries, the United States and Australia (Vietnam Chamber of Commerce and Industry, 2013). Another organic vegetable is carried out in Tra Vinh Province, Mekong Delta. The organic project is collaboration between the Vietnamese Heritage Institute and Tra Vinh University (Simmons and Scott, 2008: 20). Farmers in Tra Vinh, Vinh Long, and other cities in Mekong Delta are the target of the project. The collaboration between them was formed in July 2007 with two pilot research programs, which are “evaluating the potential of organic farming as a sustainable and profitable option for farmers” and “introducing a variety of vegetables and mushrooms originating from Western sources into gardens set up for research” (The Vietnamese Heritage Institute, 2012).

For organic rice, the projects are scattered in some provinces, for example in Luong Son District (Hoa Binh Province), Chuong My District (Ha Tay Province), and Tien Giang Province. Luong Son District in Hoa Binh Province is situated near Hanoi. Organic farming in this district was develop in 2008 and it covers nine hectares. The presence of organic farming in this district cannot be separated from the support of the Agriculture Development Denmark Asia (ADDA) and the Vietnam Farmers Union (VFU). Small volumes of organic products

from this district are sold in small local markets (Thanhnie news, 2012). Organic project in Luong Son District is targeted for thousand of rice farmers of Muong ethnic minority. It is financially supported by the Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID), and there are many parties involved in the implementation, i.e AECID, the Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development (ISPARD), and some local authorities. The aim of the project is to increase farmers' income, provide safe farm produce, and satisfy the domestic market's rising demand (Thanhnie news, 2012).

Not much different from Luong Son District, organic rice farming in Chuong My District (Ha Tay Province) is supported by foreign agency. Rice farmers community in this district get fund from the Japanese International Co-operation Agency (JICA) and get training from the University of Tokyo and Hanoi University of Agriculture to adapt a new system of rice farming method, called the System of Rice Intensification (SRI). The project name is "Improving Production and Marketing Capacity Improvement for Sustainable Agriculture, Farmers Empowerment, Rice Improvement, and a Cleaner Environment" (PAMCI-SAFE RICE). The project includes three communes in this district, which are Dong Phu, Dai Nghia, and Dai Hung (Viet Nam News, 2013).

Besides vegetable and rice, other agricultural products are organically practiced in Vietnam. For instance, is organic shrimp farm. The famous organic shrimp is run in Ngoc Hien District, Ca Mau Province in Delta Mekong (Mangrove Action Project, 2009). Meanwhile, organic tea farms can be found in Tay Nguyen Province, Bac Ha province, and Lao Cai Province (Simmons and Scott, 2008: 18-19). The provinces with organic species and essential oil include Yen Bai, Tuyen, Quang, Lang Son, Nghe An, Long An, Bin Phuoc, Lam Dong, and Dac Nong (Simmons and Scott, 2008: 19). There is also organic mushroom, which is performed in Tra Vinh Province (The Vietnamese Heritage Institute, 2012) and Da Nang Province in Central Vietnam (Morison, 2013).

Actors Behind Organic Farming in Vietnam

Although the exact number of organic farmers in Vietnam is not be known for certain, Simmons and Scott (2008: 3) have succeeded to configure three types of organic farmers in Vietnam, namely the traditional organic farmers, the reformed organic farmers, and the certified organic farmers. They allege that each type only consists the small numbers of organic farmers. The first group is called as the traditional organic farmers. Usually, they live in the mountainous areas in the central and north Vietnam. They practice traditional agricultural methods and have never used agrochemical in their agricultural system. Simmons and Scott (2008: 3) claim that the reason for these farmers not to use agrochemical is due to the limited access and the expensive price of agrochemical rather than the environmental concerns.

The second group of organic farmers in Vietnam is the reformed organic farmers. Initially, they used to be agrochemical users on farms, yet they switched to and adopted organic farming practices after receiving ecological farming methods and explication about the negative impact and the dangerous of agrochemicals. The last group is the certified organic farmers or in the process of becoming certified. This group of farmers is usually incorporated in development organizations which train them about organic production methods, whilst private trading companies act as the locomotives (Simmons and Scott, 2008: 3, 14). Amongst the three types of organic farmers in Vietnam, the last group has the highest numbers than others.

The current situation shows that organic farming in Vietnam is collaboration between national organic farming companies and local farmers; or between foreign agencies and private companies or local farmers. A great dependence to foreign agencies is very pronounced due to high investment cost to do organic farming and there is no domestic certification for organic products in Vietnam (Vietnam News, 2017). Several foreign agencies involved are the Agricultural Development Denmark Asia (ADDA), the International Global Change Institute (IGCI), the

Swiss Import Promotion Programme (SIPPO), the Japanese International Co-operation Agency (JICA), the Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID), New Zealand Aid, and the French Organization CIRAD (Centre de International Cooperation pour Agriculture Recherche en Development). ADDA has various organic projects in Vietnam. In the first project, ADDA collaborates with other agencies, both within and outside the country, such as the Hanoi-based nonprofit consultant, the Oxfam International, and the Australian Development Agency AusAid. The collaboration between them emerged as a form of concern upon the failure of Hanoi Organic Project. Together, they helped and worked with the farmers on the outskirts of Hanoi to do a transition into organic production methods and certification process. The project then called as the Thanh Xuan Organic Project. In 2010, it distributes 1,000 kilograms of organic products every week in Hanoi, and it has 300 regular customers (Meat Trade News, 2010). In another project, ADDA collaborates with the Vietnamese Farmers Union (VNFU) to train farmers on organic production techniques and to develop local markets for organic crops. The project run from 2005 to 2007, and it was located in Bac Ninh, Vinh Phuc, and Lao Cai Provinces for vegetables; Tuyen Quang Province for oranges; Bac Giang Province for litchis; and Hai Phong Province for freshwater fish (Simmons and Scott, 2008: 19). Several intended objectives of the project are to develop production and marketing system for organic products and to manage organic certification system (APEC, 2008: 41).

Another foreign agency involved in the development of organic farming in Vietnam is the International Global Change Institute (IGCI). IGCI occupies three projects for developing organic production methods for tea and other crops (International Trade Center, 2013). This institution forms a partnership with the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) and Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF) to train farmers and to develop organic production system (Simmons and Scott, 2008: 18). It also collaborates with a local private company (Ecolink) to develop organic

tea products for local and export market in Thai Nguyen and Lao Cai Provinces. Together, they foster 18 farmers in Thai Nguyen Province and 286 farmers in Lao Cai Province (Simmons and Scott, 2008: 19).

The Swiss Import Promotion Programme (SIPPO), Trading Organic, New Zealand Aid, and Centre de International Cooperation pour Agriculture Recherche en Development (CIRAD) are other foreign agencies engaged in organic development in Vietnam. The product covered by SIPPO is organic prawns. It has assisted prawn growers in Ca Mau Province, Mekong Delta Vietnam, since 1991 to breed certified organic prawns to be exported to Europe (International Trade Center, 2013). Meanwhile, Trading Organic is a private company from the Netherlands. It is a joint venture company with Vinh Phuc Co. They export organic foods, such as cashew, pineapple, mango, and passion fruit to Europe, North America, and Japan (Simmons and Scotts, 2008: 19). Hereinafter is New Zealand Aid. This institution involved in organic tea project in Dong Hy and Khe Mo Districts (80 km northwest of Hanoi) between 2002 and 2005. In carrying the project, it collaborated with Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF). Besides helping local community in those two districts, this institutions also assisted the MARD to develop the National Organic Production Guidelines for organic tea and other crop in Vietnam which was corresponded with the international recognised guidelines (APEC, 2008: 42). Next foreign agency in Vietnam is CIRAD. It is a French organization which also involves in organic farming in Vietnam. With the support from the French Embassy in Vietnam, it started an organic agricultural project in Vietnam and established cooperation with the Fruit and Vegetable Research Institute (APEC, 2008: 46).

Besides organic foreign agencies, another actor plays in organic development in Vietnam is Vietnamese local organic companies. They are carried out by private company or a collaboration with universities, such as (Simmons and Scott, 2008: 18-20) Hanoi Organics, Sapro, Vien Phu Organic Fragrant Rice, Ecolink, Moonflower, Natural-Pro, Organic Garden at the Vietnam Friendship Village, Cao Bang Bitter Tea

Company, Organik Dalat Company, and Nguyen Thanh Chim (a member of The Vietnamese Heritage Institute). Two leading projects were mostly organic vegetables and mushroom cultivations (The Vietnamese Heritage Institute, 2012).

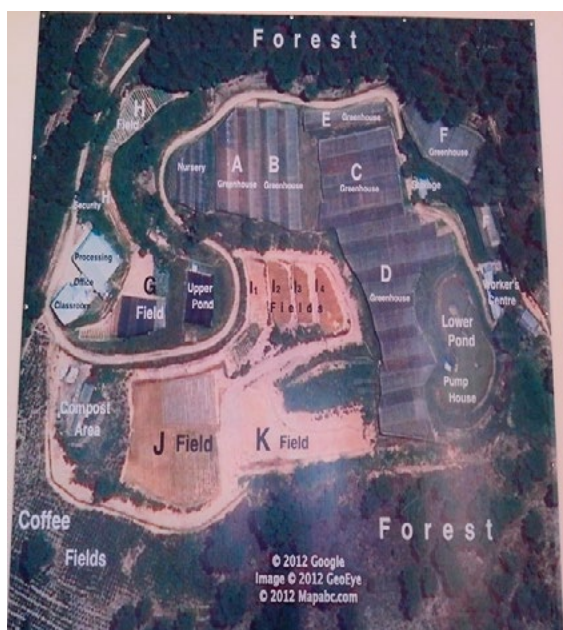
Organik Dalat: A Success Story of Organic Company in Vietnam

Organik Dalat is one of the largest organic farmings in Vietnam. It is located in the outskirts of Da Lat City, Lam Dong Province, the Central Highlands of Vietnam. It belongs to Dr. Nguyen Ba Hung, a doctor graduated from the National Institute of Agriculture in France. He started Organik Dalat in Vietnam in 1997. Initially, his vegetable organic produces were sold to expatriate families in Ho Chi Minh City with a vegetable box scheme (interview with Dr. Hung, 9 May 2013, Da Lat). Furthermore, the company sold to other producers around Da Lat and sent to many five star hotels, restaurants, cruise ships, and catering companies across Vietnam. In order to expand the market, in

Subsequent years, the company managed to get other organic certificates from GAP (Switzerland) and HACCP (Netherlands) (I-Light, 2012). This is a breakthrough step for the company to further enter into European organic vegetable market since certification is the passport to ensure that the organic food from the company is safe to be consumed and it is in conformity with the applicable international organic standards.

The EureGAP certification further spurred Dr. Hung to continue expanding his organic farming by buying 15 ha land in the outskirts of Da Lat city. In selecting the location of the farm, Dr. Hung deliberately chose the isolated place. According to him (interview with Dr. Hung, 9 May 2013, Da Lat), this condition is very important to avoid the pesticide residue contamination from other neighbouring farms. The isolated farm of Organik Dalat Company can be seen in picture 1. From the picture we can see that the Organik Dalat Company farm lies in the middle of forests and coffee fields.

Operating organic farming is clearly not easy. To run the company, Dr. Hung is helped by some agricultural experts and his son, who is also a doctor in agriculture graduated from overseas. He also empowers local communities by employing them as workers in his company. As revealed by Dr. Hung, it needs a lot of works, knowledge, and patient to maintain natural balance. Some technical points that need to get full attention of organic producers are controlling insects and water quality. For insect problem, as much as possible, Dr. Hung conducts his own research to naturally get rid of nasty pests. His basic principle is to maintain the balance of the nature. Therefore, for example, he installs several Greenhouses in six locations (see again picture 1). Almost all of the Greenhouse is equipped by sealed net and double doorsystem, and shaded by clear plastic to prevent insect to enter in. To maintain water quality, he built himself water reservoir and maintained the microbial balance in it. Some examples of organic vegetables from the Organik Dalat Company include lettuce, tomatoes, cauliflowers, cucumber, and carrot (interview with Dr. Hung, 9 May 2013, Da Lat). The Organik Dalat Company has managed its



Source: Photograph taken during the fieldwork

Picture 1. The Map of Organik Dalat Company 2012

2003, he rented land and his company started to export organic lettuce to Taipei. In August 2005, the Organik Dalat obtained the EureGAP certification.

organic farming very well. Now, it has an organic shop in Ho Chi Minh. It sells a diverse organic products, not only from its own company, but also from other companies, even from other countries.

The Future of Organic Development in Vietnam

The increasing demand of organic products from other countries, in a certain sense, may encourage the development of organic agriculture in Vietnam in the future. Two main influence factors for the positive future of the development of organic agriculture in Vietnam are:

1. Assistance from several international organic agricultural institutions, universities, and many agricultural experts. Currently, there are many professors and doctors from the universities in Vietnam involve and become adviser in organic agriculture (Vneconomy, 2010). Their knowledge and opinions will definitely support the development of organic agriculture in Vietnam and will eventually rise the number of Vietnamese organic consumers.

2. Higher price of organic products compared to conventionally grown ones. The price of organic food are 10—40 percent higher than non-organic ones because organic farming needs specific requirements and takes long process.

However, The Vietnamese Minister of Agriculture and Rural Development says that organic farming in Vietnam is still underdeveloped (The Saigon Times, 2018). Vietnam has a lot of homeworks to going organic, which also determine the future of its organic agriculture. Based on various sources, these includes:

1. The lack of suitable organic farmland (I-Light, 2012).

One of the organic agriculture requirements is a farmland or water supply that are free from the chemicals intrusion from other surrounding farms. It needs up to seven years for the soil in the defiled land to recover from the chemical profanation and to be ready to be used as organic farmland. As most of the farmland is

contaminated with chemical residue, it is difficult to find ‘virgin’ land in Vietnam. If there is virgin land, the price will be very expensive. These conditions are surely unfortunate for farmers since they need sustainable income to resume their lives.

2. Complicated and expensive process of organic certification (I-Light, 2012).

This is another major obstacle in developing organic farming in Vietnam. Without certification, organic producers cannot claim and label their product as organic. Actually, in 2006, Vietnam has regulated basic organic standardization. Unfortunately, until now, it has not had its own internal organic certification yet. Consequently, for those who want to undertake organic farming, they have to obtain certification from foreign certifier, such as IMO from Switzerland, ICEA from Italy, and ACT from Thailand (APEC, 2008: 45). The process of external certification takes long time, and most farmers find it too costly. This causes only the rich organic farmers can perform the process. Since alot of products from organic farmers cannot be certified, there are only small volumes of organic products that can be sold in some local markets. This brings difficulty for consumers to get clean organic food (Thanhnien news, 2012).

3. The government’s attention and legal framework

Although Vietnamese organic products have an international promising market, unfortunately, organic farming system in Vietnam has not received considerable attention from the government, and it has grown in “an unplanned manner” (Thanhnien news, 2012). There are no official programs or regulations for supporting organic system since the government still obsessed to meet national food security and the international food demand (I-Light, 2012). This impedes the promotion of organic farming within the country (Thanhnien news, 2012).

No legal framework for organic farming eventually causes further effects, such as no training for organic expert in the field, no aid for organic farmers to create organic offices, or

no extra costs in production system. Therefore, it is clear that the growth of organic farming needs the legal framework to result a planned growth of organic agriculture. Actually, the Government of Vietnam through the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) has collaborated with the Vietnam Farmers Union in practicing some organic agricultural projects. Unfortunately, all is far from the basic need to develop organic farming. The draft of the National Basic Standards for Organic Products has been conceived and enacted by the MARD in December 2006 through the Decision No. 4094/BNN-KHCN on the issued of 10 TCN 602:2006 Organic. This standard follows the IFOAM guideline and ISO 65, which are issued by Codex Alimentarius on organic. However, this standard has not further issued yet into regulations or policies or specific programs (Thanhnie news, 2012). Thus, it does not bring a better condition for organic development in Vietnam. Vietnam still needs real organic policy, such as the infrastructure, the certification and accreditation, the research and development, the training and education, and also the financial support (APEC, 2008: 43, 44).

Until now, there has not been real still specific policies or program to further support organic farming in this country. For instance, there is no a standard for clean production and national organic certification. Although national policies have favored natural conservation, agricultural policies in Vietnam still primarily geared toward raise production capacity for national food security, economic growth, and trade targets. These policies appear to conflict with environmental goals. Protecting natural resources and environment has not been a pillar of agricultural policy, the use of danger synthetic inputs still continues to be practiced, and the practices at provincial level maintains high productivity (World Bank, 2016: 35). The policy and administrative failure makes organic farming is still underdeveloped in Vietnam.

4. The reluctance of farmers

Those three factors above cause reluctance of farmers in Vietnam to go organic. Additionally, there are also two other major reasons for

Vietnamese farmers not to switch to organic farming. First is a transition time. Switching from conventional to organic farming is not easy and requires along time. Many farmers worry that farming without chemical inputs will reduce the produce and finally will cut their profits (Meat Trade News, 2010). Secondly, there is a lot of technical problems. Indeed, the organic production requires a hard working, high investment, and careful method to manage pest, pestilent insect from other conventional fields, water contamination, high-standard land, imbalanced ecosystem, etc (interviewed with Dr. Hung, 9 May 2013, Da Lat; Thanhnie news, 2012; Meat Trade News, 2010). Based on the interview with one student whose parents are farmers, it can be underlined that all of those technical problems and investments become major constraints not only for her parents but also for mostly farmers to divert to organic system since in general they live in poverty (interviewed with a student, 15 May 2013, Ho Chi Minh City).

5. Underdeveloped organic domestic market.

90% of Vietnamese organic products are exported abroad, mainly to European countries and the United States of America (Simmons and Scott, 2008: 4). It is also predicted that in short to medium term, the development of organic agriculture in Vietnam will still be largely determined by export demand (Simmons and Scott, 2008: 9). The condition is inversely proportional to the situation of domestic market. As well as other developing countries, domestic demand for organic products has not been growing rapidly yet. Demand usually comes from expatriates; upper middle class people who live in big cities, such as Hanoi and HCMC; and five stars hotels or restaurants (Simmons and Scott, 2008: 4). Low domestic demand to some extent is influenced by price and knowledge. The price of organic products is more expensive than non-organic ones. This makes many people will think twice for buying organic products. About knowledge, it has to be admitted that a lot of Vietnamese consumers do not understand the meaning of organic (Thanhnie news, 2012). Only farmers, consumers, and people who are concerned know the concept of organic

agriculture (Vneconomy, 2010). Most people are confused about the differences between the terms “safe vegetables” and “organic”. This leads to a distrust (Simmons and Scott, 2008: 9), consequencing on the consumption pattern among the public and the existence of organic products in the country.

CONCLUSION

Presently, organic farming becomes a new trend in agricultural system. A lot of research results indicate that there are many positive aspects that we can earn from organic agriculture since it brings excessive benefits not only to human but also to the environment. Demand for organic food also shows a significant increase, particularly from people in Europe, Northern America, East Asia countries. However, it is unfortunate that the increase demand of organic food does not necessarily bring good development of the system in agricultural countries, such as in Vietnam.

Vietnam is one of the largest agricultural producers in the world and its agricultural development runs very fast. It has several spots of organic farming across the country to anticipate the increase demand of Vietnamese organic products from other countries. Generally, those organic farmings are collaboration projects between international agricultural agencies and national agricultural institutions, universities, or private companies. These verily bring advantages to Vietnam. First, Vietnam can further develop organic farming system. Second, those advantages contribute to sustainably agricultural sector within the country in the future.

However, the development of organic agriculture in Vietnam is not very encouraging and seems to walk very slowly. Even, it is still categorized as the new phenomenon in this country as it has just reached its significant progress in the past 2-3 years. The development of organic agriculture in Vietnam is hampered by several fundamental things. The orientation of national agricultural development which emphasizes more on quantity gives impact on the lack of supported regulations and legal framework to support the existence and development of organic farming. Consequently, it is difficult for

Vietnam to produce good quality and safe food. These are big homeworks to be solved; otherwise it will be very hard for this country to survive in the developing world market.

REFERENCES

- APEC. (2008). Report on Apec Regional Development of Organic Agriculture in Term of APEC Food System and Market Access. APEC Agricultural and Technical Cooperation Working Group.
- Chait. (2016). “Organic Farming Advantages”. (<https://www.thebalance.com/organic-farming-advantages-2538406>, accessed 16 April 2018).
- Diglio, Salvatore and Marisa Siddivo. (1998). “Agricultural Policy and Modernization of Rural Areas in Vietnam”. AION, 58/3-4.
- Dinh, Q. (1993). “Vietnam’s Policy Reforms and Its Future”. *Journal of Contemporary Asia*, No. 23, pp. 532-553.
- FAO. (undated). “Organic Agriculture”. (<http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/en/>, accessed 20 August 2013).
- FAO. (2017). “Crops and Livestock Products”. (<http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP>, accessed 13 April 2018).
- FIBL-IFOAM. (2013a). “Organic Agriculture Worldwide: Key Results from the FiBL-IFOAM Survey on Organic Agriculture Worldwide 2013. Part 1: Global Data and Survey Background”. (www.fibl.org, accessed 20 August 2013).
- FIBL-IFOAM. (2013b). “Organic Agriculture Worldwide: Key Results from the FiBL-IFOAM Survey on Organic Agriculture Worldwide 2013. Part 3: Organic Agriculture in the Regions 2011”. (www.fibl.org, accessed 20 August 2013).
- FIBL-IFOAM. (2017). *The World of Organic Agriculture: Statistics & Emerging Trends 2017*. Bonn: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and IFOAM-Organics International.
- GSO. (2017). “Some Main Goods for Exportation”. (https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=780, accessed 13 April 2018).
- Green Vietnam. (2012). “Farm in Tuyen Quang Province”. (<http://greenvietnam.com/the-project/>, accessed 13 July 2013).
- Heong, K.L., M.M.Escalada, N.H. Huan, H.V. Chien, and P.V. Quynh. (2010). “Scaling out communication to Rural Farmers: Lesson from the “Three Reductions, Three Gains” Campaign in Vietnam”. In *Research to Impact: Case Stud-*

- ies for Natural Resources Management for Irrigated Rice in Asia. F.G. Palis, G.R. Singleton, M.C. Casimero, B. Hardy. The Philippines: International Rice Research Institute. pp. 207-220.
- Hoi, P. Van; Arthur P.J. Mol; and Peter J.M. Oosterveer. (2009). "Market Governance for Safe Food in Developing Countries: the Case of Low-Pesticide Vegetables in Vietnam". *Journal of Environmental Management* Vol. 91, p.380-388; FIBL-AMI-IFOAM, 2013.
- Pham V. Hoi, Arthur P.J. Mol, Peter Oosterveer, Paul J. van den Brink & Pham T.M. Huong (2016). "Pesticide use in Vietnamese vegetable production: a 10-year study". *International Journal of Agricultural Sustainability*, DOI: 10.1080/14735903.2015.1134395.
- Huan, N.H., L.V. Thiet, H.V. Chien, K.L. Heong. (2005). "Farmers' Participatory Evaluation of Reducing Pesticides, Fertilizers, and Seed Rates in Rice Framing in the Mekong Delta, Vietnam". *Crop Protection* 24 (2005), pp. 457-464.
- Huan, et.al. (2009a). "Rapid Adoption of "Three Reductions" in An Giang Province, Vietnam" (<http://devcompage.com/2009/02/28/rapid-adoption-of-three-reductions-in-an-giang-province-vietnam/>, accessed 27 June 2015)
- Huan., et.al. (2009b). "Three Reductions" Chosen one of the Best Practices to Improve the Living Environment". (<http://devcompage.com/tag/three-reductions-three-gains/>, accessed 27 June 2015)
- I-Light. (2012). "Going Organic: What is Holding Vietnam Back?" (<http://futurechallenges.org/searchlight/going-organic-what-is-holding-vietnam-back/>, accessed 21 April 2013).
- International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). (2013). "Principles of Organic Agriculture". (<http://www.ifoam.org/en/organic-landmarks/principles-organic-agriculture>, accessed 21 April 2013).
- International Trade Center. (2013). "Organic Products". (<http://www.intracen.org/exporters/organic-products/country-focus/Country-Profile-Vietnam/>, accessed 13 March 2013).
- Jimenez. (2006). "Organic Agriculture and the Millennium Development Goals". Germany: IFOAM, pp. 1-27.
- Lernoud, Julia, and Helga Willer. (2017a). "The Organic and Fairtrade Market 2015. In *The World of Organic Agriculture: Statistic & Emerging Trends 2017*. FiBL & IFOAM: Organic International.
- Lernoud, Julia, and Helga Willer. (2017b). "Current Statistic on Organic Agriculture Worldwide: Area, Operators, and Market". In Willer, H and Lernoud, J (Eds.). *The World of Organic Agriculture: Statistic & Emerging Trends 2017*. FiBL & IFOAM: Organic International
- Mangrove Action Project. (2009). "More Shrimp Farmers Going Organic-Vietnam". (http://mangroveactionproject.org/news/current_headlines/more-shrimp-farmers-going-organic-vietnam/, accessed 13 July 2013).
- Meat Trade News.. (2010). "Vietnam-Organic Farming". (http://www.meatradenewsdaily.co.uk/news/040510/vietnam__organic_farming_.aspx, accessed 14 March 2013)
- Morison, Amy. (2013). "Organic Farming in Da Nang: Putting Down Sustainable Roots" in *Live Hoi An Magazine*, 19 March 2013. (<http://www.livehoianmagazine.com/index.php/danang/235-organic-farming-in-da-nang.html>, accessed 13 July 2013).
- Nguyen, Hoa and Ulrike Grote. (2004). "Agricultural Policies in Vietnam: Producer Support Estimates, 1986-2002". MITD Discussion Paper No. 79. International Food Policy Research Institute.
- Nguyen, Do Anh Tuan. (2010). "Vietnam's Agrarian Reform, Rural Livelihood, and Policy Issues". Mimeo.
- Statista. (2018a). "Worldwide Sales of Organic Food from 1999 to 2016". (<https://www.statista.com/statistics/273090/worldwide-sales-of-organic-foods-since-1999/>, accessed 13 April 2018).
- Statista. (2018b). "Principal Rice Exporting Countries World Wide in 2017/2018". (<https://www.statista.com/statistics/255947/top-rice-exporting-countries-worldwide-2011/>, accessed 13 April 2018).
- Simmons, Luke and Steffanie Scott. (2008). "Organic Agriculture and 'Safe' Vegetables in Vietnam: Implications for Agro-food System Sustainability". ([http://oacc.info/Docs/Guelph2008SocialSciences/Simmons%20and%20Scott%20\(2008\).pdf](http://oacc.info/Docs/Guelph2008SocialSciences/Simmons%20and%20Scott%20(2008).pdf), accessed 3 May 2013).
- Tachibana, Towa; Trung M. Nguyen; and Keijiro Otsuka. (2001). "Management of State Land and privatization in Vietnam". In Keijiro Otsuka and Frank Place (Eds.). *Land Tenure and Natural Resource Management: A Comparative Study of Agrarian*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Thanhnews. (2012). "Vietnam Suffers Organic Failure". (<http://www.thanhnews.com/index/pages/20120413-vietnam-suffers-organic-failure.aspx>, accessed 10 June 2013).

- The Vietnamese Heritage Institute. (2012). "Organic Vegetable and Mushroom Gardening". (<http://www.thevhi.org/en/index.php?page=organic-vegetable-and-mushroom-gardening>, accessed 10 June 2013).
- The Saigon Times. (2018). "Vietnam Seeks to Develop Sustainable Organic Agriculture". (<http://english.thesaigontimes.vn/57556/Vietnam-seeks-to-develop-sustainable-organic-agriculture.html>, accessed 13 April 2018).
- Tuoi Tre News. (2017). "Vietnam Losing Control of Excessive Pesticide Use". (<https://tuoitrenews.vn/news/society/20170908/vietnam-losing-control-of-excessive-pesticide-use/41491.html>, accessed 14 April 2018).
- U.S Library of Congress. (1987). "Agriculture", (<http://countrystudies.us/vietnam/49.htm>, accessed 10 June 2013).
- Vasavakul, T. (1997). "Vietnam: The Third Way of State Building". *Southeast Asian Affairs*. Singapore. Pp. 337-363.
- Vietnam Chamber of Commerce and Industry Posted. (2013). "Da Lat Vegetables Get 'Passport'". (http://vccinews.com/news_detail.asp?news_id=27792, accessed 26 July 2013).
- Vietnam News. (2013). "Organic Rice Farmers Go Against the Grain". (<http://vietnamnews.vn/society/240194/organic-rice-farmers-go-against-the-grain.html>, accessed 20 August 2013).
- Vietnam News. (2017). "Organic Farming Has Great Potential in Vietnam: Experts". (<http://vietnamnews.vn/economy/420223/organic-farming-has-great-potential-in-vn-experts.html#6G8uv0eSyr6j2dKs.97>, accessed 14 July 2018).
- Vietnam Plus. (2012). "Vietnam Organic Agriculture Makes Debut", (<http://en.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-Organic-Agriculture-makes-debut/20125/26228.vnplus>, accessed 4 February 2013).
- Vneconomy. (2010). "Selling the Idea", (<http://talkvietnam.com/2010/02/selling-the-idea/>, accessed 30 Oktober 2013).
- Voan, Vu Le Y. (2006). "Organic Production in Vietnam". Power point presentation for Forum of International Organic Agriculture in the National Chung Hsing University.
- VOV. (2017). "Organic Farming: Important Part of Vietnam's Agriculture, PM Says". (<http://english.vov.vn/economy/organic-farming-important-part-of-vietnams-agriculture-pm-says-364797.vov>, accessed 14 April 2018).
- World Bank. (undated). "Vietnam's Agriculture: A Strategy Toward WTO". (http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/WBI-Training/viet-strategies2access_bong.pdf, accessed 15 November 2015).
- World Bank. (2016). *Socialist Republic of Vietnam VDR: Agricultural Modernization Transforming Vietnamese Agriculture: Gaining More for Less*. Report No: AUS15856. The USA: The World Bank.
- Interview with: Dr. Nguyen Ba Hung, Da Lat, 9 May 2013.
- Interview with: a student, Ho Chi Minh City, 15 May 2013.

**PERBANDINGAN KETERSEDIAAN UBIN TEKSTUR PEMANDU
UNTUK TUNANETRA DI TEMPAT UMUM ANTARA
KOTA SURAKARTA DAN KOTA NAGOYA**

***THE COMPARISON OF GUIDE TEXTURE TILES FOR BLIND PEOPLE
IN PUBLIC AREAS BETWEEN SURAKARTA AND NAGOYA CITY***

Esdaniar Khoirunisa

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
e-mail: esdaniarkhoirunisa@gmail.com

Dwi Aries Himawanto

Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret
e-mail: dwi_ah@uns.ac.id

Diterima: 15-3-2018

Direvisi: 12-4-2018

Disetujui: 3-6-2018

ABSTRACT

Accessibility is one of the most important components in construction toward the realization of common justice, especially for persons with disabilities and oldster. One of the form of accessibility is a guiding block, or tactile paving, which is designated as a walking guide for the visually impaired. Guiding blocks are paving with a special texture that can be felt by the sole of the foot when walking. This paving was discovered in Japan in 1965, then spread throughout the world. Then finally Indonesia is one of the users of this paving. The purpose of this study was to compare the conditions of guiding block installation between the city of Surakarta and Nagoya City. The results show that guiding blocks are very common in various places in Nagoya City, while in Surakarta there is a contrast condition. Many important public places in Surakarta are not equipped with guiding block. In addition, many guiding block that found in Surakarta are lack of adequate installation of accessibility for the visually impaired.

Keywords: *accessibility, visually impaired, guiding block*

ABSTRAK

Aksesibilitas adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan demi terwujudnya keadilan bersama, terutama bagi para penyandang difabel dan orang tua. Salah satu bentuk aksesibilitas adalah ubin tekstur pemandu, yang diperuntukkan sebagai panduan berjalan bagi tunanetra. Ubin tekstur pemandu adalah ubin dengan tekstur khusus sehingga dapat dirasakan oleh tapak kaki ketika berjalan. Ubin ini ditemukan di Jepang tahun 1965, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Hingga akhirnya Indonesia ditengarai sebagai salah satu negara pengguna ubin ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kondisi ketersediaan ubin tekstur pemandu antara di Kota Surakarta dengan Kota Nagoya. Hasil menunjukkan bahwa ubin tekstur pemandu sangat biasa dijumpai di berbagai tempat di Kota Nagoya. Berbeda dengan di Kota Surakarta, banyak tempat-tempat umum penting yang belum dilengkapi dengan ubin tekstur pemandu. Selain itu, banyak ubin tekstur pemandu yang ditemukan di Surakarta kurang memenuhi kelayakan aksesibilitas bagi tunanetra.

Kata kunci: aksesibilitas, tunanetra, ubin tekstur pemandu

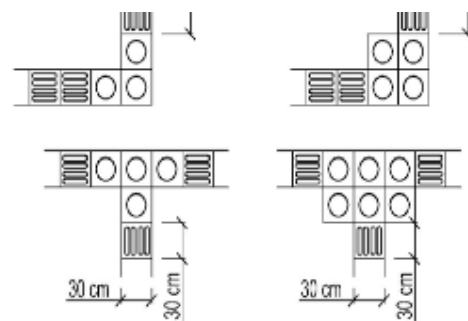
PENDAHULUAN

Aksesibilitas adalah desain sebuah bangunan yang menjamin keamanan dan mudah dijangkau oleh semua orang dan tidak terkecuali, termasuk individu dengan disabilitas (Goldsmith, 2000). Aksesibilitas juga menjadi amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 yang menetapkan keharusan tersedianya aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman digunakan termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Menurut PBB, aksesibilitas seharusnya dapat disediakan oleh semua negara tanpa terkecuali dan tanpa terkendala masalah apapun, karena desain yang universal dapat dikatakan sangat praktis dan mudah dijangkau (World Health Organization, 2013). Salah satu bentuk aksesibilitas adalah adanya guiding block atau ubin tekstur pemandu yang menjadi penunjuk jalan bagi pejalan kaki tunanetra di tempat umum. Keberadaan ubin ini sangat penting bagi tunanetra, karena keterbatasan penglihatan yang mereka alami menyebabkan mereka kesulitan untuk melakukan mobilisasi (Gargiulo, 2012).

Ubin tekstur pemandu pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1965 oleh Seiiki Miyake (Mitani & Aoki, 2012). Ubin tekstur pemandu ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, hingga akhirnya Indonesia ditengarai sebagai salah satu negara pengimpor ubin tekstur pemandu ini (Mizuno, Nishidate, Tokuda, & Arai, 2008). Di Jepang sendiri, ubin tekstur pemandu seperti ini telah menjadi komponen aksesibilitas yang biasa dijumpai di berbagai tempat (Shimizu, 2009). Wujud dari guiding block adalah ubin yang dilengkapi dengan variasi elemen timbul pada permukaannya (Kurniawan, 2003). Ubin ini terdiri dari dua jenis, yaitu ubin pengarah dan ubin peringatan. Ubin pengarah adalah ubin yang memiliki tekstur garis-garis, berfungsi sebagai penanda jalur atau rute suatu jalan. Sedangkan ubin peringatan adalah ubin dengan tekstur bulat-bulat, yang menandakan adanya persimpangan jalan atau penanda ke daerah-daerah berbahaya/beresiko (Mitani & Aoki, 2012; Padzi & Ibrahim, 2012).

Meskipun peraturan menteri pekerjaan umum telah mengatur pemasangan unsur aksesibilitas ubin tekstur pemandu, namun

nampaknya ubin tersebut belum dikenal secara luas di masyarakat. Berdasarkan pencarian literatur terkait ketersediaan guiding block di Indonesia, hanya ada sedikit referensi yang ditemukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Thohari (2014), yang menunjukkan data bahwa dari 125 tempat yang dikategorikan sebagai tempat publik di Kota Malang, tercatat 97% tempat umum tidak dilengkapi dengan guiding block. Itu artinya hanya 3% tempat umum di Kota Malang yang dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas ubin tekstur pemandu. Sementara itu menurut (Mizuno et al., 2008), guiding block di Kota Jakarta hanya dapat ditemukan di areal Jalan Tamrin, yaitu di lokasi yang dekat dengan jalan masuk lapangan parkir, dan di daerah menuju penyeberangan.



Sumber: Permen PU Nomor: 30/PRT/M/2006

Gambar 1. Skema pemasangan ubin pengarah dan ubin peringatan

Meskipun peraturan menteri pekerjaan umum telah mengatur pemasangan unsur aksesibilitas ubin tekstur pemandu, namun nampaknya ubin tersebut belum dikenal secara luas di masyarakat. Berdasarkan pencarian literatur terkait ketersediaan guiding block di Indonesia, hanya ada sedikit referensi yang ditemukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Thohari (2014), yang menunjukkan data bahwa dari 125 tempat yang dikategorikan sebagai tempat publik di Kota Malang, tercatat 97% tempat umum tidak dilengkapi dengan guiding block. Itu artinya hanya 3% tempat umum di Kota Malang yang dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas ubin tekstur pemandu. Sementara itu menurut (Mizuno et al., 2008), guiding block di Kota Jakarta hanya dapat ditemukan di areal Jalan Tamrin, yaitu di lokasi

yang dekat dengan jalan masuk lapangan parkir, dan di daerah menuju penyeberangan.

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas, ternyata secara kuantitatif jumlah ubin tekstur pemandu, dan jumlah penelitian mengenai ubin tekstur pemandu masih sangat sedikit. Kondisi di atas dapat lebih parah seiring dengan banyaknya kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemasangan ubin tekstur pemandu, seiring dengan tidak adanya komunikasi antara Jepang dengan pengimpor ubin (Tukoda et al., 2008) tidak ada komunikasi yang cukup dari pihak Jepang sebagai eksportir ubin tekstur pemandu terhadap para negara importir mengenai metode pemasangan ubin tekstur pemandu yang sesuai. Hal demikian menyebabkan banyak kesalahan pemasangan ubin tekstur pemandu di berbagai negara. Oleh karena itu penelitian mengenai pemasangan ubin tekstur pemandu yang ada di wilayah Indonesia penting dilakukan, untuk melakukan koreksi apakah ubin tekstur pemandu yang ada telah benar-benar mengakomodasi penyandang tunanetra untuk bermobilisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan keberadaan ubin tekstur pemandu yang ada di Surakarta dengan yang ada di Kota Nagoya, dan untuk mengetahui apakah pemasangan ubin tekstur pemandu di Surakarta dapat menjadi fasilitas aksesibilitas yang ideal bagi tunanetra. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan lingkungan demi terpenuhinya hak seluruh warga khususnya penyandang tunanetra.

HASIL PENELITIAN

Pentingnya Aksesibilitas bagi Tunanetra

Tunanetra berasal dari dua kata yaitu tuna yang artinya tidak ada, atau kekurangan dan netra yang artinya mata. Tunanetra mengacu pada sebuah kondisi ketika seseorang tetap tidak dapat melihat dengan baik meskipun dengan koreksi seperti kaca mata. Sehingga gerbang masuknya informasi pada tunanetra adalah melalui perabaan dan pendengaran (Gargiulo, 2012). Tunanetra terbagi menjadi dua kondisi, yaitu blind dan low vision. Blind atau buta adalah tunanetra yang tidak memiliki sisa penglihatan sama sekali. Sedangkan low vision adalah tunanetra yang masih memiliki persepsi penglihatan

meskipun sangat kecil, atau mereka yang hanya dapat membedakan warna yang sangat kontras. Ketunanetraan yang dialami oleh seseorang dapat menjadi hambatan dalam kehidupan sehari-harinya. Gargiulo, (2012) menyatakan bahwa hambatan yang mungkin terjadi pada tunanetra adalah berbagai masalah dalam kehidupan sosial. Contohnya adalah kemampuan untuk melakukan perjalanan secara mandiri atau berpindah tempat yang sangat penting bagi kualitas hidup manusia. Namun hal ini menjadi tantangan terbesar dari seorang tunanetra (Ball & Nicolle, 2015). Kemampuan untuk berjalan secara mandiri sangat diperlukan, terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan dan hidup secara mandiri (National Research Council, 2002).

Untuk mengurangi hambatan di atas, maka berbagai bantuan dibutuhkan oleh tunanetra demi memudahkan kehidupan mereka. Tunanetra memerlukan bantuan berupa petunjuk yang dapat diakses melalui auditori atau pendengaran dan petunjuk melalui perabaan (National Research Council, 2002). Bagi penyandang tunanetra, ada tiga poin yang menjadi tujuan dari ketersediaan aksesibilitas antara lain tersedianya informasi terkait orientasi atau arah yang akurat bagi penggunaannya, terwujudnya lingkungan yang aman untuk melakukan penjelajahan atau mobilitas serta memberikan fasilitas untuk berpartisipasi langsung di ruang publik (Jenkins, Yuen, & Vogtle, 2015). Tanpa adanya bantuan aksesibilitas di tempat umum, tunanetra akan sangat kesulitan untuk berjalan dengan mandiri, sehingga secara tidak langsung mereka akan terpinggirkan dari tempat umum (Siu, 2013a).

Salah satu wujud fisik dari pemenuhan aksesibilitas di atas adalah tanah atau lantai yang dilengkapi dengan tekstur yang mudah diakses melalui perabaan (Jenkins et al., 2015). Berdasarkan poin-poin prinsip aksesibilitas bagi tunanetra yang tertera di atas, maka ubin tekstur pemandu adalah sebuah sarana yang cukup ideal bagi tunanetra.

UBIN TEKSTUR PEMANDU

Ada berbagai istilah yang berbeda untuk menyebut komponen aksesibilitas ini. Perbedaan tersebut tergantung pada penamaan organisasi tertentu maupun badan-badan profesional tertentu

(Siu, 2013b). Istilah-istilah yang biasa digunakan adalah Tactile Ground Surface Indicators atau TGSIs, Tactile Walking Surface Indicators atau TWSI, tactile paving, Tenji Blocks dan guiding block. Sementara itu istilah yang digunakan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan, Gedung, dan Lingkungan, adalah “Jalur Pemandu” dan “Ubin Tekstur Pemandu”.

Ubin tekstur pemandu ini menjadi komponen aksesibilitas yang paling sering dan paling umum digunakan sebagai pemandu tunanetra berjalan di tempat umum (Siu, 2013a, Mitani & Aoki, 2012). Ubin ini digunakan karena si pengguna atau individu dengan gangguan penglihatan/tunanetra tidak memerlukan modifikasi khusus dalam berjalan, sehingga dianggap sebagai panduan yang paling efektif bagi perjalanan tunanetra (Mitani & Aoki, 2012; Mizuno et al., 2008). Artinya untuk dapat mengakses ubin ini sebagai pemandu saat berjalan, mereka hanya perlu tetap berjalan sebagaimana biasanya tanpa banyak melakukan modifikasi cara berjalan sehingga sangat mudah digunakan. Manfaat dari ubin tekstur pemandu bukan hanya ditinjau dari sisi teknis yang dapat membantu tunanetra untuk berjalan dan mengetahui arah. Lebih dari itu, dengan adanya petunjuk ubin tekstur pemandu, maka individu tunanetra akan merasakan kenyamanan, kemandirian, dan kepercayaan diri sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas hidup penyandang tunanetra. (Mitani & Aoki, 2012).

Ada beberapa aspek penilaian dalam menentukan apakah ubin tekstur pemandu sudah memenuhi kelayakan. Menurut Tennoy, Oksenholt, Fearnley, & Matthews (2015), penilaian akan ubin tekstur pemandu dapat meliputi apakah pemasangannya sudah konsisten, dan pemasangannya tidak mengarahkan penggunaannya ke kondisi berbahaya. Dari kedua poin di atas, konsistensi ternyata menjadi nilai yang sangat diutamakan dalam pemasangan ubin tekstur pemandu (Mitani & Aoki, 2012; Tukoda et al., 2008). Konsistensi juga merupakan sebuah hal yang mendasar dalam pemasangan ubin tekstur pemandu, karena hanya dengan konsisten ubin dapat berfungsi secara efektif

bagi tunanetra (Tukoda et al., 2008). Konsistensi dituntut dalam pemasangan ubin karena ubin tekstur pemandu diperuntukkan sebagai bantuan bagi tunanetra dalam melakukan perjalanan, sehingga tanpa pemasangan yang konsisten tunanetra dapat kebingungan untuk memahami petunjuk ubin. Anjuran lain yang juga harus diperhatikan adalah pemilihan warna. Warna menjadi hal penting karena tidak semua tunanetra mengalami kebutaan total. Sebagian tunanetra masih memiliki sisa penglihatan walaupun sangat kecil. Kebutuhan yang seperti ini dikenal sebagai kebutaan sebagian atau low vision. Mereka berjalan dengan mengandalkan kekontrasan warna yang ada pada lingkungan untuk mendapatkan informasi (Sakaguchi, Takasu, & Akiyama, 2000). Dengan adanya ubin yang kontras, mereka yang memiliki sisa sedikit penglihatan akan mendapatkan keuntungan sebuah petunjuk jalan dari kontrasnya warna ubin (Mitani & Aoki, 2012).

Anjuran tentang kekontrasan warna ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 yang menyebutkan bahwa jalur pemandu harus menggunakan warna kuning atau jingga agar dapat dibedakan dengan ubin di sekitarnya. Kekontrasan warna yang dianjurkan adalah warna yang terang di tengah latar yang gelap, bukan berwarna gelap di tengah latar yang terang (Norgate, 2012). Menurut Jenkins et al., (2015) pencahayaan atau kekontrasan warna yang tidak konsisten menjadi salah satu masalah yang paling menyulitkan dalam hal aksesibilitas bagi tunanetra (Mizuno et al., 2008) menengarai adanya kesalahan umum dalam pemasangan guiding block, antara lain tidak adanya ubin peringatan di antara ubin pengarah yang bersimpangan, dan pemasangan ubin yang kurang tepat. Ubin peringatan dan ubin pengarah harus sama-sama digunakan dalam susunan yang harmonis, yaitu sesuai dengan ketentuan bahwa ubin pengarah dipasang sebagai penunjuk jalan, sedangkan ubin peringatan harus dipasang ketika ada persimpangan jalan dan tempat-tempat yang berbahaya.

Tersedianya *guiding block* di hampir setiap penjuru kota memang sulit direalisasikan. Meski demikian, ada jenis tempat di perkotaan yang dinilai sebagai tempat umum yang vital

sehingga harus menyediakan akses yang mudah bagi semua penggunaannya. Menurut Jenkins et al. (2015) tempat-tempat tersebut antara lain serambi stasiun di tepian rel kereta, tepian penyebrangan jalan, jalan-jalan belokan, atau lengkungan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tempat-tempat penting yang wajib menyediakan guiding block antara lain di depan jalur lalu lintas kendaraan, di tempat dengan perbedaan ketinggian lantai, areal transportasi umum dan penumpang, serta pedestrian yang menghubungkan jalan dan bangunan. Selain tempat di atas, taman Kota juga menjadi tempat yang dinilai penting untuk memiliki akses ubin tekstur pemandu, karena taman kota menjadi tempat yang memiliki banyak manfaat bagi warga kota sehingga harus memiliki akses yang mudah bagi seluruh warganya (Siu, 2013a).

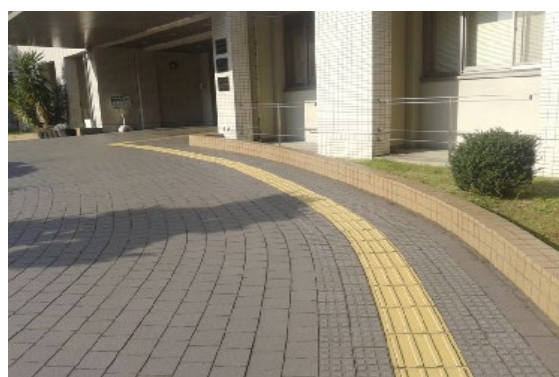
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi komparasi tentang kondisi ubin tekstur pemandu di Kota Nagoya dengan Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi. Data yang terkumpul juga akan dibandingkan dengan peraturan pemerintah terkait dengan ubin tekstur pemandu dan panduan pemasangan ubin tekstur pemandu. Tempat-tempat yang menjadi objek observasi di kedua kota adalah tempat umum yang dinilai penting, dan perlu dilengkapi aksesibilitas bagi tunanetra, seperti taman kota, tempat transportasi umum, trotoar, dan universitas. Jepang dipilih sebagai lokasi penelitian pembandingan karena Indonesia ditengarai sebagai pengimpor ubin tekstur pemandu dari Jepang, sehingga kita perlu mengetahui apakah ubin tekstur pemandu yang dipasang di Indonesia memenuhi fungsi aslinya sebagai salah satu komponen aksesibilitas bagi tunanetra.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kota Nagoya, Jepang, ubin tekstur pemandu telah tersedia di hampir setiap penjuru kota seperti kawasan universitas, trotoar, ruang terbuka, hingga di dalam ruang kantor pelayanan publik. Secara umum, hampir seluruh kondisi guiding block di Kota Nagoya dalam kondisi baik. Guiding block selalu berwarna kuning cerah dan kontras dengan warna di sekitarnya.



Gambar 2. Ubin tekstur pemandu di pinggiran rel kereta



Gambar 3. Ubin tekstur pemandu yang nampak di sekitar gedung universitas



Gambar 4. Ubin tekstur pemandu di dalam salah satu gedung Universitas Nagoya



Gambar 5. Ubin tekstur pemandu di dalam salah satu kantor pelayanan publik di Kota Nagoya



Gambar 6. Ubin tekstur pemandu di taman kota Nagoya

Sementara itu penelitian di Kota Surakarta dilakukan dengan memilih tempat-tempat yang sejenis dengan tempat yang dipilih di Kota Nagoya untuk dibandingkan. Tempat-tempat yang menjadi pilihan di Kota Surakarta antara lain universitas, stasiun kereta, taman kota.



Gambar 7. Bangunan salah satu universitas di Surakarta yang belum dilengkapi ubin tekstur pemandu



Gambar 8. Taman kota di Surakarta tanpa dilengkapi ubin tekstur pemandu



Gambar 9. Daerah tepi rel kereta di Stasiun Balapan, Surakarta



Gambar 10. Nampak bagian depan gedung Universitas Sebelas Maret

Setelah pengamatan dilakukan, ternyata tempat-tempat yang menjadi objek penelitian di kota Surakarta masih belum dilengkapi dengan ubin tekstur pemandu. Hal ini sangat disayangkan karena undang-undang yang terkait dengan kebijakan aksesibilitas belum sepenuhnya diimplementasikan. Meski ubin tekstur pemandu masih belum di-temukan di tempat-tempat di atas, namun ternyata ubin tekstur pemandu masih dapat ditemukan di kawasan pedestrian Kota Surakarta. Meskipun di tempat tersebut tidak ditemukan ubin tekstur pemandu, namun di beberapa tempat lain khususnya di kawasan pedestrian, ubin tekstur pemandu masih dapat dijumpai di kota Surakarta.



Gambar 11. Ubin tekstur pemandu yang digunakan sebagai area parkir kendaraan



Gambar 14. Ubin tekstur pemandu yang tertutupi oleh lapak pedagang



Gambar 12. Ubin tekstur pemandu yang tertutupi oleh lapak pedagang



Gambar 15. Jalur ubin yang sangat menyulitkan tunanetra



Gambar 13. Ubin tertutup oleh kios pedagang



Gambar 16. Ubin yang terlalu dekat dengan tiang dan berpotensi membahayakan tunanetra



Gambar 17. Ubin yang terlalu dekat dengan tiang dan berpotensi membahayakan tunanetra



Gambar 19. Ubin yang mengarahkan pengguna ke tempat berbahaya



Gambar 18. Lintasan ubin pemandu yang justru menyulitkan tunanetra



Gambar 20. Daerah sebelum penyeberangan yang tanpa dilengkapi ubin peringatan

Ubin tekstur pemandu memiliki tujuan sebagai pemandu bagi tunanetra untuk dapat berjalan seccara mandiri dengan rasa aman dan nyaman. Maka sebaiknya ubin tekstur pemandu dipasang seefektif mungkin untuk dapat menolong tunanetra. Namun faktanya banyak ubin tekstur pemandu di Surakarta yang dipasang di lokasi yang kurang nyaman untuk dilintasi. Secara umum masih banyak ubin yang belum memenuhi kelayakan sebagai aksesibilitas bagi tunanetra. Berdasarkan foto-foto ubin tekstur pemandu di atas, tampak bahwa ubin tekstur pemandu selalu terpasang di bagian yang tidak aman, yaitu terlalu menepi, atau berhimpitan dengan halangan dan rintangan seperti tiang listrik, pohon, dan lokasi parkir sepeda motor. Hal ini tentu saja bukan penunjuk jalan yang ideal bagi tunanetra, karena berpotensi membahayakan keamanan mereka.



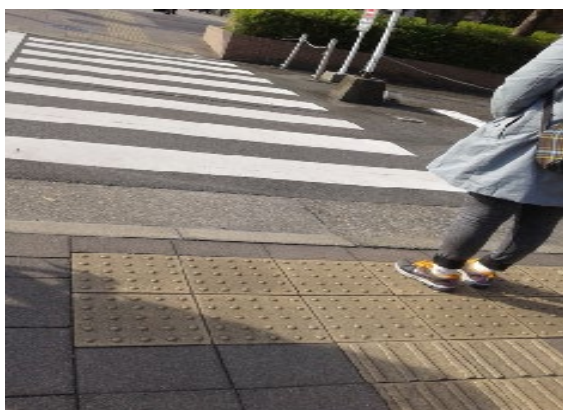
Gambar 21. Ubin yang berujung di daerah yang kurang nyaman untuk dilewati tunanetra

Kelemahan pemasangan ubin tekstur pemandu lainnya juga terlihat dari ujung lintasan ubin tekstur pemandu yang tidak aman. Lintasan

ubin tekstur pemandu seharusnya membantu tunanetra untuk menemukan lintasan jalan yang aman. Akan tetapi lintasan ubin tekstur pemandu justru berujung pada lintasan yang tidak semestinya, yaitu jalan raya yang bukan daerah zebra cross, dan ubin tekstur pemandu yang berhenti di daerah yang tidak nyaman bagi tunanetra. Seperti pada gambar nomor 19, 20 dan 21, memasang ubin yang mengarahkan ke jalan raya yang bukan daerah penyeberangan jalan adalah hal yang tidak perlu, karena hanya akan membahayakan penyandang tunanetra.

Sementara itu ubin tekstur pemandu yang mengarahkan pada penyeberangan jalan seharusnya dilengkapi oleh ubin peringatan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 bahwa ubin peringatan yang bertekstur bulat-bulat timbul harus dipasang ketika adanya perubahan lintasan. Hal ini karena jalan raya dapat menjadi lintasan yang berbahaya bagi tunanetra, sehingga diperlukan peringatan agar tunanetra dapat berhati-hati.

Rekomendasi pemasangan ubin di daerah ini adalah seperti yang terpasang di daerah penyeberangan jalan di Kota Nagoya yang tercantum pada gambar nomor 22.



Gambar 22. Pemasangan ubin peringatan sebelum zebra cross

Ubin peringatan dengan tekstur bulat-bulat harus dipasang sebelum penyeberangan jalan untuk menandakan perubahan lintasan dan peringatan akan zona berbahaya bagi tunanetra. Sementara itu, Beberapa ubin tekstur pemandu bahkan ditemukan dalam kondisi yang sudah

rusak dan kurang terpelihara, sebagaimana yang terlihat pada gambar 26 dan 27.



Gambar 23. Ubin yang permukaannya tidak rata



Gambar 24. Tekstur ubin yang sudah memudar

Meskipun terdapat berbagai kekurangan dalam pemasangan ubin tekstur pemandu di Kota Surakarta, beberapa ubin tekstur pemandu di Surakarta ditengarai memiliki susunan dan komposisi yang mendekati baik. Kondisi seperti ini perlu ditingkatkan lagi.



Gambar 25. Ubin tekstur pemandu di halte bus



Gambar 26. Ubin tekstur pemandu di halte bus



Gambar 27. Ubin tekstur pemandu di Jl. Slamet Riyadi



Gambar 28. Ubin tekstur pemandu yang cukup terpelihara

Ubin tekstur pemandu di atas dikatakan dalam kondisi baik karena ubin tersebut dapat difungsikan penuh, tanpa terganggu oleh halangan apapun yang dapat menyulitkan

tunanetra. Selain itu beberapa lokasi juga menunjukkan warna yang masih kon-tras, yaitu kuning terang yang kontras de-ngan jalanan sekitar yang berwarna gelap se-perti yang terlihat pada gambar 31. Kesimpulan dari perbandingan kondisi ubin di kedua kota tersebut dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan ubin tekstur pemandu Kota Nagoya dengan Surakarta

Aspek	Nagoya	Surakarta
Kepatuhan aturan	Sesuai dengan panduan pemasangan ubin tekstur pemandu.	Tidak sesuai dengan panduan dan undang-undang yang berlaku
Ketersediaan Ubin tekstur pemandu	Terdapat ubin tekstur pemandu di tempat-tempat vital.	Tidak ditemukan ubin tekstur pemandu di tempat-tempat vital
Warna ubin tekstur pemandu	Ubin berwarna kuning, cerah dan kontras.	Warna ubin banyak yang kusam, memudar dan tidak kontras.
Kesadaran masyarakat	Tinggi, tidak terlihat adanya ubin tekstur pemandu yang terganggu oleh objek lain.	Rendah, adanya bentrokan antara fasilitas aksesibilitas dengan kebutuhan tempat berdagang dan area parkir.
Kematangan konsep pemasangan	Terkonsep dan terencana dengan baik.	Kurangnya perencanaan sehingga banyak terdapat kekurangan.

PENUTUP

Kondisi ketersediaan ubin tekstur pemandu yang ada di Surakarta masih jauh dengan ubin tekstur pemandu yang ada di Kota Nagoya. Kekurangan-kekurangan mengenai ketersediaan ubin tekstur pemandu yang ada di Surakarta diantaranya adalah tidak adanya ubin tekstur pemandu di tempat-tempat umum yang vital, pemasangan ubin yang salah, dan perawatan ubin yang tidak berkelanjutan sehingga ubin tekstur pemandu kehilangan kekontrasan warna, mengalami kerusakan, dan tertutupi oleh benda-benda yang sengaja diletakkan di atasnya.

Masyarakat juga belum sepenuhnya menganggap bahwa ubin tekstur pemandu ini penting, sehingga pemeliharaan ubin tekstur pemandu di seluruh wilayah Kota Surakarta masih belum memungkinkan. Untuk memaksimalkan penggunaan ubin tekstur pemandu dalam penolong tunanetra untuk berjalan mandiri, perlu diadakan survei terkait penyebaran individu tunanetra di Surakarta dan mobilisasi yang mereka lakukan. Sehingga ke depan diharapkan pemasangan ubin tekstur

pemandu dapat dikonsentrasikan pada wilayah dengan penduduk tunanetra terbanyak, seperti wilayah sekitar sekolah luar biasa tunanetra, asrama tunanetra, dan wilayah sekitar balai rehabilitasi tunanetra. Jika hal ini dilakukan, pemasangan ubin yang mungkin masih dianggap sia-sia bisa diminimalisir.

Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 mengenai penyediaan fasilitas aksesibilitas di gedung dan lingkungan perlu diawasi dengan ketat dan melibatkan interdisipliner sehingga perancangan dan pemasangan ubin tekstur pemandu bagi tunanetra dapat dilakukan dengan matang. Pelibatan berbagai ahli dari berbagai bidang sangat penting, karena penyediaan fasilitas aksesibilitas adalah demi mendapatkan solusi yang dirasakan oleh semua kalangan.

PUSTAKA ACUAN

- Ball, E. M., & Nicolle, C. A. (2015). Changing What it Means to Be “Normal”: A Grounded Theory Study of the Mobility Choices of People Who Are Blind or Have Low Vision. *Journal of Visual Impairment & Blindness*, 109(April), 291.
- Gargiulo, R. M. (2012). *Special Education in Contemporary Society: An Introduction to Exceptionality* (4th ed.). Los Angeles: SAGE Publications, Inc.,.
- Goldsmith, S. (2000). *Universal Design*. Oxford: Architectural Press.
- Jenkins, G. R., Yuen, H. K., & Vogtle, L. K. (2015). Experience of Multisensory Environments in Public Space among People with Visual Impairment. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 12, 8644–8657. <https://doi.org/10.3390/ijerph120808644>
- Kurniawan, H. (2003). Implementasi Aksesibilitas Pada Gedung Baru Perpustakaan UGM, 44–51.
- Layton, N. A., & Steel, E. J. (2015). “An Environment Built to Include Rather than Exclude Me”: Creating Inclusive Environments for Human Well-Being, 11146–11162. <https://doi.org/10.3390/ijerph120911146>
- Mitani, S., & Aoki, H. (2012). Tactile walking surface indicators, (July-Agustus), 28–31.
- Mizuno, T., Nishidate, A., Tokuda, K., & Arai, K. (2008). Installation Errors and Corrections in Tactile Ground Surface Indicators in Europe, America, Oceania and Asia. *IATSS Research*, 32(2), 68–80. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0386-1112\(14\)60210-7](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0386-1112(14)60210-7)
- National Research Council. (2002). *Visual Impairments : Determining Eligibility For Social Security Benefits*. (P. Lennie & S. B. Van Hemel, Eds.). Division of Behavioral and Social Sciences and Education.
- Norgate, S. H. (2012). Accessibility of urban spaces for visually impaired pedestrians, 165(2002).
- Padzi, F. A., & Ibrahim, F. (2012). Accessibility of Visually Impaired Passengers at Urban Railway Stations in the Klang Valley. *Journal of Engineering, Management & Applied Science & Technologies.*, 3(3), 277–292.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (2002). Indonesia.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. (2006). Jakarta, Indonesia.
- Sakaguchi, R., Takasu, S., & Akiyama, T. (2000). Study Concerning The Colors of Tactile Blocks for The Visually Handicapped: Visibility For The Visually Handicapped and Scenic Congruence for Those with Ordinary Sight and Vision. In *JPEA WORLD CONGRESS* (pp. 453–462).
- Shimizu, Mi. (2009). A Survey of Daily Trips of Persons Who Are Visually Impaired Living in Communities in Japa. *Journal of Visual Impairment & Blindness*, 103(11), 766–772.
- Siu, K. W. M. (2013a). Accessible park environments and facilities for the visually impaired. *Facilities*, 31(13/14), 590–609. <https://doi.org/10.1108/f-10-2011-0079>

Siu, K. W. M. (2013b). Design standard for inclusion : tactile ground surface indicators in China, 31(7/8), 314–327. <https://doi.org/10.1108/02632771311317466>

Tennoy, A., Oksenholt, K. V., Fearnley, N., & Matthews, B. (2015). Standards for usable and safe environments for sight impaired, 168(ME1), 24–31.

Thohari, S. (2014). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1), 27–37.

Tukoda, K., Mizuno, T., Nishidate, A., Arai, K., & Aoyagi, M. (2008). *Guidebook for the Proper Installation of Tactile Ground Surface Indicators (Braille Blocks): Common Installation Errors*. Tokyo: International Association of Traffic and Safety Sciences.

World Health Organization. *World report on disability*, 2 (2013).

RISIKO NUKLIR DAN RESPON PUBLIK TERHADAP BENCANA NUKLIR FUKUSHIMA DI JEPANG¹

NUCLEAR RISK AND PUBLIC RESPONSE TO FUKUSHIMA NUCLEAR DISASTERS IN JAPAN

Upik Sarjiati

Pusat Penelitian Sumberdaya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2SDR-LIPI)

E-mail: upik.sarjiati@gmail.com

Diterima: 11-2-2018

Direvisi: 31-3-2018

Disetujui: 29-4-2018

ABSTRACT

In the post-Fukushima nuclear disaster, the use of nuclear as safe, cheap and reliable energy resources is contested. Some actors are considered that nuclear energy is danger for human and environment for long term period. On the other hand, other actors are believed that nuclear is still important energy resources for Japan's economic development. Risk arises as consequences of science and technology development. Some studies explained Fukushima nuclear disaster focusing on disaster management, energy politics, and technical aspect. Different to previous studies, this article aims to analyze contestation of knowledge in risk nuclear construction in the post-Fukushima nuclear disaster. Risk is not only real, but also constructed by various institution and actors such as government, academicians, bureaucrats, scientists, and Tokyo Electric Power Company (TEPCO) as nuclear reactor operator. Contestation of knowledge in nuclear risk construction comprises spreading and impact of nuclear radiation, the food safety standard, and a victim categorization that determine the parties entitled compensation. Contestation of knowledge and construction of nuclear risk urge new uncertainty in modern society. Thus, public take strategies cope with the new uncertainty by carrying out anti-nuclear movement and citizen science.

Keywords: *risk society, nuclear, Fukushima, Japan*

ABSTRAK

Pascabencana nuklir Fukushima, pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi yang aman, murah dan dapat diandalkan kembali diperdebatkan. Berbagai pihak menilai energi nuklir dapat membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan dalam jangka panjang. Di sisi lain, beberapa pihak berpendapat bahwa nuklir masih menjadi sumber energi yang penting bagi pembangunan ekonomi Jepang. Risiko nuklir merupakan salah satu bentuk risiko yang timbul sebagai konsekuensi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa penelitian telah membahas bencana nuklir dari sudut pandang manajemen bencana, politik energi, dan teknik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini menggunakan pendekatan risk society untuk mengkaji kontestasi pengetahuan dalam konstruksi risiko nuklir pasca bencana nuklir Fukushima yang melibatkan pemerintah, akademisi, media, birokrat, ilmuwan, dan Tokyo Electric Power Company (TEPCO) sebagai operator reaktor nuklir. Kontestasi pengetahuan dalam konstruksi risiko nuklir mencakup penyebaran dan dampak radiasi nuklir, standar keamanan pangan, dan kategorisasi korban bencana nuklir untuk menentukan pihak yang berhak mendapatkan kompensasi. Kontestasi pengetahuan dan konstruksi risiko nuklir menyebabkan suatu ketidakpastian baru dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, publik melakukan strategi untuk menghadapi risiko nuklir dan ketidakpastian dengan melakukan gerakan anti-nuklir dan citizen science.

¹ Artikel ini adalah bagian dari laporan penelitian "Bencana, Risiko dan Modernitas di Jepang" yang didanai oleh DIPA Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Penelitian ini dilakukan di Jepang pada tahun 2013.

Kata kunci: masyarakat berisiko, nuklir, Fukushima, Jepang

PENDAHULUAN

Pada tanggal 3 Maret 2011 gempa berkekuatan 8,9 skala richter mengguncang wilayah selatan pantai Jepang yang diikuti diikuti oleh terjadinya tsunami. Gempa dan tsunami memicu terjadinya kecelakaan reaktor nuklir Fukushima. Terjadinya bencana alam dan bencana teknologi secara bersamaan yang dikenal dengan bencana 3/11 merupakan bencana terbesar dalam sejarah Jepang. Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki manajemen bencana yang handal dan menjadi salah satu model pengelolaan bencana di dunia. Namun, Pemerintah Jepang tidak siap dalam menghadapi terjadinya bencana 3/11. Ketidaksiapan Pemerintah Jepang dalam menghadapi bencana 3/11 terlihat dari kurang adanya koordinasinya antar lembaga pemerintah dan perusahaan operator reaktor nuklir dalam menangani bencana nuklir Fukushima. Selain itu, Pemerintah Jepang mengalami kesulitan dalam memprediksi dampak kecelakaan reaktor nuklir yang ditimbulkan.

Radiasi nuklir bersifat tidak dapat dirasakan oleh panca indera, dan manusia pada tingkat tertentu dapat berdampak panjang, lintas generasi, dan lintas geografi sehingga dapat membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan. Karakteristik tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apakah mereka terpapar radiasi atau tidak sehingga hal tersebut menyebabkan ketakutan dan kepanikan masyarakat pascabencana nuklir Fukushima. Selain itu, berbagai macam informasi terkait penyebab, cakupan dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana nuklir Fukushima disampaikan oleh berbagai pihak seperti politisi LDP, birokrat, akademisi, ilmuwan, TEPCO, media massa, lembaga nonpemerintah, aktivis, dan masyarakat biasa. Kesimpangsiuran informasi memperburuk situasi pasca bencana nuklir Fukushima.

Sebelum bencana nuklir Fukushima terjadi, energi nuklir dianggap sebagai energi yang aman, bersih dan dapat diandalkan. Namun, bencana nuklir Fukushima mengungkapkan fakta lain tentang bahaya energi nuklir. Kasus bencana nuklir Fukushima dapat memberikan pemahaman

terhadap konsep risiko. Pendekatan realis memahami risiko sebagai sebuah peristiwa nyata atau bahaya yang dilihat secara objektif tanpa melihat faktor sosial yang berpengaruh (Zinn, 2008, 5). Di sisi lain, pendekatan governmentality yang dipengaruhi oleh argumen Foucault tentang pengetahuan dan kuasa memahami risiko sebagai hasil konstruksi sosial berbagai aktor tanpa melihat risiko sebagai hal yang riil. Selain itu, pendekatan governmentality melihat risiko sebagai teknologi atau cara tertentu untuk mengatasi suatu masalah yang diimajinasikan melalui teknik statistik penghitungan probabilitas (O'Malley, 1993, 57; Zinn, 2008, 7). Berbeda dengan kedua pendekatan di atas, artikel ini akan menjelaskan risiko nuklir dengan menggunakan pendekatan risk society atau masyarakat berisiko yang dikembangkan oleh Ulrich Beck. Risiko menurut Beck (1999) adalah suatu hal yang riil atau nyata sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, risiko dipahami sebagai hasil konstruksi sosial oleh berbagai aktor dengan pengetahuan yang dimiliki (Sarjiati, 2014; Sarjiati, 2015). Dalam kasus bencana nuklir Fukushima, bagaimana risiko radiasi nuklir dibentuk, dan bagaimana pula publik merespon risiko tersebut?

Dengan menggunakan konsep risk society, artikel ini mengkaji perdebatan pengetahuan dalam mendefinisikan risiko radiasi nuklir pasca bencana nuklir Fukushima yang melibatkan berbagai aktor seperti Tokyo Electric Power Company (TEPCO), Pemerintah Jepang, NGO, ahli nuklir, dan masyarakat umum. Selain itu, artikel ini menjelaskan hal-hal yang diperdebatkan seperti penyebaran dan dampak radiasi nuklir terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta kategorisasi korban bencana nuklir yang berhak mendapatkan kompensasi. Bagian akhir artikel ini menjelaskan respons publik terhadap risiko nuklir dan ketidakpastian yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian konstruksi risiko nuklir pasca bencana nuklir Fukushima ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber antara lain internet, buku, laporan pemerintah, dan jurnal terkait dengan

bencana nuklir Fukushima. Data sekunder dari berbagai sumber digunakan untuk menganalisis permasalahan konstruksi risiko nuklir. Penelitian lapangan dilakukan di Tokyo selama dua minggu pada bulan September 2013, dan dua minggu pada bulan Oktober 2014. Penelitian lapangan dengan waktu yang terbatas digunakan untuk melakukan wawancara mendalam dengan aktor-aktor yang terlibat dalam perdebatan tentang risiko nuklir seperti akademisi, NGO yakni Citizen Nuclear Information Center (CNIC), orang tua, dan mahasiswa. Wawancara mendalam dilakukan untuk melengkapi data dan informasi yang telah dimiliki oleh penulis melalui studi pustaka.

PEMBAHASAN

Jepang dalam Masyarakat Berisiko

Studi ini dilakukan dengan mengembangkan konsep *risk society* atau masyarakat berisiko yang dikemukakan oleh Ulrich Beck. Konsep *risk society* yang dikemukakan oleh Beck dalam bukunya yang berjudul *Risk Society: Toward New Modernity* diterbitkan pertama kali di Jerman pada tahun 1986. Buku tersebut terbit sesaat setelah bencana nuklir Chernobyl terjadi sehingga pemikiran Beck mempengaruhi perdebatan tentang risiko sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Argumen utama dari *risk society* yakni peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat modern diiringi oleh munculnya risiko baru (Beck 1992, 19). Beck memahami risiko sebagai kemungkinan terjadinya kerusakan atau bencana akibat dari proses teknologi, politik, sosial, komunikasi, dan proses lainnya. Risiko tidak hanya dianggap suatu hal yang riil seperti ancaman radiasi nuklir, polusi udara, makanan yang berasal dari rekayasa genetika, dan pupuk kimia, namun risiko dipahami juga sebagai sebuah konstruksi sosial oleh insitusi-institusi sosial. Konstruksi risiko merupakan sebuah proses politis yang akan mempengaruhi kebijakan dan tindakan yang diambil oleh berbagai aktor (ilmuwan, pengusaha, NGO, media massa, dan ahli hukum) seperti penetapan pihak yang bertanggungjawab jika terjadi kecelakaan, penetapan pihak yang dianggap sebagai korban, pengajuan klaim kompensasi, dan pemilihan

risiko tertentu. Oleh karena itu, pengetahuan berperan penting dalam mengenali sebuah risiko sekaligus mendefinisikan risiko.

Menurut Foucault pengetahuan dan kekuasaan saling berkaitan di mana pengetahuan dapat digunakan untuk menjalankan kekuasaan (Rouse, 2005). Foucault melihat kekuasaan bukan sebagai kelompok institusi dan mekanisme yang menyebabkan orang tunduk terhadap negara melalui hukum dan peraturan atau sebuah dominasi satu pihak ke pihak lain, namun kekuasaan muncul dalam setiap interaksi sosial bahkan dalam hubungan yang paling intim dan sejajar (Lynch, 2011, 19). Pengetahuan yang diproduksi oleh kekuasaan tidak mengandung kebenaran abadi tetapi kebenaran yang dikonstruksikan yang bertujuan untuk mempengaruhi publik melalui berbagai strategi. Oleh karena itu, kontestasi pengetahuan berbagai aktor terjadi dalam upaya mengkonstruksikan sebuah risiko untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Beck (1992) menjelaskan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu aspek yang memengaruhi konstruksi sebuah risiko. Dalam rangka meningkatkan produktivitas, seorang aktor akan memprediksi, mengembangkan, menguji dan menggali kemungkinan manfaat ekonomi dari suatu proses produksi, namun sering mengabaikan risiko yang ada. Oleh karena itu, secara sistematis tercipta sebuah situasi *economic blinded to risk* atau risiko yang dibutakan oleh aspek ekonomi. Meskipun secara riil risiko itu ada, namun ada upaya untuk menutupi risiko sehingga risiko tersebut tidak terlihat. Kecenderungan mengabaikan risiko yang dianggap kecil justru akan memperbesar risiko yang mengancam pada masa yang akan datang. *Intangible threat* (ancaman yang tidak terlihat) dapat dirasakan langsung apabila terjadi sebuah kecelakaan atau bencana. Dengan kata lain, pengalaman menjadi faktor penting untuk mengetahui adanya sebuah risiko.

Kecelakaan atau bencana akan membantu terungkapnya *intangible threat* atau ancaman yang tersembunyi sehingga dapat memunculkan pengetahuan dan kesadaran baru terkait suatu ancaman atau risiko. Kesadaran risiko yang dialami oleh pihak yang terkena dampak

bencana sering diekspresikan dalam gerakan lingkungan dan kritik terhadap industri (Beck, 1992, 72). Hubungan pengetahuan dan gerakan sosial dapat terjadi dikarenakan tiga hal, yakni perdebatan klaim ilmiah, usaha mendapatkan dukungan dari ilmuwan untuk membenarkan sikap politik yang diambil, penolakan terhadap metodologi dan klaim yang dipakai oleh ilmuwan (Epstein, 1996). Selain itu, Beck melihat proses individualisasi dalam masyarakat berisiko di mana setiap individu merespon bencana dengan pengetahuan yang mereka miliki.

RISIKO RADIASI NUKLIR DAN PERDEBATANNYA

Bencana nuklir Fukushima mengandung sebuah ketidakpastian sehingga muncul pertentangan dan kompleksitas dalam mendefinisikan risiko nuklir. Di satu sisi, segala keputusan mengenai risiko dan hazards radiasi nuklir terkait dengan produksi pengetahuan yang mencakup syarat, hipotesis, metode, prosedur, dan acceptable value. Di sisi lain, keputusan tersebut sekaligus terkait dengan penetapan orang yang terkena dampak (korban), jenis dan cakupan bahaya, elemen yang mengancam, potensi dampak yang ditimbulkan dalam jangka panjang, metode pengukuran yang harus dilakukan, pihak yang bertanggungjawab, dan klaim untuk kompensasi (Beck, 1992, 54). Dengan pengetahuan yang dimiliki, berbagai kelompok mencoba mendefinisikan risiko radiasi nuklir sebagai upaya mempengaruhi kebijakan dalam penanganan krisis nuklir. Bagian ini akan menjelaskan perdebatan berbagai aktor tentang risiko radiasi pascabencana nuklir Fukushima yang mencakup penyebaran radiasi nuklir, dampak radiasi nuklir terhadap keamanan pangan dan kesehatan, dan penetapan pihak yang dapat dikelompokkan sebagai korban bencana nuklir yang berhak mendapatkan kompensasi.

Paparan Radiasi Nuklir dan Penyebarannya

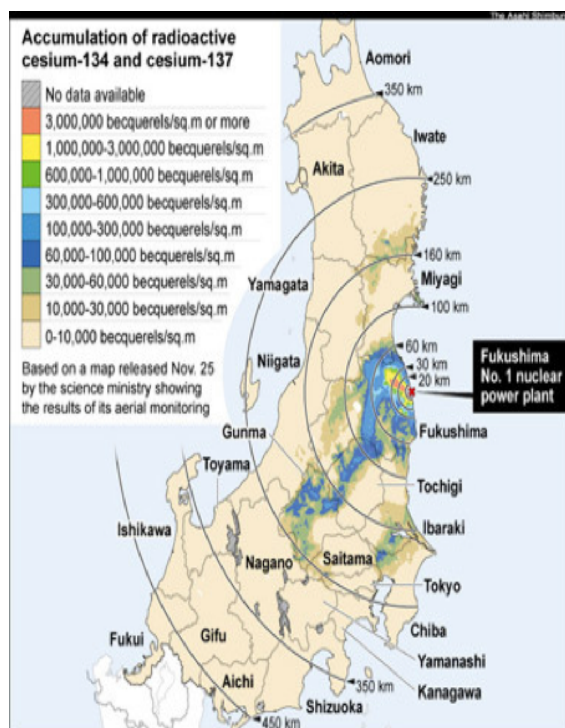
Bencana gempa dan tsunami yang diikuti oleh terjadinya kecelakaan nuklir Fukushima menempatkan masyarakat dalam kondisi ketidakpastian. Hal tersebut dipicu oleh tidak

transparannya informasi yang diberikan oleh pemerintah dan TEPCO atas dampak radiasi yang ditimbulkan oleh kecelakaan nuklir. Selain itu, universitas, media massa, organisasi lokal dan organisasi internasional menyampaikan informasi yang berbeda-beda mengenai tingkat dan dampak radiasi nuklir. Salah satunya adalah informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Yukio Edano pada tanggal 15 Maret 2011 atau sehari setelah reaktor nuklir tiga Daichi Fukushima meledak. Edano mengumumkan bahwa tingkat radiasi nuklir mencapai 400 mSv per jam. Namun, informasi tersebut tidak menjelaskan secara detil tentang dampak terhadap tubuh manusia sehingga menimbulkan kepanikan masyarakat (Hiroshige 2011, 59).

Fukushima Prefecture merupakan daerah terparah yang terpapar radiasi nuklir. Kota Okuma, Futaba, Tamioka, dan Namie menjadi daerah terlarang karena tingkat kontaminasinya sangat tinggi, yakni 1000 kBq/m² hingga lebih dari 3000 kBq/m². Paparan radiasi dengan tingkat yang tinggi di Fukushima Prefecture menyebabkan penduduk lokal mengungsi ke beberapa daerah. Hingga tanggal 29 Agustus 2011 jumlah pengungsi dari 12 daerah di Fukushima Prefecture mencapai 146.520 orang. Pencemaran zat radioaktif yang dilepaskan oleh reaktor nuklir Fukushima dapat melalui udara, air hujan yang mengandung partikel zat radioaktif, dan air laut. Oleh karena itu, zat radioaktif tidak hanya mencemari Fukushima Prefecture saja, namun juga beberapa daerah di Jepang. Bahkan zat radioaktif berhasil dideteksi di beberapa negara seperti Filipina dan Amerika.

Hasil survei yang dirilis oleh Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) pada tanggal 25 November 2011 menunjukkan pencemaran tertinggi zat radioaktif cesium 134 dan cesium 137 ditemukan di Hitachinaka, Ibaraki Prefecture pada level 40.801 Bq/m². Selain itu, kandungan zat radioaktif sebesar 22.570 Bq/m² ditemukan di Yamagata Prefecture, dan 17.354 Bq/m² di Shinjuku ward Tokyo, dan beberapa di daerah lain di Uto Kumamoto Prefecture, Osaka, Chugoku, Kyushu, Nagano, Chiba, Gunma, Nigata dan Tochigi. Air hujan yang membawa partikel zat radioaktif menjadi salah satu media

penyebaran radioaktif yang dilepaskan oleh reaktor nuklir Fukushima (Ishizuka, 2011).



Sumber: Ishizuka 2011

Gambar 1. Peta penyebaran zat radioaktif di Jepang

Sebelum bencana nuklir Fukushima terjadi, ahli nuklir dari Universitas Kyoto, Koide Hiroaki, telah mengungkapkan bahaya energi nuklir. Argumentasi Koide dituangkan dalam bukunya yang berjudul *“Going Beyond the Realities of Radioactive Contamination”* yang ditulis pada tahun 1992, dan *“Genpatsu no uso” (the Lies of nuclear Power)* yang ditulis pascabencana Fukushima (Harlan 2011, Hiroaki, 2011). Koide menjadi salah satu ahli nuklir yang memberikan penjelasan mengenai bencana nuklir sekaligus memberikan kritikan kepada pemerintah dan TEPCO. Koide berpendapat bahwa ledakan reaktor Fukushima no 4 menyebabkan kontaminasi cesium 137 mencapai 14.000 kali lebih besar dari kontaminasi yang disebabkan oleh bom atom Hiroshima (Reuters, 2013). Di sisi lain, TEPCO memberikan pernyataan yang tidak konsisten terkait dengan tingkat keparahan kecelakaan nuklir. Pada awalnya, TEPCO menyatakan tingkat keparahan kecelakaan nuklir Fukushima

berada pada tingkat 4, kemudian berubah menjadi tingkat 5 dan 7 (skala 1-7 berdasarkan standar internasional). Koide melihat hal tersebut sebagai upaya TEPCO untuk menutupi informasi yang sebenarnya dan untuk mengurangi kepanikan masyarakat. Namun, apa yang dilakukan oleh TEPCO justru memperlambat penanganan krisis yang terjadi (Hiroaki, 2011).

Citizen Nuclear Information Center (CNIC) yang berdiri pada tahun 1975 menjadi salah satu NGO di Jepang yang aktif menyampaikan informasi tentang energi nuklir termasuk isu keamanan, proliferasi dan ekonomi melalui majalah dan seminar publik jauh sebelum bencana nuklir Fukushima terjadi. Ketika bencana nuklir Fukushima terjadi, CNIC menerima ratusan telepon dan email yang meminta informasi terkait bencana tersebut. CNIC memanfaatkan media online seperti Ustream untuk menyampaikan informasi dan analisis tentang bencana nuklir kepada masyarakat yang lebih luas. Beberapa hari setelah ledakan pertama pada reaktor nuklir, CNIC telah menganalisis kemungkinan yang akan terjadi pada reaktor nuklir satu dan tiga. Namun, hal tersebut baru disadari oleh TEPCO dan Pemerintah Jepang dua bulan kemudian. Selain itu, pada tanggal 18 Maret 2011 CNIC memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengevakuasi penduduk yang berada di radius 30 km karena adanya bahaya paparan radiasi tetapi baru dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 22 April 2011 (Liscutin, 2011).

Bocornya pipa reaktor nuklir Daichi Fukushima dan pembuangan limbah air radioaktif ke laut menyebabkan air dan produk laut tercemar oleh zat radioaktif. TEPCO menyatakan air limbah radioaktif yang dibuang ke laut mencapai 300 ton per hari sejak tahun 2011. TEPCO dan pemerintah menyatakan pembuangan limbah radioaktif tersebut tidak melebihi batas keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga pencemaran radioaktif dalam dosis yang rendah tidak membahayakan kesehatan. Namun, beberapa peneliti mengungkapkan pendapat yang berbeda. Limbah radioaktif yang dibuang oleh TEPCO sebanyak 300 ton per hari belum termasuk limbah yang mengalir akibat kebocoran pipa reaktor nuklir.

Terkontaminasinya Bahan Pangan

Makanan dan minuman menjadi media pencemaran zat radioaktif. Oleh karena itu, makanan menjadi hal penting yang sangat diperhatikan oleh masyarakat Jepang. Pasca meledaknya reaktor nuklir Daichi Fukushima, Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW) pada tanggal 17 Maret 2011 menetapkan *Provisional Regulatory Values* (PRVs) sebagai standar untuk menentukan batas kandungan zat radioaktif dalam makanan. Berdasarkan standar tersebut, makanan tidak layak dikonsumsi apabila kandungan cesium lebih dari 200 Bq/kg untuk air minum, susu, dan produk susu lainnya, dan 500 Bq/kg untuk sayuran, gandum, daging, telur dan ikan. Pada tanggal 19 Maret 2011 Pemerintah Jepang mengumumkan ditemukannya kandungan zat radioaktif yang melebihi batas dalam beberapa makanan seperti, bayam dan susu. Informasi tersebut menambah kepanikan masyarakat akibat bencana yang terjadi. Kepala Sekretaris Kabinet, Yukio Edano, berusaha untuk menenangkan masyarakat dengan menyatakan bahwa radiasi yang ditimbulkan tidak akan mengancam kesehatan masyarakat. Namun, pernyataan Yukio Edano tidak dapat menenangkan publik menghadapi risiko radiasi nuklir.

Penelitian yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan standar baru mendapat kritikan terkait dengan kurangnya jumlah peralatan yang digunakan, terbatasnya jumlah sampel makanan, lebih longgarnya standar yang digunakan, standar yang digunakan hanya dapat menjelaskan kandungan cesium dan iodine, sedangkan zat lain strontium yang lebih berbahaya tidak dilihat, dan tidak ditelitinya semua makanan (Kimura, 2012; *The National Diet of Japan*, 2012, 88). Kritik tersebut direspon oleh Pemerintah Jepang dengan memerintahkan kepada *Food Society Commission* (FSC) agar meneliti dampak radiasi terhadap kesehatan. Hasil penelitian FSC menunjukkan lebih dari 100 milisivert radiasi akan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Pada tanggal 1 April 2012 MHLW menetapkan standar baru keamanan pangan. Standar tersebut menetapkan batas tertinggi kandungan cesium sebesar 10 Bq/kg untuk air minum, 50 Bq/kg untuk susu, 100 Bq/kg untuk makanan umum, dan 50 Bq/kg untuk makanan bayi (MHLW,

2011). Pemerintah pusat memerintahkan kepada pemerintah lokal untuk melakukan pengujian persediaan makanan apakah mengandung zat radioaktif atau tidak. Pada tanggal 1 April-19 September 2012, pemerintah lokal melakukan pengujian pada 105.913 sampel makanan yang setengahnya berasal dari Fukushima Prefecture. Dari sampel tersebut sebesar 12% dari 1.360 jenis makanan mengandung cesium melebihi batas yang ditentukan dan setengahnya berasal dari Fukushima Prefecture (Aoki, 2012).

Pengujian makanan untuk mengetahui kandungan zat radioaktif tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun dilakukan pula oleh perusahaan, NGO, dan individu. Greenpeace menguji makanan laut dari lima supermarket besar dengan mengambil 60 sampel dari toko yang berbeda. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 34 sampel mengandung cesium yang mencapai 88 Bq/kg atau masih di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, Greenpeace menyatakan bahwa makanan yang terkontaminasi, sekecil apa pun, menunjukkan adanya risiko kesehatan, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil (CNN, 2011).

Kimura (2012) menjelaskan adanya perbedaan standar yang digunakan oleh pemerintah, sektor swasta, dan asosiasi konsumen untuk menentukan food safety atau keamanan pangan pascabencana nuklir Fukushima. Standar pemerintah PRVs digunakan oleh beberapa perusahaan, seperti House Food Inc, KFC, Moss Burger, Ajinomoto General Foods, Meiji Co. Perusahaan tersebut melakukan pengujian terhadap beberapa produk yang mereka hasilkan atas dasar inisiatif perusahaan maupun atas dasar permintaan konsumen untuk memastikan tingkat kandungan zat radioaktif. Lebih lanjut Kimura (2012) menjelaskan bahwa Supermarket AEON dan Maxvalue melakukan pengujian berdasarkan AEON Standard di mana kandungan zat radioaktif dalam makanan yang aman dikonsumsi adalah di bawah 50 Bq/kg. Supermarket AEON dan Maxvalue menggunakan AEON Standard sebagai bagian dari strategi pemasaran dan upaya pembedaan produk. *Seikatsu Club Consumer Cooperative* (SCCC) menggunakan standar radiasi 37 Bq/kg pasca kecelakaan reaktor nuklir Chernobyl. Namun, pascabencana nuklir

Fukushima SCCC menggunakan standar PRV's untuk mengetahui tingkat keamanan pangan, dan hal itu dilakukan untuk melindungi produsen. Pada bulan April 2012 SCCC merevisi standar yang digunakan dengan menetapkan kandungan radioaktif sebesar 10 Bq/kg untuk susu, air minum, makanan bayi dan beras, 20 Bq/kg untuk daging dan telur, dan 50 Bq/kg untuk sayuran. Perubahan dilakukan oleh SCCC setelah menuai kritik dari konsumen yang tergabung dalam SCCC.

Terkontaminasinya makanan di beberapa daerah yang dekat dengan reaktor nuklir Fukushima tidak hanya mencemaskan penduduk lokal, namun juga penduduk di daerah lain. Paparan radiasi menyebabkan terganggunya food supply chain (rantai pasokan pangan) di Jepang secara nasional. Fukushima Prefecture menjadi pemasok keempat terbesar produk pertanian ke Tokyo dan wilayah lainnya sehingga hasil pertanian dari daerah tersebut dikhawatirkan terkontaminasi zat radioaktif. Selain itu, teh yang berasal dari beberapa daerah seperti Shizukoka, Saitama Ibaraki, Kanagawa, Chiba dan Tochigi Prefecture mengandung zat radioaktif sehingga dilarang untuk diekspor ke Perancis pada periode bulan April 2011-Maret 2012 (Tanimura, 2013). Bencana Fukushima berdampak besar terhadap sektor perikanan di Jepang. Penelitian yang dilakukan oleh Fisheries Agency terhadap 14.773 sampel produk perikanan dari Fukushima Prefecture, dan 24.360 sampel dari laut menunjukkan 53 persen dari sampel yang ditangkap pada periode Maret-Juni 2011 mengandung radioaktif lebih dari 100 Bq/kg (Yoshida, 2013).

Dampak Radiasi terhadap Kesehatan

Beberapa zat radioaktif yang terkandung dalam atom nuklir adalah iodine 131, cesium 137, dan strontium 90 yang memancarkan sinar alpha, beta, dan gamma. Masing-masing sinar radioaktif memiliki karakteristik dan kekuatan yang berbeda-beda. Paparan radioaktif dapat terjadi melalui dua cara, yakni *internal exposure* dan *external exposure*. *Internal exposure* terjadi apabila zat radioaktif masuk ke tubuh melalui mulut bersama dengan makanan dan minuman, atau melalui hidung ketika bernafas. Sementara

itu, *external exposure* terjadi ketika zat radioaktif mengenai langsung melalui kulit tubuh.

Beberapa zat radioaktif ada yang dengan mudah diserap tubuh dan bertahan. Iodin akan diserap oleh kelenjar tyroid, sedangkan strontium akan diserap oleh tulang. Zat radioaktif tersebut dapat merusak gen sehingga sebagian gen akan mati, rusak, atau bermutasi. Hal yang paling membahayakan dari radiasi nuklir adalah tidak dapat dirasakan oleh lima pancaindera manusia. Ketika kita terpapar radiasi nuklir, kita tidak merasakan apa-apa dan gejalanya timbul bisa seminggu, setahun, atau beberapa tahun kemudian. Gejala yang sering timbul adalah mual, muntah, kelelahan, rambut rontok, diare, dan gejala tersebut tergantung dari level paparan radiasi. Radiasi nuklir juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit kanker dan leukimia.

Ancaman radioaktif telah dirasakan oleh masyarakat Jepang ketika bom atom menghantam kota Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945. Kedua bom atom tersebut telah meluluhlantakkan kedua kota, menyebabkan lebih dari dua ratus ribu orang meninggal dunia, menyisakan orang-orang yang sakit akibat paparan radiasi nuklir dan ratusan anak yang lahir dengan sakit atau cacat bawaan. Selain sakit yang seketika diderita akibat pengeboman, bom atom tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah penderita kanker, keloids, a-boms cataracts, perubahan kromosom, dan meningkatnya jumlah kematian ibu hamil (Atomic Bomb Museum, 2014).

Dampak radiasi nuklir terhadap kesehatan tidak lepas dari perdebatan para ahli. Seorang ahli medis, Prof. Yamashita Shunici, telah melakukan survei tentang dampak radiasi terhadap kesehatan di Fukushima Prefecture. Dari survei yang telah dilakukan, tidak diperoleh sampel yang terpapar radiasi dalam dosis tinggi sehingga disimpulkan bahwa bahwa radiasi nuklir Fukushima hanya berdampak kecil pada kesehatan manusia. Menurut Yamashita hasil survei tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukannya pasca bencana nuklir Chernobyl (Wataru et.al., 2012). Penelitian yang dilakukan oleh U.N Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation (UNSCEAR) (2013) juga menunjukkan bahwa radiasi nuklir Fukushima

tidak berdampak pada kesehatan. Hasil penelitian tersebut telah dibantah oleh beberapa ahli dari PBB dan meminta UNSCEAR mengkaji ulang hasil penelitian tersebut (Japan Daily Press 2013). Di sisi lain, laporan WHO yang dirilis pada bulan Februari 2013 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Fukushima yang menderita kanker diperkirakan akan meningkat akibat dari paparan radiasi nuklir sehingga diperlukan monitoring dalam jangka panjang. Selain itu, dampak bencana nuklir terhadap gangguan psikologi perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah (WHO, 2013).

Siapa Korban Bencana Nuklir Fukushima?

Kompensasi menjadi isu serius ketika terjadi bencana teknologi. Pada kasus bencana nuklir Fukushima, penentuan seseorang dikategorikan sebagai korban atau bukan korban bencana tidak mudah dilakukan (Sarjiati, 2014: 226) Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan, sebaran radiasi yang mencapai berbagai wilayah di Jepang dan dampaknya yang bersifat jangka panjang yang tidak dapat diketahui beberapa saat setelah terjadinya bencana. TEPCO menyusun kriteria untuk menentukan seseorang sebagai korban bencana atau bukan. Dibalik status sebagai korban bencana nuklir Fukushima terdapat hak-hak korban dan kewajiban TEPCO untuk memberikan kompensasi atas kerugian dan penderitaan akibat bencana nuklir Fukushima sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan keputusan politis (Sarjiati, 2014). TEPCO menyediakan form aplikasi yang terdiri dari 54 halaman yang harus diisi oleh penduduk jika ingin mengajukan hak-haknya sebagai korban. Rumitnya prosedur untuk mendapatkan kompensasi dari TEPCO menyebabkan sebagian dari korban membatalkan tuntutan kompensasi kepada TEPCO.

Pengungsi atas perintah pemerintah yang berasal dari area dengan radius 20 km dari PLTN Daichi Fukushima, 10 km dari PLTN Daini Fukushima, dan area dengan radius 20-30 km dari PLTN Daichi Fukushima berhak mendapatkan kompensasi. Area tersebut adalah Minami Soma City, Iitate Village, Namie Town, Futaba Town, Okuma Town, Tamioka Town, Hirono Town, Katsurao Village, Kawauchi Village, Tamura

City, dan Iwaki City. TEPCO memberikan kompensasi yang terdiri dari kompensasi sementara dan kompensasi tetap. Setiap orang atau keluarga mendapatkan kompensasi sebesar 750 ribu hingga 1 juta yen sebagai pengganti biaya mengungsi seperti biaya transportasi, akomodasi, kesehatan dan hilangnya pekerjaan (TEPCO, 2011b). Selain itu, kompensasi diberikan juga kepada petani, nelayan, dan pengusaha yang dirugikan akibat kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana nuklir dan pengusaha yang dirugikan akibat hilangnya kesempatan ekonomi.

Kompensasi dapat diberikan kepada pengusaha dan petani apabila komoditas yang diperdagangkan termasuk kategori komoditas yang dilarang untuk dipasarkan. Hal tersebut menyebabkan banyak petani yang tidak dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan meskipun secara riil mereka mengalami kerugian yang besar akibat bencana nuklir. Kelompok lain yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi dari TEPCO adalah penduduk yang mengungsi secara sukarela dan penduduk di luar Fukushima Prefecture yang mengalami gangguan psikologis akibat ancaman radiasi nuklir (Sarjiati, 2014). Dengan adanya kritikan dari berbagai pihak, pada bulan Juni 2012 TEPCO memberikan kompensasi atas gangguan emosional kepada pengungsi sukarela sebesar 200.000 yen (TEPCO 2011c).

Beberapa kelompok korban yang dikategorikan sebagai *unacknowledge victims* atau korban yang tidak diakui adalah penduduk dan pekerja TEPCO yang terpapar radiasi melebihi standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun tidak atau belum mengalami gangguan kesehatan dalam jangka pendek (Sarjiati, 2014). Dampak radiasi nuklir dapat diketahui dalam jangka panjang seperti timbulnya penyakit kanker. Sebaliknya apakah penyakit kanker hanya disebabkan oleh radiasi nuklir atau tidak sulit untuk dibuktikan. TEPCO hanya memberikan kompensasi atas biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh penderita tetapi tidak menanggung biaya pengobatan atas penyakit yang timbul dalam jangka panjang. Selain itu, radiasi tidak dapat dirasakan oleh pancaindera sehingga memungkinkan masyarakat tidak menyadari apabila dirinya terpapar radiasi.

RESPONS PUBLIK TERHADAP RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN BENCANA NUKLIR

Bencana nuklir Fukushima menyebabkan kerusakan kehidupan manusia dan lingkungan serta menimbulkan situasi yang serba tidak pasti. Kesimpangsiuran informasi yang disampaikan berbagai pihak seperti birokrat, TEPCO, media massa, NGO dan ilmuwan menyebabkan kebingungan dan kepanikan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah dan TEPCO dalam menangani kecelakaan reaktor nuklir terlihat tidak efektif. Hal-hal tersebut menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan bencana nuklir Fukushima. Oleh karena itu, masyarakat melakukan berbagai strategi untuk menghadapi bencana nuklir Fukushima seperti mengungsi ke daerah yang lebih aman, memilih makanan dari daerah tertentu, dan mendeteksi adanya radiasi nuklir di kawasan tertentu. Kemajuan teknologi informasi membantu masyarakat untuk mengumpulkan dan menyebarkan berbagai informasi terkait dengan bencana nuklir melalui internet, media sosial, website, dan telepon seluler. Oleh karena itu, publik mendapatkan pemahaman baru tentang energi nuklir yang tidak aman digunakan untuk mendukung industrialisasi dan pembangunan. Pemahaman baru tentang energi nuklir dan risiko didalamnya menjadi salah satu faktor yang menggerakkan massa melakukan gerakan anti-nuklir. Bagian ini akan menjelaskan dua tipe respons publik terhadap risiko radiasi nuklir seperti munculnya citizen science, dan meningkatnya gerakan anti-nuklir pasca bencana nuklir Fukushima

Distribusi Pengetahuan dan *Citizen Science*

Ketidajelasan informasi mengenai radiasi nuklir Fukushima yang disampaikan oleh pemerintah, TEPCO, peneliti, dan media massa menciptakan ketidakpastian. Penyebaran berbagai informasi yang sangat cepat mengenai bencana nuklir Fukushima melalui media massa, televisi, internet dan media sosial seperti twitter dan Ustream menyebabkan kepanikan dan ketakutan masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan TEPCO menyebabkan informasi yang disampaikan

diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, masyarakat berinisiatif untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai media, seperti buku, media massa, internet, blog, twitter, dan televisi. Untuk memahami secara benar apa yang terjadi dengan bencana nuklir, masyarakat mulai mempelajari hal-hal yang terkait dengan nuklir, seperti zat radioaktif cesium, iodine, strontium, plutonium, serta ukuran dosis radioaktif seperti becquerel and sievert. Selain itu, publik mulai mempelajari peristiwa kecelakaan nuklir Chernobyl pada tahun 1986 sebagai dasar untuk memahami bencana nuklir Fukushima. Pengetahuan tersebut penting untuk menilai dan memilah informasi yang benar dan tidak. Masyarakat mulai meragukan kebenaran kampanye nuklir sebagai energi yang “*safe, cheap, and reliable*” yang telah dilakukan oleh *nuclear village*.

CNIC merupakan salah satu NGO antinuklir yang menyediakan berbagai informasi mengenai energi nuklir. CNIC didirikan oleh seorang ahli nuklir, Dr. Jinzaburo Takagi, pada tahun 1975. CNIC secara aktif mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait dengan energi nuklir dari aspek keamanan, ekonomi, dan isu proliferasi serta melakukan berbagai penelitian terkait dengan isu nuklir. CNIC telah menerbitkan majalah cetak dan online, menyelenggarakan seminar pendidikan publik untuk menginformasikan hasil penelitiannya. Pascabencana 3/11, CNIC mendapatkan banyak permintaan dari masyarakat mengenai informasi bencana nuklir Fukushima. Oleh karena itu, CNIC membuat program berita di Ustream untuk menyebarkan informasi bencana nuklir Fukushima. CNIC memberikan pernyataan bersama terkait krisis nuklir dan mengkritisi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. CNIC berpendapat bahwa TEPCO telah menyembunyikan berbagai informasi tentang kerusakan reaktor nuklir dan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Terkait dengan keselamatan penduduk, CNIC memberi masukan kepada pemerintah untuk mengevakuasi penduduk yang berada dalam radius 30 km dari PLTN Fukushima (CNIC, 2011a) dan meningkatkan batas maksimum dosis radiasi menjadi dari 50 mSv menjadi 250 mSv bagi pekerja TEPCO

(CNIC, 2011b). Selain itu, CNIC berpendapat bahwa reaktor nuklir TEPCO di Kashiwazaki-Kariwa dihentikan pengoperasiannya (CNIC, 2011c). CNIC juga melakukan penelitian terkait dengan food safety atau keamanan pangan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menguji makanan di laboratorium CNIC apakah mengandung zat radioaktif atau tidak. CNIC sebagai salah satu penyelenggara demonstrasi menjadi bagian penting dalam menyukseskan demonstrasi besar pada tanggal 19 September 2011 dan 16 Juli 2012. Dengan sumber informasi, pengetahuan dan jaringan yang dimiliki, CNIC berhasil memobilisasi massa untuk berpartisipasi dalam demonstrasi antinuklir tersebut.

Selain CNIC, jurnalis menjadi bagian penting dalam menyebarkan informasi mengenai radiasi nuklir melalui internet. Liscutin (2012) menjelaskan peranan media dan gerakan anti nuklir di Jepang pasca bencana Fukushima. Independent Web Journal yang dibangun oleh Jurnalis Iwakumi Yasumi dan OurPlanet-TV (tv berbasis internet) yang dibangun oleh mantan jurnalis Asahi Shimbun, yakni Shiraiishi Hajime adalah contoh dari media massa yang peduli terhadap penyebaran informasi bencana nuklir Fukushima. OurPlanet-TV membuat program yang membahas isu tentang radiasi, seperti dampak radiasi pada tingkat yang rendah terhadap anak-anak dan dewasa. Program tersebut didukung dengan penyebaran 500 kuesioner untuk mengetahui gejala yang dialami oleh penduduk yang terpapar radiasi. Hasil survei didiskusikan dengan aktivis antinuklir Chernobyl sehingga dapat memberikan gambaran jelas dampak bencana nuklir Fukushima. Dengan mengangkat isu dampak radiasi terhadap anak dan wanita hamil, Our Planet-TV telah berhasil membangun jaringan dan memobilisasi massa yang tergabung dalam Fukushima network for saving children untuk melakukan aksi protes anti nuklir. Selain itu, kelompok tersebut bernegosiasi dengan pemerintah untuk mengevakuasi anak-anak di Fukushima ke tempat yang aman.

Berdasarkan penelitian etnografi yang dilakukan Liscutin (2012), Independen Web Journal (IWJ) memberikan informasi mengenai radiasi nuklir dengan membuat

sebuah film dokumenter yang berisi pengalaman penduduk Fukushima dan beberapa jurnalis yang meliput berita di Fukushima. Film tersebut menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh penduduk Fukushima yang harus mengungsi secara paksa maupun sukarela. Selain itu, web tersebut mengumpulkan dokumentasi berbagai diskusi dan seminar yang dilakukan oleh berbagai NGO sehingga web tersebut dapat berfungsi sebagai hub antara media independen. Twitter selain sebagai media untuk menyebarkan informasi terkait radiasi nuklir, dimanfaatkan pula untuk membangun jaringan dan alat mobilisasi massa. Follower twitter Iwakumi yang mencapai 80.000 orang berkoordinasi untuk mengikuti unjuk rasa antinuklir yang diadakan di Tokyo.

Geiger Counter yakni alat pendeteksi paparan radiasi menjadi fenomena pascabencana nuklir Fukushima. *Geiger counter* digunakan untuk mengetahui tingkat paparan radiasi di suatu area. Bencana nuklir Fukushima memicu gerakan *citizen science* dimana publik secara aktif berpartisipasi dalam pengukuran tingkat radiasi nuklir di berbagai wilayah. Hasil pengukuran tersebut dianalisis oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan yang mereka ketahui. Sebelumnya, pengetahuan mengenai nuklir dan paparan radiasi hanya diketahui oleh seorang ahli. Hasil pengukuran secara sukarela yang dilakukan oleh individu terkumpul dalam jaringan Safecast. Data tersebut dimanfaatkan untuk membuat peta sebaran radiasi dari berbagai wilayah dan peta tersebut dapat diakses secara *online*. Komunitas pengguna Safecast memanfaatkan mailing list untuk mendiskusikan krisis Fukushima serta menyebarkan informasi yang berasal dari pemerintah dan TEPCO (Murillo, 2012).

Ketidakpastian informasi mengenai radiasi nuklir mendorong masyarakat untuk menggali informasi dari berbagai sumber. CNIC, OurTv Planet, IWJ dan Safecast hanya sebagian contoh kecil sumber informasi bencana nuklir dan radiasi pascabencana Fukushima yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat umum. Informasi yang diperoleh akan diserap dan dipilah-pilah hingga membentuk sebuah pengetahuan yang mereka percayai kebenarannya dan mendorong mereka melakukan sebuah

tindakan. Informasi yang diperoleh memberikan pandangan yang berbeda tentang krisis Fukushima serta bahaya radiasi yang ditimbulkan. Terdapat dua jenis pengetahuan yang muncul dari perdebatan krisis nuklir, yakni pengetahuan yang muncul dari kelompok masyarakat yang terkena dampak yang diliputi oleh rasa takut, cemas, depresi, dan simpati di antara mereka dan pengetahuan yang berasal dari kelompok rezim nuklir atau *nuclear village* (Kohso, 2012).

Gerakan Antinuklir Di Jepang

Bencana nuklir Fukushima memberikan pemahaman baru bagi masyarakat Jepang mengenai energi nuklir. Bagi sebagian besar masyarakat Jepang, nuklir tidak lagi dianggap sebagai energi yang aman, namun energi yang membahayakan. Meskipun paparan radiasi nuklir Fukushima sampai saat ini tidak menyebabkan kematian manusia secara langsung, paparan radiasi yang dilepaskan dianggap sebagai ancaman bagi kesehatan manusia dalam jangka panjang. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perdebatan mengenai radiasi nuklir pasca bencana Fukushima yang melibatkan banyak aktor menciptakan sebuah kondisi ketidakpastian bagi masyarakat. Selain itu, hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah Jepang dalam penanganan bencana nuklir Fukushima mendorong masyarakat melakukan berbagai strategi untuk menghadapi kondisi ketidakpastian serta untuk melindungi diri dan keluarganya terhadap ancaman radiasi nuklir. Beberapa strategi yang dilakukan adalah melakukan protes, demonstrasi massal, dan negosiasi menuntut Pemerintah Jepang untuk menghentikan pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi di Jepang.

Demonstrasi antinuklir yang dilakukan oleh puluhan orang hingga ribuan orang di Tokyo dan daerah lain merupakan pemandangan yang biasa di Jepang pascabencana nuklir Fukushima. Demonstrasi yang menuntut dihentikannya operasi PLTN di Jepang diikuti oleh berbagai kalangan seperti artis, akademisi, peneliti, pengacara, aktivis, ibu rumah tangga, orang tua, pekerja kantor, anak muda dan lain sebagainya. Gerakan tersebut merupakan bentuk dari ketidakpercayaan masyarakat Jepang terhadap

nuklir sebagai energi yang aman digunakan. Sejak tahun 1950-an Pemerintah Jepang bersama dengan media massa, politikus, birokrat, dan akademisi mengkampanyekan nuklir sebagai energi yang “*safe, cheap, and reliable*”. Nuklir dianggap sebagai sumber energi yang dapat mendukung proses industrialisasi yang sedang dilaksanakan oleh Jepang pascaperang dunia kedua. Selain itu, keterbatasan sumber energi yang dimiliki serta usaha pengurangan ketergantungan luar negeri atas minyak mentah menjadi pendorong Pemerintah Jepang untuk mengembangkan nuklir sebagai salah satu strategi menjaga ketahanan energi Jepang. Keberhasilan Jepang dalam mengembangkan industri energi nuklir terlihat dengan dibangunnya 54 reaktor nuklir di berbagai wilayah di Jepang, seperti di Fukushima, Onagawa, Kashiwazaki Kariwa, Miihama, Tsuruga, Monju, Takahama, Shika, Tomari, Higashidori, Hamaoka, Sendai, Genkai, dan Ikata. Kenyataannya, terjadi kerusakan pada beberapa reaktor nuklir yang berisiko menyebabkan terjadinya pencemaran zat radioaktif. Namun, berbagai cara di tempuh oleh operator PLTN dan pemerintah untuk menutupi kasus tersebut untuk menjaga citra nuklir sebagai sumber energi yang aman bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat percaya terhadap pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi yang aman. Hal ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Kantor Perdana Menteri pada tahun 2009 yang menunjukkan 60% dari jumlah penduduk mendorong penambahan jumlah reaktor nuklir di Jepang (Aldrich, 2013).

Sebelum terjadinya bencana Fukushima, gerakan anti nuklir bersifat lokal seperti gerakan lingkungan lain yang berkembang pada tahun 1960-an seiring terjadinya pencemaran lingkungan akibat dari proses industrialisasi. Lesbirel (1998) dan Aldirch (2008) menggunakan konsep politik *Not in My Backyard Please* (NIMBY) untuk melihat gerakan sosial di Jepang sebagai respon rencana pembangunan fasilitas publik, termasuk pembangunan reaktor nuklir. Gerakan antinuklir terjadi di berbagai wilayah yang akan dibangun reaktor nuklir dan diikuti oleh berbagai pihak seperti, petani dan nelayan. Penyebabnya, pembangunan reaktor nuklir dianggap akan mengganggu kehidupan ekonomi

masyarakat lokal seperti kasus penolakan pembangunan reaktor nuklir di Kaminoseki di Yamaguchi Prefecture, Ashihama di Mie Prefecture, Tomari di Hokkaido Prefecture, dan Maki di Nigata Prefecture. Pemberian kompensasi kepada masyarakat lokal menjadi salah satu cara untuk mengatasi terjadinya konflik. Selain itu, perusahaan nuklir membangun berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, tempat olah raga, dan taman untuk masyarakat lokal (Onistuka, 2012)

Persepsi masyarakat terhadap energi nuklir sebagai energi yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan mendorong mereka berpartisipasi dalam gerakan antinuklir. Kelompok intelektual yang bergabung dalam “*Sayonara nukes*” yang terdiri dari Katsuto Uchihashi, Kenzaburo Oe, Keikeo Ochiai, Satoshi Kamata, Hisae Sawachi, Jakucho Setauchi, Shunsuki Tsurumi, dan Ryuichi Sakamoto berinisiatif untuk mengumpulkan tanda tangan petisi yang bertujuan untuk membatalkan pembangunan reaktor baru, dan menghentikan operasi PLTN termasuk reaktor nuklir Monju yang menggunakan plutonium. Kelompok tersebut juga menyelenggarakan demonstrasi besar “*Sayonara genpatsu atau Goodbye to Nuclear Power Plants*” pada tanggal 19 September 2011 di Meiji Park, Tokyo. Demonstrasi tersebut berhasil mengumpulkan 60.000 massa dari berbagai kalangan (Penney, 2011).

Salah satu tokoh penting dalam demonstrasi antinuklir adalah Muto Ruiko, seorang aktivis antinuklir yang tinggal di Tamura-cho, Fukushima Prefecture sekitar 45 km dari reaktor nuklir Daichi Fukushima. Muto telah terlibat dalam gerakan anti nuklir sejak terjadinya bencana nuklir Chernobyl dan telah melakukan protes di Fukushima dan di Rokkasho sebelum bencana nuklir Fukushima terjadi. Dalam demonstrasi di Meiji Park, Muto mengidentifikasi dirinya sebagai hibakusha (kelompok korban bom atom hidrogen Hiroshima dan Nagasaki beserta keluarganya dan menyatakan penolakannya terhadap keberadaan reaktor nuklir yang telah membahayakan kehidupan pada masa datang. Pada bulan Oktober 2011, Muto bersama 100 perempuan dari Fukushima melakukan aksi

pendudukan kantor METI menuntut penghentian pengoperasian reaktor nuklir di seluruh wilayah Jepang. Selain itu, Muto bersama penduduk Fukushima menuntut TEPCO di pengadilan untuk bertanggung jawab atas bencana nuklir yang terjadi (Yamaguchi and Ruiko, 2012).

Nuklir menyumbang setidaknya 30 persen kebutuhan energi di Jepang. Pascabencana Fukushima, tiga perempat dari 54 reaktor nuklir di Jepang tidak beroperasi sehingga mengganggu persediaan energi di Jepang. Daerah Kansai mengalami kekurangan pasokan 20 persen akibat dihentikannya reaktor nuklir Oi di Fukui Prefecture. Hasil survei yang dilakukan oleh Kantor Perdana Menteri Noda menunjukkan lebih dari setengah responden menyatakan menolak rencana pengoperasian kembali reaktor Oi. Namun, Perdana Menteri Noda pada tanggal 8 Juni 2012 memutuskan pengoperasian kembali reaktor nuklir Oi. Rencana tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Jepang sehingga demonstrasi antinuklir semakin sering dilakukan dengan melibatkan puluhan orang sampai puluhan ribu orang. Sejak akhir Maret 2012, setiap Jumat sore demonstran yang mencapai dua ratus ribu orang berkumpul di depan kantor Perdana Menteri untuk mengekspresikan penolakan rencana PM Noda tersebut. Demonstrasi tersebut dikoordinasi oleh Metropolitan Coalition Against Nuke yang dibentuk pada bulan September 2011. Pada tanggal 16 Juli 2012 di Yoyogi Park, Tokyo salah satu kelompok *Sayonara nukes* sekaligus penerima penghargaan Nobel Kesusastaan 1994, Kenzaburo Oe, di depan 170.000 demonstran anti nuklir menyampaikan penolakannya atas rencana pemerintah mengaktifkan kembali reaktor nuklir Oi yang sempat dihentikan sementara operasinya pasca bencana Fukushima. Menurut Oe, pengaktifan kembali reaktor nuklir sebagai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi (McCurry, 2012).

Meskipun terjadi penolakan penggunaan energi nuklir, Pemerintah Jepang di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe dari *Liberal Democratic Party* (LDP) menggantikan Perdana Menteri Yoshihoka Noda menetapkan nuklir sebagai energi alternatif yang penting. Pada tanggal 1 Maret 2013, Perdana Menteri Shinzo Abe berencana untuk mengoperasikan

kembali enam reaktor nuklir di Jepang pada akhir tahun 2013. Pasca bencana nuklir Fukushima, 48 reaktor nuklir di Jepang dinonaktifkan sementara waktu dan akan dioperasikan kembali setelah mendapatkan pemeriksaan. Pada peringatan dua tahun bencana nuklir, ribuan masyarakat menggelar demonstrasi antinuklir di Tokyo Park. Demonstrasi anti nuklir dilakukan juga di Hakodate City, Hokkaido Prefecture yang diikuti oleh 400 orang, Ehime Prefecture diikuti 400 orang dan di Osaka City diikuti oleh 11.000. Aksi tersebut dilakukan untuk menolak pengoperasian kembali reaktor nuklir yang berada di wilayahnya (Japan Press Weekly, 2013). Pada bulan April 2015, dua reaktor nuklir Kyushu Electric Co di Sendai, Kagoshima Prefecture akan diaktifkan kembali setelah dinyatakan lulus pemeriksaan oleh *Nuclear Regulation Authority* (NRA) (The Asahi Shimbun, 2015).

PENUTUP

Perdebatan risiko nuklir pasca bencana Fukushima yang melibatkan banyak aktor memperlihatkan kompleksitas masalah yang ditimbulkan oleh bencana. Masing-masing aktor berusaha mengkonstruksikan risiko nuklir untuk mencapai tujuannya dan melindungi kepentingannya. Dengan pengetahuan risiko nuklir yang dimiliki, setiap aktor akan memilah dan memilih informasi yang digunakan untuk mengkonstruksikan risiko nuklir. Perdebatan risiko nuklir yang terjadi pasca bencana nuklir Fukushima mencakup besaran besarnya bencana, dampak bencana nuklir terhadap lingkungan, dan kesehatan manusia, standar keamanan pangan dan pengelompokan korban bencana nuklir yang berhak mendapatkan kompensasi. Perdebatan risiko nuklir tersebut akan berlangsung dalam jangka panjang. Di satu sisi, radiasi nuklir yang ditimbulkan oleh bencana nuklir Fukushima berdampak panjang dan dapat diketahui akibatnya setelah jangka waktu yang lama. Hal ini terjadi pada bencana industrial penyakit Minamata pada tahun 1960an dimana para korban dan keluarga hingga kini masih menuntut kompensasi dari pemerintah dengan memberikan bukti dan justifikasi yang berbeda. Di sisi lain, kebutuhan energi untuk industrialisasi dan pembangunan ekonomi Jepang semakin besar. Energi alternatif

yang bersumber dari biogas, air, angin dan sinar matahari belum dapat menggantikan energi nuklir. Oleh karena itu, kontestasi pengetahuan risiko nuklir merupakan relasi kekuasaan antar aktor yang akan mengarah pada penyusunan pemanfaatan kebijakan energi nuklir di Jepang di masa yang akan datang.

Kemajuan teknologi informasi meningkatkan percepatan penyebaran informasi terkait dengan bencana nuklir Fukushima. Produksi dan distribusi pengetahuan pasca bencana nuklir Fukushima menjadi salah satu pemicu gerakan sosial seperti munculnya citizen science dan gerakan antinuklir sebagai strategi untuk menghadapi risiko dan ketidakpastian yang terjadi. Gerakan sosial tersebut merupakan respons dari menurunnya ketidakpercayaan publik terhadap Pemerintah Jepang dalam menangani bencana nuklir Fukushima.

Risiko dalam masyarakat modern dipahami sebagai risiko yang dikonstruksi. Meskipun secara riil risiko nuklir itu ada, pada akhirnya risiko adalah hasil dari konstruksi yang diperdebatkan oleh berbagai aktor. Beck (1992) berpendapat bahwa risiko dapat diubah, didramatisasi, dibesar-besarkan atau diperkecil dengan pengetahuan. Oleh karena itu, media massa, ilmuwan, dan legal profession berperan penting dalam mendefinisikan atau mengkonstruksi sebuah risiko. Kontestasi pengetahuan dalam mendefinisikan risiko muncul dari pihak yang terkena dampak atau dirugikan dan dari pihak yang mendapatkan keuntungan. Dalam kasus bencana industri dan teknologi seperti bencana nuklir Fukushima, kontestasi pengetahuan dalam mengkonstruksi risiko terlihat jelas karena dalam bencana tersebut harus ada pihak yang bertanggung jawab atas bencana yang terjadi.

PUSTAKA ACUAN

- Aldrich, D.P. (2008). *Site Fights: Divisive Facilities and Civil society in Japan and the West*. New York: Cornell University Press.
- (2013). "Post-Fukushima Nuclear Politics in Japan, part 3: Empowered Anti-nuclear sentiment." *The Monkey Cage*, 3 April. Diakses tanggal 10 Januari 2014 (<http://themonkeycage>).

- org/2013/04/03/post-fukushima-nuclear-politics-in-japan-part-3-empowered-anti-nuclear-sentiment/).
- Almeida, P. & Stearns, L. B. (1998). "Political opportunities and local grassroots environmental movements: The case of Minamata". *Sociological Problem* 45, 1: 37-60.
- Aoki, M. (2012). "Cesium Contamination in Food Appears to be on Wane". *Japan Times*, 19 Sept. Diakses tanggal 15 Januari 2013 (<http://www.japantimes.co.jp/news/2012/09/25/reference/cesium-contamination-in-food-appears-to-be-on-wane/>)
- Atomic Bomb Museum. (2014). "Health Effect". Diakses tanggal 20 Oktober 2014 (http://atomicbombmuseum.org/3_health.shtml)
- Epstein, S. (1996). *Impure Science: AIDS, Activism, and the Politics of Knowledge*. Berkeley: University of California Press.
- Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: SAGE publication
- (1999). *World Risk Society*. Cambridge: Polity Press.
- CNN. (2011). "New Survey Finds Radiation in Tokyo Food Supply". CNN, 21 Oktober. Diakses tanggal 12 Oktober 2012 (<http://travel.cnn.com/tokyo/eat/greenpeace-survey-finds-radiation-tokyo-food-supply-330402>)
- CNIC. (2011a). "Statement by Scientists and Engineers Concerning Fukushima Daichi Nuclear Plant". Diakses tanggal 13 Maret 2013 (<http://www.cnic.jp/english/topics/safety/earthquake/fukukk23mar11.html>)
- (2011b). *Petition Concerning Radiological Impact of Fukushima Daichi Nuclear Power*. Diakses tanggal 12 Oktober 2011 (<http://www.cnic.jp/english/topics/safety/earthquake/fukurad28mar11.html>)
- (2011c). *Statement by scientists and engineer concerning Fukushima Daichi nuclear plant*. Diakses tanggal 12 Oktober 2012. (<http://www.cnic.jp/english/topics/safety/earthquake/fukuk19may11.html>)
- Ishizuka, H. (2011). "Cesium from Fukushima Plant Fell all over Japan". *Asahi Shimbun*, 26 November 2011. Diakses tanggal 13 Maret 2013 (<http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201111260001>)
- Harlan, C. (2011). "In Japan, Nuclear Bestseller Reflect New Debate". *The Washington Post*. 19 Juli 2011. Diakses tanggal 13 Maret 2013 (http://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/in-japan-nuclear-bestsellers-reflect-new-debate/2011/07/16/gIQAth5QNI_story.html).
- Hiroaki, K. (2011). "The Truth about Nuclear Power: Japanese Nuclear Engineer Calls for Abolition". *The Asia-Pacific Journal* 9, No. 31. Diakses tanggal 13 Maret 2013 (<http://www.japanfocus.org/-Satoko-NORIMATSU2/3582>).
- Japan Daily Press (JDP). (2013). "Human Right Experts Call for Revision to UN Report on Fukushima Radiation". Diakses tanggal 17 Januari 2014 (<http://japandailynews.com/human-rights-experts-call-for-revisions-to-un-report-on-fukushima-radiation-2538523/>)
- Japan Press Weekly. (2013). "Anti-nuclear Power Action Commemorating Fukushima Accident Held Nationwide". Diakses tanggal 17 Januari 2014 (<http://www.japan-press.co.jp/s/news/?id=5347>).
- Jasanoff, S. (2008). "Bhopal's Trials of Knowledge and Ignorance". *New England Law Review* 42(4): 679-692.
- Jenks, A.L. (2011). *Perils of Progress: Environmental disasters in twentieth century*. Boston: Prentice-Hall.
- Kohso, S. (2012). "Rise of the New Collective Intellect from Apocalyptic Disaster and Mass Insurrection (2011)". *Inter-Asia Cultural Studies* 13, No. 1, 159-164.
- Lesbirel, H.S. (1998). *NIMBY politics in Japan: Energy Siting and the Management of Environmental Conflict*. Cambridge: MIT Press.
- Lynch, R.A. (2011). "Foucault's Theory of Power". dalam D. Taylor (ed.), 2011. *Michel Foucault: Key Concept*. Durham, UK: Acumen
- Murillo, L.FR. (2012). "New Expert Eyes over Fukushima: Open Sources Responses to the Nuclear Crisis in Japan". Diakses tanggal 3 Juni 2011 (<https://fukushimaforum.wordpress.com>)
- Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW). (2012). "New Standard Limits for Radionuclides in Foods". Diakses tanggal 12 Maret 2013 (http://www.mhlw.go.jp/english/topics/2011eq/dl/new_standard.pdf)
- Oiwa, K. (2001). *Rowing the eternal sea: The story of a Minamata Fishermen*. Maryland: Rowman & Littlefield Publisher, Inc.
- Onitsuka, H. (2012). "Hooked on Nuclear Power: Japanese State-local Relation and the Vicious Cycle on Nuclear Dependence." *The Asia-Pacific Journal* 10, no. 1 (January). Diakses tanggal 10 Agustus 2012 (<http://www.japanfocus.org/-Hiroshi-Onitsuka/3677>).
- Penney, M. (2011). "The Voices of Ten Million: Anti-nuclear Petition Movement Launched in Japan".

- Diakses tanggal 10 Agustus 2012 (<http://www.japanfocus.org/events/view/102>)
- Petryna, A. (2002). *Life Exposed: Biological Citizens after Chernobyl*. Princeton: Princeton University Press.
- Reuters. (2013). "Insight: After Disaster, the Deadliest Part of Japan's Nuclear Clean-up". Reuters, Agustus 2013. Diakses tanggal 13 Maret 2014 (<http://www.reuters.com/article/2013/08/14/us-japan-fukushima-insight-idUSBRE97D00M20130814>).
- Sarjiati, U. (2014). "Kontestasi Pengetahuan dan Konstruksi Resiko Bencana: Kasus Minamata dan Nuklir Fukushima". *Jurnal Global & Strategis*, 8 (2): 215-231.
- Sarjiati, U. (2015). "Nuclear Village and Risk Construction in Japan: A Lesson Learned for Indonesia". *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 5: 39-52.
- Soranse, M.P. & Christiansen, A. (2013). *Ulrich Beck: An introduction to the theory of second modernity and the risk society*. New York: Routledge.
- Tanimura, N. (2013). "Radioaktif Contamination of Japanese Tea After the Fukushima Nuclear Accident". *Nuke Info Tokyo* 152, Jan/Feb. Diakses tanggal 20 Oktober 2013 (http://www.cnrc.jp/english/newsletter/nit152/nit152articles/02_Japanesetea.html).
- TEPCO. (2011a). "Payment of Temporary Compensation for Damages Caused by Evacuation". Press Release, 15 April 2011. Diakses tanggal 12 Maret 2013 (<http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/11041501-e.html>).
- (2011b). "Permanent Compensation for Nuclear Damages by the Accident at Fukushima Daichi Nuclear Power Station and Fukushima Daini Nuclear Power Station". Press Release, 30 Agustus 2011. Diakses tanggal 12 Maret 2013 (<http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/11083007-e.html>).
- (2012). "Start of Compensation Payouts for Voluntary Evacuees from Southern Fukushima Prefecture". Press Release, 11 Juni 2012. Diakses tanggal 14 Maret 2013 (http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/2012/1205326_1870.html).
- Tomomi, Y&Ruiko, M. (2012). "Muto Ruiko and the Movement of Fukushima Resident to Pursue Criminal Charges Againsts TEPCO Executive and Government Officials." *The Asia-Pacific Journal* 10, 27 (2). Diakses tanggal 14 Maret 2013 (<http://japanfocus.org/-Muto-Ruiko/3784>).
- The Asahi Shimbun. (2015). "Editorial: Consensus-building Process Needed for Nuclear Policy Decision". The Asahi Shimbun. Diakses tanggal 4 Februari 2015 <http://ajw.asahi.com/article/views/editorial/AJ201501060058>
- The National Diet of Japan. 2012. *Official Report of The Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission*. Tokyo: The National Diet of Japan
- UNSCEAR. (2013). "No Immediate Health Risks from Fukushima Nuclear Accident Says UN Expert Science Panel". Press Release, 2013 May 31. Diakses tanggal 19 November 2013 (<http://www.unis.unvienna.org/unis/en/press-rels/2013/unisinf475.html>).
- Wataru, I. et.al. (2012). "Tyroid Cancer in Fukushima: Science Subverted in the Service of State". Diakses tanggal 14 Maret 2013 (<http://www.japanfocus.org/-Iwata-Wataru/3841>).
- World Health Organization (WHO). (2012). *Preliminary Dose Estimation from Nuclear Accident after the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami*. Geneva: WHO. Diakses tanggal 19 November 2013 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44877/1/9789241503662_eng.pdf)
- Yorifuji, T. et al. (2013). "Minamata Disease: A Challenge for Democracy and Justice". *Late Lessons from Early Warnings: Science, Precaution, Innovation*. Copenhagen, Denmark: European Environment Agency. Diakses tanggal 27 Agustus 2013 (<http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2>).
- Yoshida, R. (2013). "Experts Play Down Fish Radiation Fear". *The Japan Times*, Oct 20, 2013. Diakses tanggal 14 Maret 2014 (<http://www.japantimes.co.jp/news/2013/10/20/national/experts-play-down-fish-radiation-fear/>)
- Zinn, J.O. (2008). "Introduction: The Contribution of Sociology to Discourse on Risk and Uncertainty". dalam Zinn, Jens.O (ed.), 2008. *Social Theories of Risk and Uncertainty: An Introduction*. Malden, MA: Blackwell Publishing

“FATHERING JAPAN”: DISKURSUS ALTERNATIF DALAM HEGEMONI KETIDAKSETARAAN GENDER DI JEPANG¹

“FATHERING JAPAN” AS AN ALTERNATIVE DISCOURSE FROM THE HEGEMONY OF GENDER GAP IN JAPAN

Yusy Widarahesty

Universitas Al Azhar

Email:yusy_widarahesty@uai.ac.id

Diterima: 07-4-2018

Direvisi: 03-5-2018

Disetujui: 31-5-2018

ABSTRACT

The phenomenon of gender gap in Japan has brought many impacts of change in Japan from the declining birth rate and including the emergence of non-profit organizations (NPO) action groups namely “Fathering Japan”(Ikumen) founded by Tatsuya Ando in 2006, which tried to present as a form of resistance ideology from the myth of “Gender Stereotypes” hegemony in Japan. Ando established the NPO to encourage present and future fathers to play a more active role in child-rearing. “The priority of traditional Japanese fathers is work ... they don’t know what to do even when they come home early,” said Tetsuya Ando. Thus, it is important to study this social and cultural phenomenon to understand the whole structure of Japanese non-traditional security problem that can be seen through the “Fathering Japan” as a new discourse. By using the discourse alternative approach to analyze the role of the social movement of “Fathering Japan” (Ikumen) as the resistance ideology from Japan cultural mythology, the study was conducted by using qualitative methods through the Discourse Analysis by Ernesto and Chantal Mouffe.

Keywords: *fathering Japan, discourse, Non Profit Organization, gender gap, Japan*

ABSTRAK

Fenomena kesenjangan gender di Jepang telah membawa banyak dampak perubahan di Jepang dari tingkat kelahiran yang menurun dan termasuk munculnya Organisasi Non Profit (NPO) yaitu “Fathering Japan” (Ikumen) yang didirikan oleh Tatsuya Ando pada 2006, yang mencoba menyajikan bentuk ideologi perlawanan dari mitos hegemoni “Gender Stereotypes” di Jepang. Ando mendirikan NPO untuk mendorong ayah hadir di masa depan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membesarkan anak. “Prioritas ayah tradisional Jepang adalah pekerjaan ... mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan bahkan ketika mereka pulang lebih awal,” kata Tetsuya Ando. Dengan demikian, penting untuk mempelajari fenomena sosial dan budaya ini untuk memahami keseluruhan struktur masalah keamanan non-tradisional Jepang yang dapat dilihat melalui “Fathering Japan” sebagai diskursus baru. Dengan menggunakan pendekatan diskursus alternatif untuk menganalisis peran gerakan sosial “Fathering Japan” (Ikumen) sebagai ideologi perlawanan dari mitologi budaya Jepang, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui Analisis Wacana oleh Ernesto dan Chantal Mouffe.

Kata kunci: *fathering Japan, diskursus, NPO, ketimpangan gender, Jepang*

¹ Sebagian isi dari tulisan ini sudah pernah dipublikasikan sebelumnya dalam jurnal berjudul : “Fenomena Penurunan Angka Kelahiran di Jepang’ dan Reproduksi kultural perempuan ideal Jepang melau film Oshin karya Shin Togashi 2013.

LATAR BELAKANG

*“My father is a salaryman²
 Who spend his life in crowded trains
 with his head bowed down, and
 his toes trampled on
 oh! How busy he is!
 At the weekend he does as he pleases..
 My daddy is 1 in Japan (Soundtrack
 lagu kartun Osomatsu kun)*

“*A society without fathers*”, begitulah ekspresi dari ungkapan seorang Takeo Doi seorang ahli budaya Jepang yang mengatakan bahwa karakter utama yang tercermin dari masyarakat modern adalah “*fatherless society*”. (Mour & Hirosuke, 2004).

Sejarah modernisasi Jepang dimulai pada masa Meiji yang dikenal melalui slogannya “kejar dan lampau Barat”. Pada masa inilah transformasi Jepang dari negara agraris perlahan berubah menjadi industrialis. Periode ini juga dikenal sebagai arus masuknya globalisasi gelombang ke 2 di Jepang, yaitu gelombang arus segala hal yang berkaitan dengan Barat masuk ke Jepang.

Ketika globalisasi kedua melanda Jepang lahirlah slogan pemerintah Jepang, “*Datsuo Nuo (live Asia go To West!)*” yang mencoba belajar dari Barat dan menerapkan berbagai

² *Salaryman* begitulah sebutan untuk para laki-laki (ayah) kebanyakan di Jepang. *Salaryman* yang secara harafiah berasal dari kata *salary* yaitu *salary* (gaji) dan *man* yaitu orang yang berarti ‘orang gajian’ merupakan profesi yang mendominasi laki-laki (ayah) di Jepang pada masa modern. Laki-laki di Jepang dari generasi Edo, Meiji sampai Hesei (sekarang) merupakan kelompok yang memang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan negara. Upaya pengejaran Jepang dari Barat sampai perolehan Jepang pada posisi negara maju yang paling diperhitungkan di Asia Timur, tentunya tidak terlepas dari peranan para *salaryman* ini. “Pahlawan Kerah Putih” (Mouer & Hirosuke, 2005., 71), begitu julukannya untuk para *salaryman*, dikenal memiliki totalitas dalam kualitas etos kerja yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari semenjak pasca Perang Dunia II, di mana Jepang termasuk diantara banyak negara maju yang memiliki jam kerja paling panjang. Berikut adalah tabel perbandingan lama kerja dalam seminggu antara Jepang dan negara maju lainnya dari tahun 1950-an sampai awal 2000-an.

nilai Barat pada seluruh aspek kehidupan di Jepang. Komitmen pemerintah untuk menyetarakan negaranya dengan Barat ini kemudian dianggap telah berhasil membawa Jepang menjadi salah satu pemain penting dalam laju perekonomian dunia. Di sisi lain komitmen tersebut meninggalkan banyak persoalan, salah satunya yaitu tereliminasi para laki-laki (ayah) di Jepang di dalam keluarganya sendiri.

Tabel. 1.1 *International comparison of weekly hours of work for production worker in manufacturing*

Year	Japan	USA	UK	France	Germany
1956	47.5	40.4	48.2	45.6	47.8
1960	48.1	39.7	47.4	45.7	45.6
1965	44.3	41.2	46.1	45.6	44.1
1970	43.3	39.8	44.9	44.8	43.8
1975	38.8	39.5	42.7	41.7	40.4
		38.6			
1980	42.2	39.7	41.9	40.7	41.6
		42.3	40.6		
1985	46.2	40.5	43.7	38.6	40.7
1990	45.7	40.8	44.3	38.7	39.5
1995	43.5	41.6	42.2	38.7	38.3
1999	42.7	41.7	41.4	n.a	n.a

Sumber: Ross Mouer dan Kawanishi Hirosuke, 2005, 71

Dengan angka jam kerja tersebut dapat dikatakan bahwa *salaryman* atau “pahlawan kerah putih” tidak memiliki waktu luang selain mengabdikan pada perusahaan tempat para *salaryman* tersebut bekerja. Fenomena tersebut tentunya meninggalkan berbagai persoalan, selain ditenggarai sebagai salah satu penyebab menurunnya angka kelahiran di Jepang, karena dianggap terlalu sibuk bekerja, tetapi juga para laki-laki ini kemudian mendapat *stereotype* sebagai “robot-robot” yang kaku dan berhati dingin terhadap keluarga. (Maruko, 2018)

Sebagai “mesin” penggerak ekonomi Jepang, laki-laki (ayah) di Jepang tumbuh dalam budaya yang tidak memiliki sensitivitas terhadap urusan domestik dan anak. Terinternalisasikannya nilai-nilai patriarki yang dikonstruksi oleh pemerintah Jepang dari zaman Edo ini menyebabkan munculnya resistensi dari kelompok feminis Jepang yang menuntut kesetaraan gender di Jepang. Gerakan ini muncul

pada masa restorasi Meiji yang merupakan gelombang pertama Feminisme Jepang, namun dampak dari internalisasi pada masa Edo tidak dapat dihapuskan secara utuh dari masyarakat. Konstitusi Meiji yang disahkan pada 1889 membuat sistem *Ie* (yaitu sistem keluarga tradisional Jepang yang menempatkan laki-laki sebagai pusat hirarki tertinggi dalam segala hal) dihapuskan dari kebijakan pemerintah Jepang. Namun '*Meiji Civil Code*' masih membantah hak-hak perempuan. (Koyama, 2018, 11)

Untuk itu perhatian pemerintah Jepang pun sangat besar pada hal-hal yang menyangkut kewajiban dan hak kaum perempuan pada saat itu. Di antaranya pada tahun 1875 beberapa sekolah untuk perempuan diresmikan, di antaranya adalah *Tokyo Joshi Shihan Gakkō* (*Tokyo Women's Normal School*), *Meiji Jyogakkō* (*Meiji Women's College*) dan *Tokyo Jyogakkō* (*Tokyo Woman School*). Anak laki-laki dan perempuan ditempatkan dikelas yang berbeda. Anak laki-laki diajarkan pengetahuan, strategi, militer dan kekuatan fisik, sedangkan anak wanita diajarkan menjahit, keterampilan, sastra Jepang dan bahasa asing. (Henshall, 2004, 83).

Ayumi Sasagawa (2004, 173) menjelaskan bahwa faktor terpenting yang menyebabkan hari ini perempuan Jepang lebih memilih tetap berada dalam karir atau universitas adalah karena adanya tekanan masyarakat mengenai mitos "*motherhood*", yang secara turun temurun menempatkan perempuan hanya pada kelas terbawah dalam keluarga. Mitos bahwa kehidupan perempuan Jepang itu hanya berkisar pada pengabdian kepada tiga laki-laki yaitu: ayah, suami dan anak laki-lakinya akhirnya membentuk sebuah resistensi pada pergerakan kaum perempuan untuk mengikuti apa yang diidealkan sebagai perempuan Jepang di masa lalu.

Begitu juga dengan laki-laki di Jepang, apabila "*ryousai kenbo*" (*good mother dan wise mother*)" adalah nilai yang diinternalisasikan sebagai nilai dasar bagi perempuan Jepang, maka laki-laki Jepang dididik dengan nilai-nilai kesatria yang tercantum dalam kode etik samurai atau Bushido yang berlaku pada zaman Edo (feodal). Selain memikul tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarganya tetapi laki-

laki dan ayah juga sebagai pusat penentu dalam setiap hal yang disebut sebagai master atau tuan. (Cherry, 1987, 66).

Sebagai master atau tuan, suami atau para laki-laki di Jepang seringkali disalahkan sebagai kelompok yang menyebabkan resistensi dari kelompok feminis progresif Jepang. Semenjak Jepang mengalami penurunan angka kelahiran yang berturut-turut dari tahun 2004, kelompok laki-laki Jepang juga tidak luput dari tuduhan sebagai penyebab dari turunnya angka lahir tersebut. Ketidakhahaman laki-laki Jepang terhadap urusan domestik dan anak menyebabkan kewajiban pengurusan hal-hal yang bersifat domestik dan anak menjadi hak eksklusif kelompok perempuan Jepang saja. Tidak peka, kaku, dan seperti mesin pencetak uang begitulah stereotype para ayah di Jepang hari ini.

Perilaku laki-laki Jepang tersebut disebabkan masih adanya pemahaman yang menganggap perempuan Jepang seperti "swalayan" yang buka selama 24 jam, di mana perempuan diharapkan untuk selalu sigap menyediakan berbagai keperluan pria dari menyediakan makanan, pakaian, kamar mandi, urusan anak, kebersihan rumah dan lainnya. Hal ini pula yang menjadi salah satu di antara banyak alasan perempuan memiliki keraguan untuk menikah.

"Nowadays marriage is no longer as appealing as it used to be...., a young women will hesitate for some time before committing herself to marriage motherhood, to have reconcile work and children—a quasiutopic gamble given the physical exertion and extraordinarily, strong constitution this demands—or resign herself to the gloomy, empty tedium of a housewife's life. Whatever path she chooses, marriage is no longer synonymous with happiness and young women are openly admitting that these days they are not interested in the traditional male who expects his wife to take on all the domestic chores or who only will 'tolerate' her job as long as this does not impinge on his comfort. this days there is no reason to have a mediocre marriage."

(Jolivet, 2004, 164)

Gambaran mengenai wanita yang "ideal" yang harus dilakukan dalam konteks

budaya patriarki Jepang ini juga dapat dilihat dari berbagai pengalaman yang terekam pada berbagai lembaga konsultasi keluarga. Banyak kaum perempuan Jepang yang mengeluhkan kelelahan baik secara fisik maupun mental setelah mereka kelahiran anak pertama. Budaya Jepang menuntut kesempurnaan seorang perempuan dalam mengurus urusan domestik dan anak dan menyebabkan suami menganggap bahwa urusan anak adalah sepenuhnya tanggung jawab perempuan.

"My husband, a business man, always come late and I can go all day without speaking to anyone. Since I became pregnant I have been permanently shut up at home and feel completely cut off from the outside world. All my friends work and my husband comes home so tired that he falls a sleep without saying a word to me; it is so bad that I can go the whole day without having occasion to open my mouth and utter a single word .

(Jolivet, 2004, 11)

Di sisi lain, *sararyman* profesi yang mendominasi para ayah ini luput dari perhatian. Ayah-ayah di Jepang dari generasi zaman Edo, Meiji sampai masa Hesei merupakan kelompok yang memang dibentuk sesuai kebutuhan dan kepentingan negara yaitu untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara Barat yang dikenal melalui slogan "kejar dan lampau Barat!". Sampai kemudian muncullah gerakan "Fathering Japan", sebuah *Non Profit Organization* (NPO) yang dibentuk oleh Tetsuya Ando. Organisasi ini dibentuk pada tahun 2006 sebagai wujud kepedulian Ando terhadap kondisi para ayah di Jepang hari ini. Melalui organisasi ini Ando berharap dapat mendorong perubahan di Jepang sekarang dan kedepannya agar para ayah di Jepang dapat ikut berperan aktif dalam ikut serta membesarkan anak. Saat ini organisasi ini sudah beranggotakan lebih dari 400 ribu orang, yang rata-rata berprofesi sebagai *sararyman*. Ando sendiri adalah seorang ayah dari tiga anak yang membesarkan anak bersama istri yang bekerja sebagai full time worker. *Spirit* Ando dalam membentuk organisasi ini tidak terlepas dari pengalaman hidupnya sendiri yang memiliki pengalaman pahit di masa kecilnya. Dalam pernyataannya Ando mengungkapkan: "*I didn't*

like my own father, who was a negative example to me, so I wanted to become the complete opposite, and become role model".(Maruko, 2018).

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebuah tinjauan tentang "Bagaimana diskursus alternatif yang dilakukan "fathering Japan" (NPO) untuk merubah hegemoni ketidaksetaraan gender di Jepang"?

DISKURSUS DAN DISKURSUS ALTERNATIF

Ernesto dan Chantal Mouffe dalam buku "*Discourse Analysis as Theory and Method*" menjelaskan bahwa pembentukan suatu makna sebagai sebuah proses sosial adalah mengenai fiksasi atau penetapan sebuah makna. Disinilah teori diskursus selanjutnya digunakan untuk memahami proses berjalannya penetapan makna dari suatu simbol, proses yang hingga pada akhirnya berhasil membuat suatu makna dianggap sebagai sesuatu yang natural adanya. Laclau dan Mouffe juga menjelaskan beberapa konsep penting yang dapat membantu memahami teori diskursus sesuai dengan pernyataan nya berikut ini :

"[w]e will call articulation any practice establishing a relation among elements such that their identity is modified as a result of the articulatory practice. The structured totality resulting from the articulatory practice, we will call discourse. The differential position, insofar as they appear articulated within a discourse, we will call moments. By contrast, we will call element any difference that is not discursively articulated."(Jorgensen & Phillips, 2002, 26).

Lebih lanjut Jorgensen & Phillips menjelaskan (2002, 26) bahwa diskursus dilihat sebagai penetapan suatu makna pada suatu area tertentu, setiap simbol di dalam diskursus adalah moments, dan makna dari setiap simbol ditentukan oleh relasinya dengan simbol lainnya. Diskursus juga terbentuk atas penetapan makna dari *nadal point*. *Nadal point* adalah sebuah simbol istimewa yang dapat menentukan makna dari simbol lainnya berdasarkan relasinya

dengan suatu *nadal point*, sebagai contoh pada diskursus medis, tubuh merupakan sebuah *nadal point*, dan simbol-simbol lainnya seperti gejala penyakit, jaringan tubuh dan pisau bedah akhirnya mendapatkan makna masing masing akibat relasinya dengan tubuh.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa didalam diskursus, simbol merupakan sebuah moment berdasarkan relasinya dengan simbol lain. Proses tersebut dilakukan dengan cara mengeksklusi kemungkinan adanya makna lain yang dapat dimiliki oleh suatu simbol. Proses eksklusi makna didalam suatu diskursus ini disebut sebagai “*field of discursiveness*”, sehingga didalam proses ini suatu makna yang dimiliki oleh sebuah simbol pada diskursus lainnya akan dieksklusi pada diskursus tertentu untuk membentuk sebuah kesatuan makna. (Jorgensen & Phillips, 2002, 27)

Namun Laclau dan Mouffe berpendapat bahwa didalam sebuah diskursus suatu kesatuan makna yang tetap tidak semudah itu ditentukan hingga terbentuklah konsep *element*. *Element* merupakan sebuah simbol yang belum memiliki suatu makna tetap karena simbol tersebut memiliki beberapa makna atau polisemik. Sehingga diskursus akan berupaya untuk mengubah element menjadi sebuah moment dengan mereduksi sifat polisemiknya menjadi suatu makna yang tetap melalui *closure*, yaitu dengan menghentikan ketidaktepatan makna pada suatu simbol, meskipun *closure* ini tidak dapat dipastikan berhasil untuk menciptakan suatu makna yang pasti. Laclau dan Mouffe kemudian menjelaskan lebih lanjut, bahwa tubuh dapat dilihat sebagai element karena terdapat beberapa cara untuk memahaminya. Seperti misalnya dalam diskursus medis barat, tubuh dapat direduksi menjadi moment dengan mendefinisikannya secara jelas begitu juga dengan diskursus pengobatan alternatif, namun pada diskursus agama Kristen tubuh menjadi dihubungkan dengan simbol kejiwaan. Dengan ini makna tubuh pun menjadi tidak jelas sehingga harus memiliki sebuah makna, yang terjadi melalui proses *articulation*. (Jorgensen & Phillips, 2002, 27-28).

Articulation merupakan sebuah praktek yang menetapkan relasi antara *elements* yang

kemudian identitas dari *elements* tersebut dimodifikasi. Kata tubuh yang sebelumnya dibahas kini bersifat polisemik dan identitasnya ditentukan dengan relasi kepada kata lainnya melalui *articulation*, seperti relasi antara kata tubuh dan jiwa yang membawa kepada diskursus religi. Tubuh pun kini bisa menjadi *nadal point* bagi diskursus medis dan juga element dalam waktu yang bersamaan, sesuai penjelasan sebelumnya *nadal point* merupakan simbol istimewa didalam sebuah dikursus, namun simbol ini tidak memiliki makna apapun ketika berdiri sendiri, maka dari itu simbol tubuh ini dapat menjadi element juga. *Floating Signifiers*, merupakan istilah yang digunakan Laclau dan Mouffe terhadap sebuah element yang dapat memiliki berbagai makna. *Floating Signifiers* diartikan sebagai simbol yang diperdebatkan oleh berbagai diskursus untuk menentukan makna tetapnya, dengan demikian tubuh menjadi *nadal point* bagi diskursus medis, dan juga menjadi *floating signifiers* diantara perdebatan oleh diskursus medis dan diskursus pengobatan alternatif. (Jorgensen & Phillips, 2002, 28-29).

Edward said dalam karyanya Orientalisme (1979) memfokuskan telaah pada dimensi diskursus kolonialisme. Said (1979, 3) dengan kritis meneliti cara Orientalisme, sebagai sebuah diskursus, yang menggambarkan timur secara “politis, sosial, militer, ideologis, ilmiah, dan imajinatif”. Secara akademis, Orientalisme terwujud dalam sebuah fenomena yang didasarkan pada ekspansi baru, tetapi juga sekumpulan teori yang dibangun dari beberapa asumsi, kepercayaan, dan ideologi seperangkat disiplin yang mempelajari Timur. Ciri utama Orientalisme adalah adanya pembagian Timur-Barat yang menempatkan masyarakat Barat, secara kebudayaan, religi, dan bahasa Barat lebih unggul daripada Timur. Orientalisme adalah sebuah gaya pemikiran yang didasarkan pada perbedaan ontologis dan epistemologis antara “Timur” dan (kebanyakan) “Barat”. (Alatas, 2010, 28-29).

Dalam hal ini gerakan non-profit ‘*Fathering Jepang*’, dapat dikatakan merupakan gerakan sosial yang mencoba hadir ditengah hegemoni nilai tradisional Jepang yang mencoba untuk membentuk diskursus baru ditengah

mitos stereotype gender tersebut. Bahwa nilai tradisional seperti pembagian peran melalui “*ryousai kenbo*” (*wise mother and good mother*) dan juga kode etik samurai yang berlaku bagi laki-laki pada masa feodal dulu telah membentuk karakter keluarga tradisional Jepang yang juga berpengaruh terhadap dinamika perkembangan keluarga modern Jepang saat ini. Untuk itu gerakan ini merupakan gerakan yang mengkritisi dikotomi peran laki-laki dan perempuan tradisional Jepang dengan mencoba membuat diskursus baru atau sebagai diskursus alternatif dari hegemoni nilai yang sudah ada sebelumnya.

BUDAYA PATRIARKI DAN KETIDAKSETARAAN GENDER DI JEPANG

Menarik untuk mengkaji persoalan ketidaksetaraan gender di Jepang dengan sebelumnya menelusuri terlebih dahulu budaya patriarki Jepang. Sebagai negara yang dikenal selalu memegang nilai-nilai luhur, Jepang hari ini berhasil membangun imaji sebagai negara yang dianggap berwajah dua yaitu dimana kemajuan atau modernisasi mendominasi hiasan perkotaan dan di satu sisi balutan nilai-nilai tradisional masih juga melekat dan dipelihara. Dalam sejarahnya pembagian peran gender di Jepang sudah terjadi pada masa awal dari zaman feodal keshogunan Edo (1603-1868). Dibawah kekuasaan Tokugawa, pemerintahan Jepang didominasi oleh pria. Di masa inilah peranan baik laki-laki dan perempuan Jepang telah diatur secara tertulis yang menjadi falsafah kehidupan masyarakat Jepang melalui kode etik samurai yang berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan. (Widarahesty & Ayu, 2016).

Pada praktiknya walaupun dominasi kelompok laki-laki di Jepang telah berjalan dari masa monarki sampai feodal namun dalam perjalanan sejarahnya perempuan Jepang ternyata juga telah berkontribusi sangat besar terhadap negara. Pada masa perang Dunia II misalnya, perempuan-perempuan Jepang hadir mengisi kekosongan peran laki-laki dalam bidang industri di Jepang. Pada masa modernisasi ke II inilah awal dari perempuan-perempuan Jepang hadir menjalani dualisme fungsi, yaitu

bertanggung jawab secara domestik dan juga sebagai penunjang finansial.

Kondisi tersebut tentu berbeda sekali dengan kondisi perempuan Jepang pada saat masa feodal, dimana nilai-nilai tradisional sangat memberlakukan peraturan yang sangat ketat dan kaku untuk perempuan Jepang. Hal tersebut dapat dilihat pada sebuah teks “moral” yang dibawa oleh Kaibara Ekken (1630-1714) yaitu *Onna daigaku (Greater Learning for Women)* yang menyarankan wanita untuk “tidak pergi keluar rumah untuk urusan yang bukan kebutuhan, tapi tetap tinggal dirumah, menjahit pakaian untuk mertua mereka, memasak makanan, melayani suami, mencuci dan melipat pakaian, menyapu lantai dan membesarkan anak”(Sakai, 1939, 43-56) bahkan wanita harus dapat menerima keabsahan 7 alasan pria menceraikan mereka, meliputi ketidakpatuhan, banyak bicara (cerewet) dan kemandulan, boros, mencuri uang suami, melawan mertua dan lain-lain.

Idealisasi perempuan Jepang ini dapat dilihat dari gambaran-gambaran tentang perempuan ideal Jepang pada zaman Edo dan Meiji yang dikenal dengan sebutan “*Edo Mama*” dan “*Meiji Mama*”. Dalam sebuah ajaran *Bushido (the code of Samurai)*, dijelaskan secara terperinci apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban dari seorang perempuan khususnya setelah menikah. Dalam ajaran tersebut menjelaskan bahwa ketika sudah menikah dan menjadi seorang ibu maka menjadi mulia apabila dalam kesehariannya dia (ibu) menjadi yang paling awal bangun daripada anggota keluarga lainnya dan yang paling akhir tidur dari anggota keluarga lainnya. Hal ini seperti yang digambarkan melalui kisah Takuma Takeshi (generasi 1990-an) tentang ibunya:

“No one of my generation ever saw his mother asleep. By the time I got up in the morning, mine had already been up for some time, busy preparing my breakfast and packing lunch for school. At night, while I was sleeping, mother would be darning socks or busy doing something else. I have no idea when she went to bed.” (Jolivet, 2004, 109)

Kisah mengenai ibu dari Takuma Takeshi diatas adalah satu diantara banyak cerita ibu-ibu Jepang pada jaman Edo dan Meiji. Idealisasi peranan perempuan ini juga terekam

dalam sebuah kisah yang sangat terkenal dalam sejarah sinema Jepang, yaitu kisah tentang seorang perempuan yang tegar dan kuat dalam menjalani kehidupannya dari menjadi seorang anak perempuan, istri, menantu dan menjadi ibu, kisah itu adalah "Oshin".

"Oshin is the name of the heroine of television drama that went out twice a day for a year, whose viewing figures broke all previous records (98 percent). Oshin is much more than the epitome of the good wife and wise mother, she is courageous, hard working and preservering."

(Jolivet, 2004, 107)

Hirai Nobuyoshi menjelaskan bahwa kesuksesan yang luar biasa yang diraih dari drama "Oshin" ini dikarenakan "Oshin" telah berhasil menggambarkan perempuan ideal yang dibentuk sesuai budaya patriarki Jepang di masa sebelum perang. Otoritas yang besar terletak pada laki-laki menempatkan perempuan sebagai kelompok yang tunduk dan taat kepada superioritas laki-laki. Pengorbanan yang didedikasikan kepada suami, ibu dari suami dan anaknya adalah sebuah simbol perjuangan yang menjadikannya sebagai "good mother" dan "wise mother". (Jolivet, 2004, 108).

Gambaran mengenai wanita "ideal" yang bagaimana yang harus dilakukan dalam konteks budaya patriarki Jepang ini juga dapat dilihat dari berbagai pengalaman yang terekam pada berbagai lembaga konsultasi keluarga. Banyak kaum perempuan Jepang yang mengeluhkan kelelahan baik secara fisik maupun mental setelah mereka memiliki pengalaman pada anak pertama yang dimilikinya. Bahwa budaya Jepang yang menuntut kesempurnaan seorang perempuan dalam mengurus urusan domestik dan anak menyebabkan banyaknya suami yang akhirnya menganggap bahwa urusan anak adalah sepenuhnya tanggung jawab perempuan.

Hal tersebut akhirnya menjadi satu diantara alasan banyak wanita Jepang saat ini yang memutuskan hanya memiliki satu anak atau dalam istilah Jepang disebut dengan fenomena "hitoriko" sebagai bentuk resistensi dari langgengnya budaya patriarki di Jepang. *Hitoriko* adalah suatu kondisi pasca melahirkan disaat banyak wanita membutuhkan banyak bantuan tangan dari berbagai pihak, tetapi

justru dalam budaya masyarakat Jepang wanita diharuskan menghadapinya seorang diri. Hal tersebut merupakan kebiasaan masa lalu dimana idealnya keberhasilan wanita dilihat dari kemampuannya mengatur secara alami dan mandiri hal-hal terkait "motherhood". Budaya inilah yang menyebabkan banyak wanita Jepang mengalami depresi yang berkepanjangan.

Kemandirian ini dalam budaya masyarakat Jepang juga dikenal sebagai "Mother Ideology" yang terkenal dengan ungkapannya yaitu "okaasan gambareron" (Jolivet, 2004, 9) yang artinya "ayo ibu jangan menyerah". Namun yang terjadi justru mendorong gerakan perempuan yang tidak lagi dapat menerima suatu kondisi yang menempatkan perempuan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap urusan yang bersifat "motherhood".

"The drop in the birthrate shows that Japanese women are finding it increasingly it difficult to accept the terms and conditions of motherhood". (Jolivet, 2004, 1)

Budaya patriarki ini juga dapat dilihat melalui tiga kata yang sangat terkenal dalam budaya Jepang yang wajib dikerjakan isteri-isteri di Jepang, tiga kata tersebut adalah; Meshi! Furo! Neru!, (makan! mandi! tidur!) tiga kata tersebut menjadi tiga kata yang fenomenal yang paling sering diucapkan oleh suami-suami di Jepang seiring dengan keberhasilan Jepang menjadi negara "miracle economy", bahkan ada sebuah *joke* menyatakan bahwa laki-laki Jepang begitu luar biasa sibuk sehingga hanya tiga kata tersebut yang sempat mereka ucapkan di rumah. (Cherry, 1987, 62) *Meshi!* artinya siapkan makan yang biasa diucapkan suami-suami Jepang sepulang dari lembur bekerja pada malam hari, lalu *furo!* yaitu siapkan air hangat untuk mandi, dan *neru!* siapkan tempat tidur untuk tidur.

RESPON PEMERINTAH JEPANG TERHADAP KETIDAKSETARAAN GENDER

Perempuan Jepang hari ini dianggap telah mencapai perkembangan yang luar biasa. Modernisasi dianggap telah berhasil membawa perubahan signifikan pada level pendidikan untuk perempuan Jepang. Saat ini perempuan

Jepang dianggap lebih senang untuk mengejar pendidikan di Universitas dengan persentase yang lebih tinggi angkanya ketimbang laki-laki, yaitu 59% untuk perempuan dan 52% untuk laki-laki. Namun tetap saja persoalan ketidaksetaraan gender masih banyak terjadi di Jepang. Menurut penelitian angka ketidaksetaraan tersebut terus meningkat dari 15% terus meningkat menjadi 40% yang ditandai dengan kesulitan perempuan-perempuan Jepang untuk bisa memperoleh posisi berpengaruh atau level atas di dalam suatu organisasi atau perusahaan. (OECD, 2007)

Berdasarkan Forum Ekonomi Dunia, Jepang merupakan salah satu negara terburuk dalam implementasi kesetaraan gender bila dibandingkan dengan negara-negara maju dunia lainnya. Bahkan posisi Jepang dalam persoalan kesetaraan gender berada dibawah Tajikistan dan Indonesia pada tahun 2014, dan pada tahun 2017 peningkatan perempuan di dunia kerja memang signifikan tetapi angka perempuan Jepang dalam bidang politik masih terbelah rendah. (Economic Forum, 2017)

Ketidaksetaraan tersebut juga diakui oleh perempuan Jepang dalam persoalan kehidupan pribadi, yaitu kesulitan tentang bagaimana dapat mengatur atau menyetarakan kehidupan bekerja dan urusan domestik rumah bagi perempuan yang sudah bekerja. Pemerintah Jepang sudah membuat sebuah kebijakan untuk menanggulangi persoalan tersebut dengan menyediakan lembaga penitipan anak (*child care*). Namun tetap saja pilihan yang akhirnya ditempuh oleh perempuan Jepang adalah meninggalkan pekerjaan atau karirnya atau sampai pada keputusan untuk tidak menikah.

Pilihan tersebut memang merupakan pilihan yang dilematis dan sulit bagi perempuan Jepang, namun hal tersebut menjadi fenomena umum dikarenakan kebijakan di lapangan atau perusahaan terkadang belum bersinergi dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, disisi lain adalah adanya persoalan budaya masyarakat Jepang yaitu laki-laki Jepang yang memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat sedikit untuk persoalan parenting dan domestik. Hal tersebut tentunya ditunjukkan

dengan budaya jam kerja laki-laki di Jepang atau budaya lembur yang sangat panjang.

Sebagai respon terkait persoalan ketimpangan gender tersebut, pemerintah Jepang membuat berbagai kebijakan. Berikut adalah 15 prioritas kebijakan pemerintah Jepang yang mengatur terkait persoalan gender yang dilihat dari hasil implementasi deklarasi Beijing(2000):

Isi dari deklarasi Beijing tersebut yaitu: *15 Priority Fields in the Basic Plan (those with a star were newly set (i) Expansion of women's participation in policy decision-making processes; (ii) Reconsideration of social systems and practices and raise awareness from a gender-equal perspective (iii) Gender equality for men and children; (iv) Securing of equal opportunities and treatment between men and women in employment; (v) Men's and women's work-life balance; (vi) Promotion of gender equality aimed at bringing about vibrant agricultural, forestry, and fisheries communities; (vii) Support for men and women facing living difficulties such as poverty; (viii) Creation of an environment in which people such as the elderly, the disabled, and non-Japanese people can live comfortably; (ix) Elimination of all forms of violence against women; (x) Support for women's lifelong health; (xi) Enhancement of education and learning to promote gender equality and to facilitate diversity of choice; (xii) Gender equality in science and technology and academic fields; (xiii) Promotion of gender equality in the media; (xiv) Promotion of gender equality in the area of regional development, disaster prevention, environment, and others; (xv) Respect for international regulations and contributions to the "Equality, Development and Peace" of the global community.*

Dari kebijakan yang telah disusun dalam 15 prioritas tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah Jepang telah mengupayakan terciptanya kesetaraan gender di Jepang, yang tentunya diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan tersebut bukan saja dibuat demi kepentingan kelompok baik laki-laki atau perempuan saja, namun pemerintah disini juga memiliki kepentingan khusus agar terciptanya kondisi yang setara tersebut dapat bersinergi dengan kondisi perekonomian Jepang saat ini, yang mana kontribusi baik dari laki-laki dan perempuan sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi Jepang. Namun tentunya

implementasi tersebut masih sulit diukur keberhasilannya saat ini. Terutama budaya patriarki yang sudah melekat bagaikan mitos cukup sulit untuk dibongkar formasinya. Apalagi fenomena jam kerja berlebih atau lembur untuk pegawai menjadi kendala tersendiri dalam membongkar mitos terkait *gender stereotype* di Jepang ini.

Budaya jam kerja yang panjang atau budaya lembur itu sendiri, memang bukan hal yang baru di Jepang. Budaya kerja tersebut sudah menjadi warisan budaya hasil dari masa kemonarkian Jepang beratus-ratus tahun lalu lamanya. Melalui kerajaan Yamato, nilai semangat kerja termaktub dalam falsafah bangsa Jepang melalui undang-undang pertamanya yang disebut dengan "*Jyuu nana kenpou*" yaitu undang-undang 17 pasal yaitu pasal 8,9 dan 10. Isi dari pasal tersebut menitikberatkan pada aspek tanggung jawab pekerjaan. Nilai-nilai yang diambil dari berbagai ajaran seperti konfusius dan buddha banyak mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Jepang, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, seperti berikut ini diantaranya adalah menitikberatkan pada persoalan tanggung jawab kerja. (Koyu, 2006, 360)

- 1) Bersahabatlah dengan sesama manusia, dan saling bekerja sama adalah hal yang utama,
- 2) Percayalah terhadap isi dari ajaran Buddha,
- 3) Janganlah memerintah (menyuruh) *Tenno*,
- 4) Para pekerja negara haruslah memiliki jiwa hormat dan rasa terima kasih,
- 5) Kalau rasa hormat itu dipelihara maka alam akan seimbang,
- 6) Apabila para pekerja negara menerima gugatan yang dikeluhkan dari masyarakat, maka janganlah menyelesaikannya dengan menerima suap,
- 7) Berani mengatakan bahwa yang salah itu salah dan yang benar itu benar, karena ini sudah menjadi kebiasaan bangsa Jepang sejak dahulu,
- 8) Bekerjalah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing,
- 9) Para pekerja bekerjalah dari pagi-pagi sekali sampai larut malam dengan penuh semangat,
- 10) Pondasi manusia adalah ketulusan, kalau setiap pekerja memiliki ketulusan dalam bekerja, maka dia akan memperoleh pencapaian yang baik,
- 11) Janganlah pernah menunjukkan wajah marah, dan memaksakan kehendak sendiri terhadap

- yang lain,
- 12) Barangsiapa bekerja keras dia akan mendapat pujian,
- 13) barangsiapa banyak melakukan perbuatan buruk maka ia akan tercela,
- 14) Lakukanlah pekerjaan dengan perasaan penuh kewajiban dengan mengetahui pekerjaan tersebut dengan baik,
- 15) Kepala negara adalah kaisar,
- 16) Kaisar tidak perlu membayar pajak,
- 17) Janganlah iri hati/ dengki.

Kemampuan Jepang dalam mengejar ketertinggalannya dari bangsa Barat menjadi perhatian dunia terutama ketika Ezra Voegl melalui karyanya yang ternama berjudul "*Japan as Number One*" muncul menjadi alternatif baru ditengah hegemon bangsa barat khususnya Amerika. Semenjak itu, perhatian dunia tertuju kepada Jepang. Keberhasilan ini menjadi perhatian banyak pihak. Bagaimana Jepang dianggap mampu bangkit dari keterpurukan akibat kalah perang pada masa Perang Dunia II. Setelah itu segala hal yang tercipta dari anak bangsa terbalut dari rasa nasionalisme yang tinggi. Semua produk-produk Jepang mampu menyaingi produk bangsa barat, bahkan mengalihkan dan menjadi *newcomer* sebagai kekuatan baru di Asia.

Tentunya semua itu tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia Jepang. "Pahlawan-pahlawan kerah Putih" seperti yang sudah dijelaskan di atas memiliki andil dan kontribusi yang luar biasa dalam membangun Jepang pada masa modernisasi. Ayah atau laki-laki Jepang memang dibentuk sebagai penopang ekonomi, hal tersebut bersinergi dengan kebijakan pemerintah Jepang yang berkiblat pada neoliberalisme. Aura kapitalisme dan liberalisme menjadi bahan bakar yang terus diusung oleh elit kuasa dalam membangun kesadaran semu masyarakatnya, yaitu loyalitas pada perusahaan yang seakan menjadi "keharusan", yang mencerminkan integritas dan kualitas seseorang.

Pada akhirnya ketidaksetaraan gender yang selama ini diperjuangkan dan disuarakan oleh kelompok perempuan Jepang dalam ranah kerja, karir ataupun pendidikan, seyogyanya juga menjadi pertarungan kelompok laki-laki di Jepang. Budaya patriarki yang dipersoalkan sebagai salah satu penyebab turunnya angka demografi di Jepang, "robot" yang "kaku"

dan “berhati dingin”, serta berbagai julukan yang ditujukan kepada para lelaki Jepang, sebetulnya menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ini berada pada dua arah. Artinya baik laki-laki dan perempuan Jepang keduanya merupakan bagian dari “korban” diskursus Pemerintah yang berusaha mengatur dengan powernya terhadap tubuh manusia agar patuh dan taat. Konstuksi tersebut terlihat melalui idealisasi nilai-nilai “ryousai kenbou” bagi perempuan Jepang, dan sistem keluarga Ie yaitu sistem keluarga tradisional Jepang. Walaupun sistem keluarga tradisional Ie tersebut sudah dihapuskan pasca PD II dalam konstistusi 1947, namun bagi sebagian masyarakat Jepang hal tersebut masih menjadi landasan kehidupan keluarga mereka.

Sebagai orang yang diposisikan paling bertanggung jawab pada “rumah“ dan seisinya, maka dalam pandangan masyarakat Jepang setiap fenomena yang terjadi dalam masyarakat Jepang seperti degradasi nilai pada generasi muda, kekerasan dalam sekolah, semua perhatian akan tertuju kepada perempuan. Masyarakat akan menyalahkan karena hal tersebut tidak akan terjadi apabila mereka patuh dan berkonsentrasi dalam mendidik anak di rumah bukannya sibuk bekerja. (Jolivet, 2004, 78). Dalam budaya Jepang, peranan ibu sangatlah besar dalam mengantarkan anak dari satu gerbang ke gerbang lainnya dari TK, SD, SMP, SMA sampai bangku kuliah keberhasilan tersebut berada di tangan seorang ibu, budaya ini dikenal dengan sebutan “*kyouiku mama*“ (Jolivet, 2004, 120) atau didikan ibu.

Disisi lain seorang ayah dalam budaya masyarakat Jepang memang diposisikan sebagai tuan atau master yang bertanggung jawab secara finansial dalam keluarga, bukan mengurus urusan anak dan domestik. Pembagian peranan inilah yang menjadi resistensi kelompok feminis Jepang, ketika modernisasi sudah berhasil menggeser peranan perempuan yang tadinya hanya di rumah, kini mampu menempatkan perempuan juga sebagai aktor penyokong finansial. Sayangnya, dalam urusan domestik tidak ada pergeseran peranan yang dilakukan oleh suami dalam upaya membantu urusan domestik dan anak. Alih-alih sebagai ideologi “*gambareron mama*“, hal ini justru menjadi hal yang sangat

memberatkan bagi kaum perempuan Jepang. Pada akhirnya pilihannya adalah menjadi “*good mother*“ dengan totalitas di rumah atau “*career women*“ tanpa memiliki anak yang kemudian kembali menuding perempuan sebagai akar permasalahan yang menyebabkan penurunan angka kelahiran karena terlalu egois dalam memikirkan dirinya sendiri. Fenomena resistensi ini terjadi karena berdasarkan pandangan Juliet Mitchell bahwa kunci bagi penindasan atas perempuan terletak dalam ”peran ideologis dan sosio-ekonomi sebagai ibu dan pengurus rumah tangga“. Menurutnya subordinasi perempuan ditopang melalui ”*hegemoni maskulin*“ yang beroperasi pada ”keluarga sebagai unit ekonomi“. (Widarahesty & Ayu, 2016)

Akibatnya, bagi laki-laki Jepang ketidaksetaraan tersebut terletak pada kepemilikan ranah domestik dan kepengurusan anak secara eksklusif yang hanya menjadi milik perempuan saja. Kesibukan luar biasa dari ayah-ayah di Jepang berdampak pada minimnya waktu yang dimiliki dengan anak-anak mereka. Bahkan, diperkirakan sekitar 16.1 persen ayah-ayah di Jepang sama sekali tidak memiliki kontak dengan anak-anak mereka dan tidak ingin mengganti waktu yang hilang tersebut di saat liburan. (Jolivet, 2004, 64) Menurut ahli antropologi Jepang, Kara Hiroko, yang menyebabkan laki-laki tidak tertarik ikut ambil bagian dalam urusan domestik dan pengurusan anak adalah karena hal-hal yang terkait dengan urusan anak menjadi milik eksklusif kaum perempuan dan tidak pernah ada studi yang merekam atau mengajarkan laki-laki melakukan hal yang berkaitan dengan anak. (Jolivet, 2004, 64)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Yamaguchi yang menjelaskan bahwa ada beberapa ide yang menjadi kata kunci yang menyebabkan persoalan gender hari ini masih hadir di Jepang, yaitu: (Kincaid, 2016):

“Men should work outside the home, Genders should be brought up differently, Women are more suited to household work and child rearing than men., Full time housewives are valuable to society because of their family raising role.”

Untuk itu pemerintah Jepang saat ini gencar dalam mengkampanyekan upaya terciptanya

kesetaraan gender, berbagai upaya dilakukan dari kebijakan perusahaan yang harus dirubah dan diselaraskan dengan kondisi maternal perempuan sampai kebijakan *Abenomics* dan *womenomics* yang diusung oleh pemerintah Shinzo Abe. Adapun hal tersebut juga dapat dilihat melalui 15 prioritas “*Basic Plan*” untuk upaya tercapainya kesetaraan gender di Jepang berikut ini (Basic Plan Gender Equality, 2016):

1) *Proportion of female candidates to be members of the House of Representatives: 16.7% (2009) →30% (2020)*, 2) *Proportion of female candidates to be members of the House of Councilors: 22.9% (2010) →30% (2020)*, 3) *Proportion of female public prosecutors: 18.2% (2009) →23% (end of fiscal 2015)*, 4) *Proportion of female national public employees through the recruitment examination: 26.1% (fiscal 2010) →approx. 30% (end of fiscal 2015)*, 5) *Proportion of female national public employees through the Level I recruitment examination (University graduate level) for national civil service: 25.7% (fiscal 2010) →approx. 30%*, 6) *Proportion of women in government positions equivalent to or higher than director of central government regional organizations or assistant director of central government ministries and agencies: 5.1% (fiscal 2008) →approx. 10% (end of fiscal 2015)*, 7) *Proportion of women in government positions equivalent to or higher than the director of the central government ministries and agencies: 2.2% (fiscal 2008) →approx. 5% (end of fiscal 2015)*, 8) *Proportion of women in positions equivalent to designated central government positions: 1.7% (fiscal 2008) →approx. 3% (end of fiscal 2015)*, 9) *Percentage of male national public employees who take child care leave: 0.7% (fiscal 2008) →13% (2020)*, 10) *Proportion of female members of national advisory councils and committees: 33.2% (2009) →between 40% and 60% (2020)*, 11) *Proportion of female expert members of national advisory councils and committees: 16.5% (2009) →30% (2020)*, 12) *Proportion of female local public employees through the recruitment examination for prefectural governments (advanced level examination) 21.3% (2008) →approx. 30% (end of fiscal 2015)*, 13) *Proportion of women in positions equivalent to or higher than the director of a prefectural government office: 5.7% (2009) →approx. 10% (end of fiscal 2015)*, 14) *Percentage of male local public employees who take child care leave: 0.6% (fiscal 2008) →13% (2020)*, 15) *Proportion of female members of prefectural government advisory councils and committees: 28.4% (2009) →30% (2015)*, 16) *Proportion of female members of city, town, or village government advisory councils and committees: 23.3% (2009) →30% (2015)*, 17) *Proportion of women in*

positions equivalent to or higher than section manager level in private corporation 6.5% (2009) →approx. 10% (2015)

Menarik kemudian untuk mencermati bahwa dari prioritas ‘*basic plan*’ yang dicanangkan oleh pemerintah Jepang terdapat upaya peningkatan angka partisipasi laki-laki dalam pengurusan anak yaitu dari angka 0,7 % pada tahun 2008 diharapkan meningkat menjadi 13 % pada tahun 2020. Hal ini tentu dilakukan oleh pemerintah Jepang sebagai upaya menanggulangi kondisi krisis demografi yang terus mengalami penurunan dari tahun 2004. Kemudian berikut adalah apa yang dilakukan oleh kelompok organisasi non-profit yang didirikan oleh para ayah di Jepang dalam upayanya ikut serta membentuk diskursus baru terhadap fenomena demografi yang diperkirakan mengancam keamanan Jepang saat ini.

DISKURSUS ALTERNATIF NPO FATHERING JEPANG (*IKUMEN*)

“Looking back I think it would be nice if I had openly admitted to my role as a father, and told everyone else what it is like being a father.”
(*Fathering Japan*, 2016)

Pada dasarnya gerakan ini berdiri untuk menciptakan ayah-ayah yang ‘bahagia’ di Jepang. Karena dengan ayah yang ‘bahagia’ maka ibu pun juga akan ‘bahagia’ dan begitu juga dengan anak-anak mereka. Hal tersebut menjadi hal yang mendesak bagi masyarakat Jepang, dikarenakan krisis yang dialami oleh orang tua pasca melahirkan sangat besar, dan tidak hanya menyerang kalangan Ibu-ibu saja, tetapi juga kalangan ayah di Jepang.

Hal tersebut dapat terlihat dalam beberapa keluhan dari ibu-ibu Jepang yang terekam melalui *Childrearing neurosis baby line* yang menggambarkan kondisi mereka setelah kelahiran anak pertama mereka (Widarahesty & Ayu, 2016, 11):

“As I am nearing the end of my pregnancy, we have just moved into a flat on the eight floor of an eleven-storey block. We have a lot more space and room at last for the baby’s cot. And yet, when I look out over the alien landscape outside my window,

*I cannot hold back my tears when I see the Sky.
I must confess that once my husband has left for
work, no one ever comes to see me and I never go
out. All day I am subconsciously waiting for my
husband to return.”*

*”My husband, a business man, always come late
and I can go all day without speaking to anyone.
Since I became pregnant I have been permanently
shut up at home and feel completely cut off from the
outside world. All my friends work and my husband
comes home so tired that he falls a sleep without
saying a word to me; it is so bad that I can go the
whole day without having occasion to open my
mouth and utter a single word “*

Karakteristik utama pengasuhan di Jepang yaitu peran ibu lebih besar dibandingkan dengan peran ayah (Reiko, 2007, 36). Adanya sistem keluarga inti (*kaku kazoku*) di Jepang, yang anggota keluarganya terdiri dari ayah, ibu dan anak, mengharuskan orang tua untuk merawat anak mereka sendiri karena penggunaan pramusiwi (*baby sitter*) dan *daycare* apalagi pembantu sangat jarang di Jepang, sehingga ibu menjadi satu-satunya orang yang dianggap paling bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Rendahnya keterlibatan ayah dalam hal pengasuhan sangat erat kaitannya dengan pekerjaan sang ayah dimana kondisi pekerjaan dengan jam kerja yang sangat panjang, membuat ayah sulit berpartisipasi dalam hal mengurus anak. (Muhayaroh, 2015)

Menurut Takeshi Tamura dalam jurnalnya yang berjudul *The Development of Family Therapy and The Experience of Fatherhood in Japanese Context* mengatakan bahwa pada zaman Edo (1600 – 1868), ayah berperan penuh dalam pengasuhan anak, namun setelah Perang Dunia II di mana industrialisasi berkembang pesat, keterlibatan ayah dalam pengasuhan kemudian menghilang ketika muncul konsep *katei* (rumah tangga). Ayah diharapkan berperan di ruang publik untuk pembentukan bangsa modern dan pada saat itu *salaryman* menjadi lambang dari maskulinitas di Jepang dan juga sebagai lambang dari kesuksesan (Tamura, 2011; Muhayaroh, 2015).

Upaya yang dilakukan oleh NPO “*fathering Japan*” dalam upayanya untuk membangun

wacana baru lebih banyak berfokus pada bidang pendidikan, memberikan ceramah di perusahaan dan universitas lebih dari 200 kali dalam setahun dan memegang lokakarya buku bergambar untuk ayah dan anak-anak untuk mendukung ayah yang ada dalam pernikahan ataupun ayah single. Proyek-proyek lain yang dijalankan oleh NPO termasuk memberikan sumbangan bagi mereka yang tertimpa bencana gempa dan tsunami 2011, dan untuk keluarga tunggal ayah melalui French Toast Fund. Hal ini juga mendorong pemerintah untuk mendukung ayah tunggal yang menghadapi kesulitan keuangan dan psikologis.

Gerakan “*Fathering Japan*” dan Ando juga berupaya melalui promosi yang berada dibawah proyek kementerian kesejahteraan. Mereka mempromosikan partisipasi laki-laki dalam “*ikuji*,” atau membesarkan anak, sehingga gelombang kecil perubahan telah diubah masyarakat Jepang, baru-baru ini dalam bentuk dua amandemen. Yang pertama yaitu amandemen hukum pada tahun 2009 yang berisi tentang undang-undang cuti perawatan anak, yang memberikan ibu dan ayah hak untuk mendapatkan waktu hingga 12 bulan cuti sampai anak mencapai usia 14 bulan secara bertahap, agar lebih banyak perusahaan mendorong ayah untuk mengambil cuti dan menemani keluarganya. Sebelum itu, setiap orang tua diizinkan untuk mengambil cuti sebelum anak mereka menginjak usia 12 bulan. Perubahan lain, yaitu pada tahun 2010 disediakan untuk tunjangan pengasuhan anak untuk keluarga tunggal ayah, bukan hanya keluarga tunggal ibu.

Kelompok “*Fathering Japan*” ini juga menginspirasi Proyek *Ikumen* dimana sejak diluncurkan oleh pemerintah yang dimulai tahun 2010 yang dibentuk oleh Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja dan Welfare, dan pada tahun 2010 sampai dengan saat ini sudah ada 1.684 ayah yang menyatakan diri menjadi *ikumen* melalui proyek website *ikumen*.

Setelah itu, *Ikumen* menjadi salah satu kata yang paling populer di Jepang, dan ada banyak proyek oleh pemerintah yang dibuat berkaitan dengan Proyek *Ikumen*, dari film, drama, buku dll. Saat ini gerakan ini sudah menyebar ke 10 cabang di beberapa propinsi di Jepang dan

pemerintah juga memberikan dukungan finansial sebesar 5000.000 US Dollar. (Yan, 2016).

KESIMPULAN

Kebangkitan gerakan feminis telah menyebabkan pergeseran dalam peran gender dan juga pandangan terkait peran ayah. Ikumen sebagai wacana alternatif (*counter image*) dari dominasi atau hegemoni mitos stereotipe jender kemudian berkembang sebagai gerakan akar rumput. Mereka berhasil menarik perhatian media dan juga berhasil menarik perhatian pemerintah dan publik. Dampaknya, gerakan yang awalnya hanya berkisar komunitas berkembang sebagai gerakan ikumen yang didukung oleh pemerintah dan menjadi bagian dari upaya penanggulangan penurunan angka kelahiran di Jepang. Melalui diskursus ini diharapkan projek Ikumen Jepang ini dapat menjadi “imajinasi” Ideal untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan jender dalam kehidupan modern Jepang saat ini. Anggapan laki-laki Jepang yang selama ini dijuluki sebagai “pahlawan kerah putih” demi kenaikan laju ekonomi Jepang, ternyata justru menjadikan mereka sebagai kelompok yang tereliminasi dari kehidupan keseharian mereka sendiri. Namun terlepas dari keinginan atau upaya gerakan kelompok laki-laki ini untuk mendapatkan kembali tempatnya di ranah domestik dan berupaya menjadi “ayah yang bahagia”, dan juga upaya kelompok perempuan untuk meraih kesetaraan gender dalam berbagai aspek, bagi pemerintah Jepang sendiri diskursus baru (alternatif) ini penting, tentunya mengingat keduanya baik laki-laki maupun perempuan Jepang tersebut adalah jantung penggerak laju ekonomi Jepang hari ini dan ke depannya.

Tulisan ini mendapatkan Dana Hibah Dikti Dosen Pemula periode 2016. Untuk itu Ucapan Terima Kasih penulis tujukan kepada DIKTI dan juga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M UAI yang telah memberikan dukungan dana seminar bagi penulis sebagai pemakalah dalam Simposium Internasional Aprish 2016.

PUSTAKA ACUAN

Alatas, S. F. (2010). *Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia*. Bandung: Mizan Media Utama.

Atsuharu, S. (1939). “Kaibara Ekken and Onna Daigaku”. *Cultural Nippon*.

Cherry, K. (1987). *Women’s Word What Japanese Say About Women*, Kodansha International. Tokyo and New York

Haryono, E. dan Saptopo B. Ilkodar. (2005). *Menu-lis Skripsi Panduan Untuk Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Henshall, G. K. (2004). “A History of Japan; from Stone Age to Super Power, 2nd Edition. New York: Palgrave macmillan.

Jolivet, M. (2004). *Japan: The Childless Society; The Nostalgia for Yesterday Mother*. London: Routledge.

Jorgensen, M. & Louise. J Phillips. (2002). “Dis-course Analysis as Theory and Method”. London: Sage Publication.

Sasagawa, A. (2004). *Japan’s Changing Generation; Centered Selves and Life Choices*. New York: Routledge Curzon.

Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Koyu, S. (2006). *The Cambridge History of Japan Volume I: Early Buddha Worship*, Cambridge University Press.

Jurnal

International Journal of Japanese Society and Culture. (2008). ‘Jepang dan Beberapa Isu Internasional di Kawasan Asia Pasifik’, Vol.1 No.1

Muhayarah, I. (2015) “Fenomena Ikumen sebagai salah satu perubahan peran dan identitas ayah dalam masyarakat Jepang modern (The Ikumen Phenomenon as One of the Changes of Father’s Role and Identity within Japanese Modern Society)”, *Prosiding ASJI*.

Situs Internet

Basic Plan of Gender Equality. dilihat 8 agustus 2016 http://www.gender.go.jp/english_contents/pr_act/pub/pamphlet/women-and-men15/pdf/2-3.pdf

By the Light of My Father’s Smile–, *Fathering Japan Kansai*. Dilihat 30 Juni 2018. https://greenz.jp/2014/09/10/fathering_japan/

Jiji. Japan drops by three to 114th in gender equality rankings by World Economic Forum. Dilihat 30 Juni 2018. <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/02/national/social-issues/japan-drops-114th-gender-equality-rankings-world-economic-forum/#.WzhcYdIzbMw>

- Kincaid. C. dilihat 5 Juni 2016 <http://www.japan-powered.com/japan-culture/a-look-at-gender-expectations-in-japanese-society>
- Koyama. T. “The Changing Social Position of Women in Japan, UNESCO, 1961. Dilihat 30 Juni 2018. <http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000028/002807eo.pdf>
- Maruko. M. NPO Fathering Japan shows men how to be better dads. Dilihat 30 Januari 2018 https://www.japantimes.co.jp/news/2014/06/01/national/npo-fathering-japan-shows-men-better-dads/#.WnAgorxl_IU
- Maruko. M. NPO Fathering Japan shows men how to be better dads. Dilihat 21 April 2015 <https://www.japantimes.co.jp/news/2014/06/01/national/npo-fathering-japan-shows-men-better-dads/#.WzhoFdIzbMw>
- OECD. Dilihat 16 Juni 2018. <https://www.oecd.org/japan/Gender2017-JPN-en.pdf>”
- Yan. S. Training to be a ‘super dad’ in Japan. dilihat 30 Januari 2018. <http://money.cnn.com/2016/10/21/news/economy/japan-dads-fathers-parenting/index.html>,

**RINGKASAN HASIL PENELITIAN
GLOBALISASI DAN MASYARAKAT MENUA TIONGKOK:
PARIWISATA DAN POTENSI LANSIA¹**

***RESEARCH SUMMARY
GLOBALIZATION AND OLDER PEOPLE IN CHINA: TOURISM AND
OLD PEOPLE POTENCY***

Erlita Tantri

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Email: erlita_tantri13@yahoo

Diterima: 6-4-2018

Direvisi: 2-5-2018

Disetujui: 5-5-2018

ABSTRACT

China is one of the countries that has a large number of elderlies in the world. In 2016, China has 230.8 million elderly people and it is predicted that 40 percent of China's population in 2050 is elderly. Although the elderly is often regarded as a burden for the State and the family, but fortunately the elderly also has substantial potency, especially in the economic realm. One of the Chinese elderly potency is in tourism. In tourism, elderly travel activities are followed by the development of technology and services that related to tourism. This paper tries to observe the potency of Chinese elderly in their leisure time with travel. Filling leisure time with a tour not only can improve the health conditions of the elderly that affect to longer life expectancy, but also stimulate the development of silver hair industry in tourism for China and other countries.

Keywords: *elderly, leisure time, China*

ABSTRAK

Tiongkok adalah salah satu Negara yang memiliki jumlah lansia yang cukup besar di dunia. Tahun 2016 saja Tiongkok telah memiliki 230,8 juta jiwa lansia dan tahun 2050, diprediksikan 40 persen penduduk Tiongkok adalah lansia. Meskipun lansia kerap dianggap sebagai beban bagi Negara dan keluarga, namun lansia juga memiliki potensi yang cukup besar terutama dalam aspek ekonomi. Salah satu potensi lansia Tiongkok adalah pada sektor pariwisata. Dalam pariwisata, kegiatan berwisata lansia diikuti dengan berkembangnya teknologi dan jasa yang berkaitan dengan turisme. Tulisan ini berupaya melihat potensi lansia Tiongkok dalam mengisi waktu luang dengan berwisata. Mengisi waktu luang dengan berwisata bukan hanya dapat memperbaiki kondisi kesehatan lansia yang berdampak pada harapan hidup yang semakin panjang, namun juga merangsang berkembangnya industri lansia terkait pariwisata di Tiongkok dan Negara lain.

Kata Kunci: Lansia; waktu luang; pariwisata; Tiongkok

¹ Tulisan ini merupakan hasil penelitian DIPA Tim Cina 2017 yang beranggotakan: Erlita Tantri, Devi Riskianingrum, P. Rudolf Yuniarto, Rita Pawestri, Wabilia Husnah, dan Cahyo Pamungkas. Terima kasih pada teman-teman atas kontribusinya.

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Tiongkok berusia 60 tahun ke atas atau lanjut usia (lansia) terus semakin meningkat. Jika pada tahun 2013 jumlah lansia Tiongkok sekitar 9,7 persen dari jumlah penduduk Tiongkok yang berkisar 1,34 milyar orang (Zhou dan Feng 2015), maka pada tahun 2016, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas telah mencapai 230,8 juta jiwa atau 16,7 persen dari jumlah total penduduk Tiongkok (China Daily, 2017). Kenaikan jumlah lansia ini terkait dengan semakin baik atau modernnya sarana dan teknologi kesehatan di Tiongkok yang berdampak pada semakin panjang harapan hidup masyarakat dan menurunnya jumlah kematian penduduk. Selain itu, penerapan kebijakan memiliki satu anak (1978) untuk menekan jumlah penduduk juga berpengaruh pada menurunnya jumlah kelahiran anak yang berpengaruh pada menurunnya jumlah usia produktif. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah lansia telah membawa perubahan demografi Tiongkok.

Batasan usia lansia yang umumnya dipakai oleh United Nation (UN) adalah penduduk dengan usia sekitar 60 tahun ke atas (WHO, 2002). Pada tahun 2050, penduduk Tiongkok usia 60 tahun ke atas akan mencapai 40 persen dari jumlah penduduk (Hatton, BBC, 2015). Jika merujuk pada usia 60 tahun ke atas ini, Tiongkok akan terus menghadapi pemenuhan kebutuhan lansia yang lebih banyak lagi pada tahun-tahun berikutnya. Terutama pada persoalan perawatan untuk para lansia.

Perawatan lansia baik dikelola pemerintah atau swasta dan komunitas tumbuh seiring dengan berkurangnya peran anak atau keluarga dalam memelihara orang tua mereka. Di samping kebijakan satu anak, migrasi kaum muda ke kota baik karena menikah, bekerja atau bersekolah, menyebabkan banyak orang tua yang harus hidup terpisah dan sendiri. Selain terpisah oleh alasan tersebut, perilaku dan sikap anak pada masa kini pada orang tua juga cenderung berubah. Kini rasa berbakti dan peduli pada orang tua kian tergerus, meskipun Tiongkok memiliki konsep Xiao atau konsep berbakti yang mengharap setiap anak peduli dan berupaya merawat orang tuanya (Husnah, 2015).

Namun demikian, jumlah lansia Tiongkok yang cenderung meningkat, dapat menjadi pangsa pasar bagi produsen produk lansia. Menurut China Britain Business Council (2016), jumlah lansia Tiongkok yang akan mencapai 30 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2030 akan menjadikan mereka sebagai pasar industri lansia (*silver hair industry*) terbesar di dunia (China Britain Business Council, 2016). Para produsen dan pelaku bisnis lainnya juga dapat mengambil kesempatan dari potensi jumlah lansia yang besar di Tiongkok ini, khususnya untuk produk-produk lansia seperti jasa asuransi, pakaian, makanan dan minuman sehat, obat-obatan, alat bantu lansia, perangkat elektronik, jasa perawatan, pelayanan kesehatan, bahkan hiburan, pariwisata dan perangkatnya (jasa perjalanan, akomodasi, transportasi, pendamping atau pemandu wisata, dan perangkat berwisata – kamera, tas/koper, tongkat, dan kursi roda).

Jika riset-riset sebelumnya lebih melihat lansia sebagai obyek yang harus dirawat, maka pada kesempatan ini melihat bagaimana lansia sebagai subyek yang berperan dalam menumbuhkan potensi ekonomi. Oleh karena itu, tulisan ini membahas aktivitas lansia dalam mengisi waktu luang dan berwisata sebagai potensi tumbuhnya industri lansia (*silver hair industry*) yang berkaitan dengan turisme. *Silver hair industry* sendiri merupakan upaya pemenuhan kebutuhan lansia sekaligus peningkatan kualitas hidup mereka melalui pemenuhan kebutuhan produk-produk lansia yang sesuai dan terjangkau (Sau Po Centre on Ageing, 2011). Selain itu, artikel ini adalah hasil riset kualitatif dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam dengan para akademisi, institusi pariwisata serta pelaku di bidang pariwisata seperti pemilik penginapan, pemandu wisata; juga wawancara dengan beberapa lansia di Tiongkok khususnya kota Shanghai.

Berwisata merupakan salah satu trend yang sedang berlangsung di masyarakat Tiongkok. Setelah Ekonomi Pintu Terbuka 1978, masyarakat Tiongkok mulai menikmati kesejahteraan ekonomi dan kebebasan melakukan perjalanan wisata. Saat ini, jumlah wisatawan Tiongkok,

termasuk di dalamnya wisatawan lansia, menjadi yang terbesar di dunia. Pada tahun 2015 terdapat 100 juta perjalanan wisata penduduk Tiongkok di seluruh dunia (Chan, 2016). Sebagian besar dari mereka berwisata ke Negara-negara Asia seperti Korea, Jepang, Thailand, Hong Kong, Kamboja dan Singapura.

LANSIA DALAM MENIKMATI WAKTU LUANG

Ada beberapa manfaat dari berwisata atau menikmati waktu luang bagi lansia seperti yang diungkapkan oleh Wang dan Wang (2011) yaitu dapat memperbaiki suasana hati, kondisi tubuh yang lebih tenang dan rileks serta meningkatkan kemampuan fisik. Kondisi jasmani dan rohani yang baik ini akhirnya berdampak pada meningkatnya kualitas hidup lansia, meningkatkan daya ingat dan memperlambat proses penuaan.

Pada dasarnya, menikmati waktu luang pada masyarakat Tiongkok berkaitan dengan ajaran Konfusianisme dan Taonisme (Husnah, 2016) khususnya yang menekankan pada aktivitas yang menenangkan jiwa dan raga. Menikmati waktu luang bagi lansia dapat memberikan dampak pada terpenuhinya kebutuhan fisik dan spiritual lansia, sehingga dapat meningkatkan harmoni antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia lain, dan manusia dengan pribadinya sendiri (Ma & Liu, 2009). Secara garis besar, ajaran Konfusianisme melihat kegiatan mengisi waktu luang sebagai kegiatan yang menenangkan dan menyenangkan. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk menikmati hidup dalam pikiran dan keadaan yang bebas dan santai (Liu, Yeh. Chick & Zinn, 2008, 486).

Namun, lansia Tiongkok yang hidup pada masa lalu memiliki pemikiran tradisional terhadap konsep mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang pada masa lalu pernah dianggap sebagai kegiatan yang sia-sia dan menghamburkan waktu serta uang. Pemahaman ini terkait dengan kondisi pada masa lalu, terutama lansia yang hidup pada masa Reformasi Agraria (1978), Lompatan Jauh ke Depan (1958-1960) dan Revolusi Kebudayaan (1966-1976). Di mana pada masa tersebut,

aktivitas mengisi waktu luang dianggap sebagai tindakan yang hanya dilakukan oleh orang-orang malas (Human Kinetics, 2012). Dengan demikian, lansia cenderung lebih suka menikmati waktu luang dengan bercengkrama bersama keluarga serta aktivitas sederhana lainnya yang tidak banyak menghabiskan waktu dan uang (Xiao dan Huyton, 1996)..

Namun kini menikmati konsep waktu luang sudah berbeda. Hal ini terkait dengan berkembangnya ekonomi dan budaya Tiongkok yang semakin maju. Menikmati waktu luang adalah kegiatan yang menyenangkan namun tidak selalu menghamburkan uang cukup banyak, misalnya dengan bersantai di pekarangan rumah, berjalan-jalan di taman-taman, bercengkrama dengan keluarga dan teman lansia lainnya, menonton televisi dan makan bersama, serta membaca buku. Semakin modern pemikiran lansia Tiongkok saat ini juga mempengaruhi pandangannya terhadap menikmati waktu luang dengan berwisata. Menikmati waktu luang termasuk berwisata kini menjadi sebuah kebutuhan bagi lansia dalam mengisi kejenuhan serta kekosongan waktu. Berwisata merupakan salah satu alternatif dalam mencari kesenangan yang berbeda dengan sehari-hari dijalani lansia.

Kini banyak lansia yang menikmati kegiatan berwisata di waktu luangnya. Pemerintah Tiongkok kini banyak memfasilitasi kegiatan menikmati waktu luang dan berwisata lansia. pemerintah banyak membangun taman-taman di sekitar pemukiman dan pusat kota. Pemerintah pun memperbaiki fasilitas umum untuk lansia seperti jalur jalan kaki dan transportasi ramah lansia. Untuk kegiatan berwisata, pemerintah menyediakan banyak kemudahan untuk lansia misalnya dengan mendampingi lansia sejak mengatur rencana perjalanan hingga kembali lagi, menyediakan jasa pemandu yang siap siaga melayani lansia dan rencana perjalanan yang mudah dan menyenangkan bagi lansia.

Pemerintah Tiongkok berusaha memberikan kebahagiaan dan partisipasi lansia dalam mengisi waktu luang melalui dua cara yaitu dengan meningkatkan kualitas hidup lansia dan melalui pendekatan budaya. Peningkatan kualitas hidup lansia dilakukan dengan memperbaiki

sarana dan kondisi kesehatan lansia. Di samping itu, untuk meningkatkan minat lansia berwisata di masa pensiun atau waktu luangnya, pemerintah Tiongkok memperbaiki kebijakan mengenai dana pensiun yang menjadi pendapatan utama lansia. Di kota Shanghai sendiri pendapatan rata-rata lansia tahun 2015 meningkat hampir delapan kali lipat dari pendapatan rata-rata tahun 1998, yaitu dari sekitar 547 yuan (1998) menjadi 3.863 yuan (2015) (Shanghai Research Center on Ageing, 2015). Dengan demikian, kondisi keuangan yang baik akan membuat lansia memiliki kesempatan mengisi waktu luang yang lebih banyak.

Sedangkan melalui pendekatan budaya, pemerintah berusaha mendekatkan partisipasi lansia menikmati waktu luang dengan ajaran Konfusianisme. Melalui ajaran Konfusius, partisipasi lansia harus didukung oleh anak-anaknya. Seorang anak akan dikatakan berbakti jika dapat membuat orangtuanya bahagia dan belum bisa dikatakan berbakti (*xiao*) jika belum bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Melalui konsep *xiao* pemerintah Tiongkok mengingatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan menikmati waktu luang orang tuanya. Anak-anak didorong untuk mendukung aktivitas lansia dalam mengisi waktu luang meskipun dengan mengajak orang tua mereka berjalan-jalan secara rutin. Oleh karena itu, konsep berbakti atau *xiao* ini menjadi konsep yang penting bagi budaya Tiongkok saat ini (Lim, 2013).

Untuk mendukung kegiatan berwisata lansia yang ditemani oleh anak atau keluarga, pemerintah Tiongkok memperpanjang hari libur mingguan menjadi dua hari per minggu pada 1994. Pada tahun 1999, pemerintah secara resmi memperbanyak hari libur nasional di mana masyarakat Tiongkok memiliki 114-115 hari libur dalam setahun atau hampir sepertiga dari total hari dalam setahun. Penambahan waktu libur mingguan dan hari libur nasional oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan waktu lebih banyak kepada anak-anak yang bekerja jauh untuk berkumpul kembali dengan orang tuanya. Dengan demikian, dalam jangka waktu libur tersebut anak-anak dapat mengajak orang tuanya berwisata.

Kemajuan ekonomi Tiongkok telah memberikan dampak pada semakin baiknya kehidupan lansia. Program pensiun dan layanan kesehatan serta perawatan lansia juga memberikan pengaruh pada terjaminnya kehidupan lansia Tiongkok. Kini pemerintah dan keluarga juga melihat pentingnya menikmati waktu luang bagi lansia. Hal ini dikarenakan, kebahagiaan menikmati waktu luang telah memberikan hasil pada semakin baiknya kejiwaan dan kesehatan fisik lansia. Pada akhirnya, kondisi bahagia ini berakibat pada semakin sehatnya lansia dan berkurangnya biaya kesehatan. Oleh karena itu, lansia pun memandang bahwa penting mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan menenangkan bagi diri mereka.

Berikut beberapa kegiatan waktu luang yang cenderung sering dilakukan oleh para lansia misalnya saja di Kota Shanghai, yaitu seperti:

Tabel 1. Jenis Kegiatan yang Dilakukan Lansia Shanghai dalam Mengisi Waktu Luang

Jenis Kegiatan	Persentase
Menonton TV / mendengar radio	95.5
Jogging / berjalan perlahan	63.1
Membaca buku / membaca Koran	51.9
Menanam bunga	27.4
Bermain bulutangkis, tenis meja	15.1
Taichi	7.2
Memelihara hewan	6.7
Pergi ke bioskop menonton film	6.6
Menari / <i>Guangchangwu</i>	6.6
Memancing / melukis/ fotografi/ koleksi	4.2
Bermain <i>Mahjong</i> / catur/kartu	2.1

Sumber: Shanghai Research Center on Ageing , 2015

Umumnya lansia menikmati waktu luang dengan menonton televisi di rumah. Menonton televisi merupakan kegiatan yang murah, aman, dan ringan serta tidak membutuhkan biaya dan tenaga. Di samping itu, menonton televisi dapat dilakukan bersama anggota keluarga lainnya, sehingga tidak perlu meninggalkan mereka. Kegiatan hobi yang berkaitan dengan olah raga

juga merupakan hal yang diminati lansia dalam mengisi waktu luang. Berjalan-jalan di taman, menari, serta menikmati hobi memelihara hewan, tanaman, dan membaca buku juga menjadi kegiatan yang disukai para lansia di masa tuanya. Hal-hal tersebut secara tidak langsung, dapat menggambarkan kegiatan yang umumnya disukai lansia dalam mengisi waktu luang.

Namun, ada kegiatan lain dari lansia Tiongkok yang kini mulai tumbuh dalam mengisi waktu luangnya yaitu cukup banyak lansia yang pergi ke lembaga-lembaga pendidikan formal. Hingga tahun 2005, Tiongkok memiliki 5.970.000 kelas lansia di Universitas dan sekolah khusus lansia mulai dari tingkat kecamatan (Li, 2015). Jurusan yang umumnya diikuti oleh lansia Tiongkok adalah bidang nutrisi dan perawatan kesehatan, musik dan tari, ilmu berkebun dan kerajinan tangan, pelatihan kejuruan, dan ilmu-ilmu yang mendukung masa pensiun mereka (Li, 2015). Kota Shanghai sendiri terdapat lima universitas untuk lansia dan lebih dari 280 sekolah untuk lansia di tingkat distrik dan komunitas (Chia, 2013). Jumlah lansia yang berpartisipasi dalam pendidikan formal mencapai 1.200.000 orang (Shanghai Committee on Ageing, 2016). Hal ini menunjukkan, bahwa lansia Tiongkok sangat menikmati waktu luang, di mana mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat, dan bernilai.

LANSIA DAN PARIWISATA

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, semakin baiknya ekonomi dan pelayanan kesehatan di Tiongkok telah memberikan dampak signifikan bagi meningkatnya minat lansia dalam fenomena pariwisata Tiongkok, baik berwisata di wilayah daratan Tiongkok sendiri maupun ke luar negeri. Untuk wisata ke luar negeri, banyak wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Negara-negara di Asia dan Eropa. Wisatawan Tiongkok ini bukan hanya di usia produktif namun juga usia lanjut. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO, *World Tourism Organization*) wisatawan Tiongkok yang keluar dari negaranya untuk berwisata bisa mencapai

100 juta orang di tahun 2020 (Thretheway dan Mak, 2006, 22).

Bagi lansia, berwisata dapat memberikan pengalaman baru dan menambah semangat hidup mereka (Sun, 2005). Hal ini dikarenakan ketika lansia melakukan perjalanan wisata, mereka akan mendapati hal yang berbeda misalnya mereka akan bertemu dengan orang berlatar budaya berlainan, tempat dengan kondisi sosial dan lingkungan yang berbeda, dan kebiasaan yang tidak sama, sehingga semuanya dapat memperkaya pengalaman bagi lansia (Global Aging Magazine, 2015).

Belakangan ini, fenomena lansia Tiongkok yang mengisi waktu luang dengan berwisata cenderung meningkat. Jika pada tahun 1998, hanya terdapat 5% responden lansia yang menyatakan berwisata sebagai aktivitas yang biasa dilakukan dalam mengisi waktu luang, maka pada tahun 2003 meningkat menjadi 6,6 persen, kemudian tahun 2005 menjadi 7,7 persen dan pada tahun 2008 menjadi 8,4 persen (Feng dkk., 2011). Saat ini, ada lebih dari 5 juta lansia Tiongkok pergi berwisata setiap tahunnya, dan sekitar 47 persen dari mereka berwisata jarak jauh (Brighton Office, 2017). Di Shanghai saja, rata-rata tiap lansia melakukan wisata adalah empat kali dalam setahun (Hu, 2016). Dengan demikian, angka ini akan bisa terus meningkat dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat Tiongkok dan semakin terbukanya lansia akan pentingnya mengisi waktu luang yang berkualitas dalam kehidupan mereka.

Layanan dan produk wisata yang sesuai dengan minat lansia juga memiliki potensi yang cukup besar dan menguntungkan bagi penyedia destinasi wisata. Produk dan pelayanan untuk lansia ini misalnya berkaitan dengan fasilitas hotel, daya tarik tempat wisata, wisata kuliner yang ditawarkan, dan fasilitas transportasi. Disamping itu, perjalanan wisata para lansia juga memberikan peluang bagi pemandu wisata yang memiliki kemampuan dalam memberi bantuan khusus bagi lansia. *China Association of Travel Services* (CNTS, Asosiasi Pelayanan/ Jasa Perjalanan Tiongkok) merumuskan pedoman yang harus digunakan oleh para pemandu wisata khusus wisatawan lansia. Pelayanan ini berfokus

pada bantuan, keselamatan, dan perawatan kesehatan lansia (China Daily, 2015 L).

Potensi pariwisata untuk lansia Tiongkok ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah lansia. Biro Statistik Nasional Tiongkok menyebutkan bahwa jumlah penduduk berusia 60 dan di atasnya pada tahun 2013 mencapai lebih dari 202 juta dan pada tahun 2050 jumlah lansia diprediksi mencapai hampir dua kali lipat atau sekitar 400 juta. Jumlah lansia yang besar ini secara potensi ekonomi, akan membuka peluang di sektor pariwisata domestik, di mana mulai menjadi trend pada tahun 2000 dan booming pada tahun 2010 hingga sekarang. Potensi ini juga dapat dilihat dari pendapatan pariwisata lokal (domestik) pada tahun 2014 yang mencapai 3,1 triliun Yuan (US\$500 miliar) atau 16,7 persen meningkat dibandingkan tahun 2013. Sedangkan menurut Akademi Pariwisata Tiongkok, pendapatan pariwisata lansia pada tahun 2015 mencapai sekitar 3,6 triliun Yuan (China Daily, 2015 P).

Alhasil, potensi lansia dalam pariwisata menumbuhkan berbagai peluang industri lansia (*silver hair industry*) di mana bukan hanya memberikan peluang bagi penyedia layanan perjalanan saja, namun juga bagi agen perjalanan, operator tur, perusahaan transportasi dan pelaku bisnis perhotelan. Pasar pariwisata lansia juga diikuti oleh peluang industri beragam produk yang berhubungan dengan perjalanan, seperti kamera digital high-end, produk asuransi perjalanan, pakaian olah raga, sepatu dan aksesoris perjalanan. Beberapa produk tersebut, dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen lansia. Dengan demikian, mengisi waktu luang lansia dengan berwisata dapat mendorong kegiatan ekonomi lain yang berhubungan dengan industri pariwisata.

PENUTUP

Fenomena terus meningkatnya jumlah lansia di Tiongkok bukan hanya memberikan beban pada meningkatnya pengeluaran pemerintah dan keluarga untuk perawatan serta pelayanan kesehatan lansia, namun juga memberikan potensi lain secara ekonomi. Lansia kini memiliki daya beli besar pada

produk-produk khusus lansia seperti alat bantu lansia (tongkat, kursi roda), pakaian, suplemen, makan minuman sehat, alat elektronik (kamera, teropong), hiburan, termasuk di dalamnya wisata dan jasa perjalanan yang merupakan bagian dari industri lansia atau *silver hair industry* dalam pariwisata. Lansia pada saat ini mulai menyesuaikan dengan gaya hidup modern salah satunya dengan menikmati waktu luang. Oleh karena itu, harapan hidup lansia Tiongkok yang semakin panjang membuat mereka berkeinginan untuk menikmati waktu luang di masa tua dengan melakukan perjalanan wisata.

Mengisi waktu luang termasuk melakukan perjalanan wisata bagi lansia Tiongkok kini menjadi sebuah kebutuhan. Untuk menjawab harapan ini, banyak jasa yang berkaitan dengan pariwisata lansia yang ikut berkembang baik lokal maupun global, seperti agen perjalanan, transportasi, teknologi dan produk wisata. Wisatawan lansia Tiongkok juga telah menjadi sumber potensial bagi Negara-negara yang menjadi destinasi wisata lansia, seperti Jepang, Korea, Thailand, dan beberapa Negara Eropa yang secara tidak langsung menumbuhkan industri lansia di Negara-negara tersebut.

Berwisata secara tidak langsung memberikan pengaruh signifikan bagi lansia, di mana semakin bahagia lansia dipercaya akan membuat mereka semakin sehat. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada meningkatkan kesempatan hidup lansia. Berwisata lansia kini mendapat dukungan dari pemerintah. Dukungan ini bukan hanya berupa upaya menaikkan dana pensiun, namun juga membangun infrastruktur kota dan tempat-tempat wisata yang lebih ramah lansia. Selain itu, dukungan dari keluarga juga ikut berperan. Waktu libur yang panjang yang diberikan pemerintah menjadi jembatan bagi anak-anak untuk mengunjungi orang tua dan mengajak mereka berwisata. Dengan demikian, ini menjadi bentuk pengabdian dan berbaktinya anak pada orang tua sebagaimana dianjurkan dan dipropagandakan pemerintah melalui nilai-nilai Konfusianisme.

Bagi Indonesia, harapan hidup lansia dapat ditingkatkan dengan memberikan kesempatan lansia untuk menikmati masa tuanya.

Dalam hal ini, pemerintah harus memikirkan bagaimana lansia pada masa tuanya memiliki pendapatan yang cukup melalui program pensiun baik datang dari pemerintah maupun keluarga. Selain itu, pemerintah mengajak partisipasi keluarga, masyarakat atau komunitas dalam memberikan kesempatan mengisi waktu luang yang bernilai bagi lansia di lingkungannya. Pemerintah perlu mensosialisasikan pada keluarga dan masyarakat untuk membantu dan memfasilitasi lansia dalam melakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan dan membahagiakan. Semakin bahagia lansia maka akan berpengaruh pada semakin sehat lansia dan pada akhirnya dapat mengurangi biaya kesehatan lansia.

PUSTAKA ACUAN

- Brighton Office. (2017, 8 Mei). China's Ageing Population: A New Market for Tourism?.
<http://www.chinatraveloutbound.com/chinas-ageing-population-a-new-market-for-tourism/> . Diakses pada 18 Oktober 2017
- Chan, Y. W. (2016). What drives Chinese outbound tourism?, East Asia Forum, Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific,
<http://www.eastasiaforum.org>
- China Britain Business Council (CBBC). (2016). Consumers: Growing Opportunities for UK Companies,
<http://files.Chinagoabroad.com/Public/uploads/v2/uploaded/attachments/1512/Silver-Haired-Consumers.pdf>,
<http://www.Chinagoabroad.com/en/article/China-s-silver-consumers-a-growing-opportunity-for-uk-business>, diakses Januari 2017
- Feng, Q., Jama L.P., Zhen, Z., dan Pamela W.D. (2011). Less Exercise and More TV: Leisure -Time Physical Activity Trends of Shanghai Elders, 1998–2008. *Journal of Public Health* Vol. 33, No. 4, pp. 543–550
- Global Aging Magazine. (2015). 从国外老年教育看自我价值的实现. 环球老龄杂志. Hal. 34-35.
- Hatton, C.(2015). BBC News, Fujian province, China, “Who will take care of China's elderly people?”,
<http://www.bbc.com/news/magazine-35155548> , 21 December 2015
- Hu, M. (2016). Shanghai Elderly Travel the Most Among Peers as Aged Mainlanders on Average Travel 4 Times Last Year: Report.
<http://www.shanghaidaily.com/metro/entertainment-and-culture/Shanghai-elderly-travel-the-most-among-peers-as-aged-mainlanders-on-average-travel-4-times-last-year-report/shdaily.shtml>.
 Diakses pada 18 Oktober 2017.
- Human Kinetics, (2012). Introduction to Recreation and Leisure . United States: Human Kinetics.
- Husnah, W. (2015). Konsep Xiao Dan Masalah Ageing Society: Tradisi Dan Transisi Perawatan Lansia Oleh Keluarga, dalam Laporan DIPA Pengelolaan Masyarakat Menua (Ageing Society) di China, P2SDR, belum dipublikasi.
- Husnah, W. (2016). Tourism for Elderly in Hong Kong: Where Tradition Become Potency. Research Center for Regional Resources.
- Li, S. (2015). 老年教育终身教育的探路者. 环球老龄杂志. Hal. 31-33
- Lim, C.K. (2013). Application of Kinect Technology in the Design of Interactive Products for Chinese Senior Citizens. Dalam C. Stephanidis (Ed.). *Communications in Computer and Information Science Book Series*, vol. 373, Hal. 51–55.
- Liu, H., Yeh, C., Chick, G.E., & Zinn, H.C. (2008). An Exploration of Meanings of Leisure : A Chinese Perspective. *Leisure Sciences*, 30, Hal. 211-225.
- Ma, H. & Liu, E. (2009). Social Transformation: The Value of Traditional Leisure

- Culture of China Revisited. World Leisure No. 1/2009.
- Sau Po Centre on Ageing, (2011). A Study on Silver hair Market Development in Selected Economis, Final report, Volume 1, Department of Social Work and Social Administration The university of Hong Kong.
- Shanghai Committee on Ageing. (2016). 上海市老龄事业发展报告. Shanghai: Shanghai Committee on Ageing.
- Shanghai Research Center on Ageing, (2015). 第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查: 上海地区状况报告. Shanghai: Shanghai Research Center on Ageing
- Sun, H.L. dan Tideswell, C. (2005). Understanding Attitudes towards Leisure Travel and the Constraints Faced by Senior Koreans. *Journal of Vacation Marketing*, vol. 11, no. 3, Hal. 249-263.
- Tretheway, M. and Mak, D. (2006). "Emerging Tourism Markets: Ageing and Developing Economies", *Journal of Air Transport Management* 12 (2006) 21–27, 0969-6997/\$ - see front matter, 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved, doi:10.1016/j.jairtraman.2005.09.008
- Wang KH, Wang KM, (eds). 2011. An Exploratory Study on Leisure activities Demand of Elderly in Taiwan. <https://pdfs.semanticscholar.org/e1f2/e8b498441f7cd188f07b11afa1ebed8633e.pdf>. Diakses pada 2 Agustus 2017.
- WHO, (2002), Proposed working definition of an older person in Africa for the MDS Project, <http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/>
- World Health Organization (WHO), (2002). Active Ageing and Policy Framework, World Health Organization, Noncommunicable Diseases and Mental Health Cluster, Noncommunicable
- Disease Prevention and Health Promotion Department, Ageing and Life Course.
- Xiao H. dan Jeremy R.H. (1996). Tourism and Leisure : an Integrative Case in China. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, Vol. 8 Issue: 6, Hal. 18-24.
- Zhou dan Feng (eds). (2015). Bluebook of elderly care as an industry in Beijing: annual report on the development of elderly care as an industry in Beijing. Social Sciences Academic Press. China. (Chinese version. 北京养老产业蓝皮书:北京养老产业发展报告 (2015). 社会科学文献出版社).

Internet

- China Dailly. (2015). "Tourism industry targets the elderly", By Wang Wen (China Daily) Updated: 2015-06-25 08:16 , http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-06/25/content_21097019.htm, diakses Juli 2017
- China Daily. (2015). "Authorities drafting new standards for senior tourists", September 2015-15 09:43, http://europe.chinadaily.com.cn/business/2015-09/15/content_21853530.htm, diakses 18 Oktober 2017.
- China Dailly. (2017). "China's elderly population exceeds 230m", Xinhua, 2017-08-04, http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-08/04/content_30347341.htm, diakses 12 Januari 2018

TINJAUAN BUKU
ANIME, PORNOGRAFI, DAN PELANGGARAN HAK CIPTA: ASPEK
HUKUM DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COOL JAPAN

BOOK REVIEW
ANIME, PORNOGRAPHY, AND COPYRIGHT INFRINGEMENT: LEGAL
ASPECTS IN COOL JAPAN POLICY IMPLEMENTATION

Mark McLelland (Ed), *The End of Cool Japan: Ethical, Legal and Cultural Challenges to Japanese Popular Culture*, Oxford: Routledge, 2017, xv + 224 hlm.

Rifki Indra Maulana

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: indra.rifki@gmail.com

Diterima: 5-4-2018

Direvisi: 29-4-2018

Disetujui: 5-5-2018

PENDAHULUAN

Jepang telah memanfaatkan *pop culture* sebagai alat dalam *soft diplomacy*-nya yang dikenal dengan *Cool Japan* (Iwabuchi, 2015). Istilah *Cool Japan* pertama kali dikenal dari artikel Douglas McGray, “*Japan’s Gross National Cool*” pada majalah *Foreign Policy* tahun 2002. Dalam artikel tersebut, McGray memaparkan bahwa meski Jepang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, namun Jepang memiliki pengaruh kekuatan budaya yang lebih kuat dibandingkan dengan saat Jepang berada di puncak kekuatan ekonomi pada periode 1980an. Artikel McGray ini kemudian menjadi perhatian media massa di Jepang yang mengkritisi pemerintah yang dianggap lambat dalam memberikan respon atas meningkatnya popularitas budaya Jepang di berbagai negara, yang memiliki potensi bagi pertumbuhan ekonomi Jepang.

Pada perkembangannya, pemerintah Jepang akhirnya memanfaatkan *Cool Japan* untuk mendukung agenda politiknya. Di awal tahun 2000an, *Cool Japan* tidak hanya digunakan sebagai strategi marketing yang bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan dan penghargaan terhadap budaya Jepang semata, melainkan juga

untuk membangun citra positif Jepang di mata dunia (McLelland, 2009). Pemerintah Jepang juga mulai serius meningkatkan investasi pada program dan strategi *Cool Japan* sejak tahun 2011 (Budianto, 2015), dengan mendukung dan mempromosikan perkembangan produk dan layanan *Cool Japan* di luar negeri, membuat konten-konten *Cool Japan* menjadi komersial di pasar luar negeri, serta menyediakan modal untuk bisnis di berbagai bidang, mulai dari manga, anime, hingga industri makanan dan fashion.

Saat ini banyak pihak mulai mengkritisi kebijakan *Cool Japan*, mulai dari kalangan pegawai pemerintah dan akademisi, artis, hingga masyarakat umum (Grunebaum, 2012). Masyarakat Jepang sendiri masih mempermasalahkan besarnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek *Cool Japan* (Mihara, 2014 dalam Budianto, 2015) dan mempertanyakan sejauh mana proyek ini memberikan dampak bagi perekonomian Jepang. Sementara masyarakat di berbagai negara juga mulai menyatakan kekhawatiran akan adanya pengaruh buruk dari masifnya investasi Jepang melalui kebijakan *Cool Japan* terhadap masyarakat dan kebudayaan

nasional mereka, sebagaimana dibahas oleh sejumlah penulis pada buku *“The End of Cool Japan: Ethical, Legal and Cultural Challenges to Japanese Popular Culture.”*

Dalam buku yang terdiri atas 10 bab/tulisan ini, dipaparkan bahwa terdapat produk *Cool Japan* (khususnya *manga* dan *anime*) yang mengandung konten yang oleh McLelland disebut sebagai “sangat berbeda” dan “berbahaya” bagi generasi muda di negara-negara yang menjadi tujuan investasi *Cool Japan* (McLelland, 2009) karena berisi gambar atau cerita yang menampilkan kekerasan, pornografi, serta dukungan terhadap praktik LGBT dan Pedofilia. Selain itu, masih berkembang kekhawatiran di sejumlah negara bahwa masuknya budaya Jepang dapat mempengaruhi bahkan mengikis identitas dan budaya lokal.¹

Tersebarinya produk yang dianggap berisi konten “berbahaya” tersebut dinarasikan buku ini sebagai salah satu sebagai faktor yang dapat menyebabkan berakhirnya *Cool Japan*, karena penyebaran produk-produk tersebut justru kontraproduktif dengan tujuan *Cool Japan* untuk membangun citra positif Jepang di dunia internasional. Review ini berusaha melihat bagaimana para penulis menyoroti permasalahan hukum yang terkait dengan implementasi kebijakan *Cool Japan*, khususnya terkait penyebaran *anime*.

PERAN ANIME DALAM KEBIJAKAN COOL JAPAN

Menurut Iwabuchi (2002), anime telah diterima dengan sangat baik oleh masyarakat dunia, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara sejak akhir tahun 1970-an. Doraemon merupakan salah satu anime yang paling populer di negara-negara Asia, yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi muda di Asia (Iwabuchi, 2002). Sejalan dengan paparan tersebut, Buku ini juga menyatakan bahwa ekspor budaya populer Jepang (khususnya *anime*)

¹ Sebagaimana dibahas oleh Santos dan Sihombing dalam buku ini bahwa teknik gambar yang digunakan pada manga dan anime mempengaruhi desain/bentuk fisik karakter pada komik dan animasi di Thailand dan Indonesia yang berbeda atau tidak merepresentasikan bentuk fisik masyarakat Thailand dan Indonesia pada umumnya

bukanlah fenomena baru karena telah terjadi jauh sebelum pemerintah menetapkan *Cool Japan* sebagai kebijakan nasional.

Dalam kebijakan *Cool Japan*, *anime* masih memegang peran penting karena termasuk salah satu produk utama yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan ketertarikan dan penerimaan masyarakat internasional terhadap Jepang, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui penjualan *anime* dan produk-produk turunannya, seperti merchandise, dll. Kontribusi anime terhadap perekonomian Jepang juga cukup signifikan. Menurut *Japan External Trade Organization* (JETRO), pada tahun 2005, anime telah menguasai 60% pasar dari industri penyiaran kartun di seluruh dunia. Pendapatan yang diterima Jepang dari penjualan anime beserta produk-produk turunannya untuk pasar Amerika Serikat pada masa tersebut mencapai US\$ 17 milyar (Leheny dalam Yokota & Hu, 2013).

ANIME, MANGA, DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa produk budaya populer Jepang yang dianggap berbahaya dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Persepsi ini muncul karena pada umumnya masyarakat melihat anime dan manga sebagai produk untuk anak-anak. Meskipun sebenarnya anime dan manga sangat bervariasi dengan target audience yang beragam, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa (Noris dalam Sugimoto, 2013).

Dalam beberapa tahun terakhir ini, peningkatan penyebaran *anime* yang mengandung unsur pornografi, khususnya yang merepresentasikan karakter yang tampak seperti anak di bawah umur, mulai menjadi perhatian pemerintah di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Selandia Baru, Swedia, dan Australia (Eiland, 2009; McLelland, 2012). Di negara-negara tersebut, animasi yang berisi kekerasan atau konten pornografi yang melibatkan karakter anak-anak dikategorikan sebagai “publikasi kekerasan terhadap anak/*child-abuse publication*.”

Pada tahun 2010 di Swedia, seorang penerjemah manga dihadapkan ke persidangan karena menyimpan koleksi gambar kartun berisi konten seksual yang melibatkan anak di komputer pribadinya (Orange, 2012). Meski pada akhirnya penerjemah tersebut dinyatakan bebas pada sidang kasasi di Mahkamah Agung Swedia, kasus ini memperlihatkan bahwa fans dan akademisi yang fokus meneliti manga dan anime harus berhati-hati dalam menyimpan atau menggunakan anime dan manga karena berpotensi dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Terkait kasus ini, McLelland menyoroti perkembangan hukum yang mulai mengkriminalisasi tindakan menyimpan anime dan manga yang dapat dikategorikan sebagai konten pornografi anak, sebagai tindakan yang dapat di hukum berdasarkan hukum perlindungan anak. Kasus ini menimbulkan perdebatan terutama terkait klausul yang mengatur animasi dan gambar visual sebagai alat bukti tindak pidana. Anime dan manga bertema kekerasan dan pornografi yang melibatkan karakter “yang dianggap”² merepresentasikan anak-anak ini menjadi perhatian karena karakter yang diperdebatkan tersebut tidak nyata (hanya berupa gambar kartun). Sehingga tidak jelas mengapa hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum perlindungan anak, sementara anak yang berusaha dilindungi oleh aturan hukum ini adalah karakter yang tidak nyata.

Perlakuan terhadap konten pornografi sebenarnya berlaku berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Di beberapa negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berekspresi, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Jepang, industri pornografi bahkan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Seseorang yang memiliki, mengedarkan, atau terlibat dalam industri

². McLelland dalam buku ini menegaskan bahwa terdapat kecenderungan penggambaran karakter *Kawaii* atau *cute* pada *Manga* dan *Anime* Jepang, termasuk pada *Manga* dan *Anime* bertema seksual dan kekerasan. Penggambaran karakter seperti inilah yang kemudian menimbulkan kesalahan persepsi bahwa karakter yang diceritakan dalam *Anime* dan *Manga* tersebut “dianggap sebagai” anak-anak, padahal jika didalami lebih lanjut, karakter tersebut sebenarnya adalah orang dewasa, namun memiliki bentuk fisik dan sifat yang *Kawaii* seperti anak-anak.

pornografi secara legal, tidak dihukum. Namun hal ini tidak berlaku jika pornografi tersebut melibatkan anak.

Undang-Undang perlindungan anak yang berlaku di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Selandia Baru, Swedia, dan Australia, mengkategorikan pornografi yang melibatkan anak sebagai tindak pidana. Implikasinya adalah bagi setiap orang yang memiliki, mengedarkan atau menjadi bagian dari kegiatan terkait pornografi anak dapat dijatuhi pidana. Hal ini berbeda dengan praktik di Indonesia, misalnya, yang melarang segala bentuk kepemilikan, pengedaran dan penyalahgunaan konten pornografi tanpa melihat apakah ia melibatkan anak atau orang dewasa (Lihat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi).

Selain ketatnya aturan perlindungan anak yang melarang segala bentuk pornografi yang melibatkan anak, pemerintah negara-negara juga menaruh perhatian besar terhadap peredaran media untuk dewasa, termasuk terhadap komik dan animasi dengan tema kekerasan dan konten seksual. Pemerintah negara-negara tersebut pada umumnya melarang penjualan animasi berisi konten negatif kepada anak dibawah umur.³ Sementara di Amerika Serikat, produk budaya populer yang berisi kekerasan dan pornografi dilarang setelah pemerintah menerbitkan Comic Code pada tahun 1954 (Conry, 2013), yang salah satu aturannya melarang adegan berisi horor, kekerasan, penggambaran buruk untuk karakter polisi, hakim, dan pegawai pemerintah, serta pelecehan terhadap wanita (Hadju, 2008 dalam Conry, 2013).

CITRA BARU JEPANG SEBAGAI KERAJAAN PORNOGRAFI ANAK

Hukum perlindungan anak di Jepang sendiri mengkriminalisasi setiap orang yang memiliki, mengedarkan maupun terlibat dalam produksi media pornografi yang melibatkan anak. Namun hal ini berlaku hanya jika melibatkan anak yang nyata keberadaannya, bukan karakter imajiner yang diciptakan

³ Standar penetapan kriteria “anak dibawa umur” ini juga berbeda penerapannya di berbagai negara, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan budaya negara masing-masing

untuk *anime*. Hukum di Jepang membedakan antara anak di bawah umur dengan karakter yang merupakan hasil kreasi manusia. Karena itu hukum perlindungan anak di Jepang tidak mencakup adanya larangan bagi anime bertema seksual dan kekerasan yang melibatkan karakter “yang dianggap” merepresentasikan anak-anak. Hal ini menimbulkan kecaman dari masyarakat dan pemerintah sejumlah negara. Para jurnalis kemudian mengangkat hal ini menjadi berita negatif semakin memperburuk citra Jepang di mata masyarakat internasional, hingga memunculkan persepsi baru yang menyebut Jepang sebagai Kerajaan Pornografi Anak.

FANS, HAK CIPTA, DAN AKHIR DARI COOL JAPAN

Selain masalah terkait tema kekerasan dan seksual yang menjadi perhatian negara-negara. Masalah lain yang juga didiskusikan dalam buku *The End of Cool Japan* adalah pelanggaran hak cipta terhadap *manga* dan *anime* yang dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk fans dan juga para akademisi. Dalam buku ini dibahas kesulitan para pengajar kajian Jepang di beberapa Universitas, khususnya di Amerika Serikat, Australia dan Kanada untuk mendapatkan referensi untuk materi ajar mereka (khususnya *manga* dan *anime*) secara legal. Beberapa judul *manga* dan *anime* dibatasi (bahkan dilarang) untuk masuk ke negara-negara tersebut dengan alasan berisi gambar atau narasi yang dianggap pornografi anak. Hal ini mendorong para pengajar dan mahasiswa untuk mengakses *manga* dan *anime* tersebut secara ilegal, melalui internet.

Akses terhadap *manga* dan *anime* Jepang saat ini menjadi semakin mudah dilakukan karena adanya situs *fandom*, tempat berkumpulnya fans *anime* dan *manga* dari seluruh dunia. Melalui situs ini, fans dapat saling berkomunikasi membahas *anime* atau *manga* tertentu, termasuk juga membagikan file *anime* dan *manga* untuk bisa diunduh. Menurut McLelland di buku ini, praktik yang dilakukan oleh fans dalam membagikan file secara ilegal ini terjadi karena beberapa karena proses penyediaan *manga* dan *anime* yang asli di berbagai negara membutuhkan waktu yang panjang. Lamanya jeda antara waktu rilis dari *manga* dan *anime* di Jepang, dengan

versi terjemahan bahasa Inggris yang legal setelah mendapatkan lisensi, membuat fans tidak sabar. Hal lain yang tidak kalah penting adalah banyak animasi Jepang yang perlu melalui proses sensor dan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal, tidak sedikit konten dewasa dan kekerasan yang perlu dihilangkan atau diedit agar dapat diterima bagi penonton muda (Fujimoto, 2015). Komunikasi antar fans dari berbagai negara akhirnya memunculkan inisiatif untuk saling berbagi file tersebut melalui situs *fandom*, sehingga fans dari seluruh dunia bisa mengakses *manga* dan *anime* secara lebih cepat.

Selain mendistribusikan *manga* dan *anime* secara ilegal, fans juga melakukan praktik pelanggaran hak cipta lainnya dengan membuat subtitle dan *dubbing anime* (yang dikenal dengan fan subs dan fan dubs), melakukan scanning *manga* dan menerjemahkannya (yang dikenal dengan scanlations), melakukan modifikasi dan bahkan menciptakan *anime* dan *manga* mereka sendiri namun menggunakan karakter yang sudah ada (yang dikenal dengan fanfiction) (Lee, 2012; Condry, 2010). Hukum hak cipta sebenarnya memungkinkan dilakukannya modifikasi terhadap suatu karya cipta. Terhadap produk-produk ini juga diberikan perlindungan hak cipta. Namun hal ini baru bisa dilakukan dengan seizin pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang akan dimodifikasi.

Buku *The End of Cool Japan* juga mendeskripsikan perbedaan hukum hak cipta yang diterapkan di berbagai negara terkait perlindungan terhadap *anime* dan *manga* secara umum. Sebagian besar negara-negara yang dibahas dalam buku ini mengatur bahwa tindakan fans yang membagikan *manga* dan *anime* (termasuk versi terjemahannya) di situs *fandom* sebagai pelanggaran hak cipta. Sementara terkait tindakan memodifikasi atau membuat karya baru dengan menggunakan karakter dari *anime* dan *manga* yang sudah ada, keputusan untuk menetapkan tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak cipta perlu dilihat kasus perkasus. Di buku ini dijelaskan bahwa di Amerika Serikat, misalnya, pembuatan parodi dari karya cipta yang sudah ada tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Sementara apa yang terjadi di Jepang adalah suatu hal yang unik, karena Jepang justru melihat bahwa penyebaran anime dan manga oleh fans ini sebagai hal positif, karena dapat membantu pemerintah Jepang mempromosikan kebijakan *Cool Japan* di negara-negara dimana fans tersebut berada. Meski merupakan pelanggaran hak cipta, pemerintah, perusahaan, dan bahkan pencipta anime dan manga “seolah-olah” mengizinkan karyanya dimodifikasi sedemikian rupa dan disebarluaskan melalui situs fandom karena hal ini membuat karya mereka semakin dikenal.

Hal yang mungkin tidak dipertimbangkan sebelumnya oleh Jepang adalah bahwa file yang dibagikan di situs *fandom* tidak hanya sebatas pada judul-judul yang terkenal, melainkan juga *anime* dan *manga* dengan genre tertentu yang sebenarnya hanya ditujukan untuk audience terbatas karena mengandung tema tertentu yang kontroversial, seperti tema LGBT dan kekerasan. Sementara itu, baik pemerintah, perusahaan maupun pencipta tidak bisa mengontrol atau membatasi konten yang tersebar pada situs fandom. Kemudahan mengakses file yang tersedia di situs *fandom*, menyebabkan *anime* dan *manga* jenis ini juga tersebar secara luas di kalangan fans yang berasal dari berbagai negara.

Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian pemerintah negara-negara, khususnya di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, yang memandang bahwa anime dan manga kini digunakan untuk mendukung propaganda tertentu yang tidak sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang dihormati negara-negara tersebut. Pemerintah Jepang semestinya mulai mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin muncul dari praktik yang dilakukan oleh fans melalui situs *fandom* ini. Tindakan pengabaian terhadap fans yang melakukan pelanggaran hak cipta, selain berpotensi merugikan dari sisi ekonomi⁴, juga berdampak buruk terhadap citra Jepang di mata dunia, hal yang dalam buku ini disebut sebagai *The End of Cool Japan*.

⁴ Terdapat kasus-kasus dimana fans mengkomersialkan *anime* dan *manga* yang mereka dapatkan secara gratis melalui situs *fandom*, untuk keuntungan pribadi.

PENUTUP

Buku ini secara umum menggambarkan sisi lain dari budaya populer Jepang yang menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, ahli hukum, hingga akademisi dan peneliti yang *concern* pada kajian Jepang. Sesuai dengan judulnya, kumpulan tulisan dalam buku ini memaparkan bagaimana budaya populer Jepang, terutama manga dan anime dengan tema tertentu menimbulkan permasalahan baik dari segi etika, hukum maupun budaya di berbagai negara, yang dapat memperburuk citra Jepang dan mempengaruhi implementasi kebijakan *Cool Japan*.

Kehadiran buku ini penting sebagai pelengkap buku-buku kajian Jepang, karena mengangkat isu yang jarang dibahas dalam kajian budaya populer Jepang, yakni terkait aspek hukum dalam penyebaran manga dan anime Jepang ke berbagai negara, serta bagaimana interaksi fans di berbagai negara mempengaruhi penerimaan pemerintah negara-negara terhadap budaya populer Jepang. Buku ini juga berguna bagi pemerhati hukum, karena memberikan gambaran umum tentang perbedaan praktik negara-negara dalam merumuskan aturan nasional mereka, terkait perlindungan hak cipta, anti-pornografi, dan perlindungan anak, yang disimpulkan dengan mengikuti penyebaran anime dan manga ke berbagai negara melalui kebijakan *Cool Japan*.

Saat ini Pemerintah Indonesia mulai melihat potensi industri animasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi kreatif yang diprediksi dapat berkontribusi terhadap perekonomian negara. Buku ini dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait industri animasi, terutama dari aspek perlindungan hak kekayaan intelektual. Pemerintah perlu memperhatikan bagaimana praktik pelanggaran hak cipta oleh fans menimbulkan kerugian finansial yang cukup signifikan bagi industri anime di Jepang. Hal ini menjadi penting, mengingat di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil survey ekonomi kreatif 2016 yang dilakukan oleh BPS dan Bekraf diketahui hanya 11% pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang telah memiliki HKI (Bekraf, 2017). Artinya resiko sebuah animasi untuk dipalsukan dan

dikuasai pihak lain sangat besar, karena sebagian besar pelaku animasi masih enggan mendaftarkan karya mereka untuk mendapatkan perlindungan hak cipta

PUSTAKA ACUAN

Badan Ekonomi Kreatif (2017). Data Statistik Ekonomi Kreatif. Kerjasama Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik. Jakarta: Bekraf.

Budianto, F. (2015). Anime, Cool Japan, dan Globalisasi Budaya Populer Jepang. *Jurnal Kajian Wilayah* Vol. 6 No. 2, 179-185.

Condry, I. (2013). *The Soul of Anime. Collaborative Creativity and Japan's Media Success Story*. Durham and London: Duke University Press.

Eiland, Murray Lee (2009) From Cartoon Art to Child Pornography, *International Journal of Comic Art* 11(2): 396–409.

Fujimoto Yukari (2015) Sailor Moon! The Treasure Box all the Girls Want, in Masami Toku, ed., *International Perspectives on Shojo and Shojo Manga*. New York: Routledge.

Grunebaum, Dan (2012). Is Japan Loosing Its Cool?. Tersedia pada <https://www.cnbc.com/id/100294139> Diakses pada 9 Juli 2018.

Iwabuchi, K. (2002). *Recentring Globalization: Popular Culture and Japanese Transnationalism*. Durham: Duke University Press.

Iwabuchi, K. (2015). Pop Culture Diplomacy in Japan: Soft Power Nation Branding and the Wustion of Internatioal Cultural Exchange, *International Journal of Cultural Policy*, vol. 21, no. 4 (2015): 423.

McGray, D. (2002). Japan's Gross National Cool, *Foreign Policy*, 1 Mei 2002. Tersedia pada <http://www.douglasmcgray.com/cool-japan.html>. Diakses 28 Juni 2018.

McLelland, Mark (2009) "(A)cute Confusion: The Unpredictable Journey of Japanese Popular Culture," *Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific*, Issue 20, April 2009.

Tersedia pada intersections.anu.edu.au/issue20/mcllelland.htm Diakses 3 Juli 2018.

McLelland, Mark (2012) Australia's Child-Abuse Materials Legislation, Internet Regulation, and the Juridification of the Imagination. *International Journal of Cultural Studies* 15(5): 467–483.

Orange, Richard (2012) .Comic Translator Convicted of Possessing Child Pornography after Police Seize his Collection of Japanese Manga Cartoons. *Mail Online*, May 18, 2012. Tersedia pada www.dailymail.co.uk/news/article-2145359/Comic-translator-convicted-possessing-child-pornography.html#ixzz2KeRVZuwG Diakses 2 Juli 2018 .

Yokota, M dan Hu, T. G. (ed). (2013) *Japanese Animation: East Asian Perspectives*. Mississippi: University Press of Mississippi

TENTANG PARA PENULIS

- **Nanto Sriyanto** adalah peneliti bidang kajian Politik Internasional di Pusat Penelitian Politik - LIPI. Dapat dihubungi melalui *nantosriyanto@gmail.com*
- **Mayasuri Presilla** adalah peneliti bidang kajian Asia Tenggara di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - LIPI. Dapat dihubungi melalui *m_presilla@yahoo.com*
- **Esdaniar Khoirunisa** adalah mahasiswa pascasarjana pendidikan Luar Biasa di Universitas Negeri Sebelas Maret - Solo dan **Dwi Aries Himawanto** adalah dosen pada Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Sebelas Maret - Solo. Dapat dihubungi melalui *esdaniarkhoirunisa@gmail.com* dan *dwi_ah@uns.ac.id*.
- **Upik Sarjiati** adalah peneliti bidang kajian Asia Pasifik di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - LIPI. Dapat dihubungi melalui *upik.sarjiati@gmail.com*.
- **Yusy Widarahesty** adalah dosen di Prodi. Ilmu Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Dapat dihubungi melalui *yusy_widarahesty@uai.ac.id*.
- **Erlita Tantri** adalah peneliti bidang kajian Asia Pasifik di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - LIPI. Dapat dihubungi melalui *erlita_tantri13@yahoo*.
- **Rifki Indra Maulana** adalah kandidat peneliti bidang Asia Pasifik di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - LIPI. Dapat dihubungi melalui *indra.rifki@gmail.com*.

INDEKS

<p>Agriculture viii, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32</p> <p>Aksesibilitas iv, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45</p> <p>Bridge builder vii, 2, 4, 12, 14, 15</p> <p>Diskursus v, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75</p> <p>Down to earth diplomacy 3, 13</p> <p>Dynamic equilibrium vii, 2, 3, 4, 12, 13, 14</p> <p>Fathering Japan v, ix, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75</p> <p>Fukushima v, ix, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61</p> <p>Global Maritime Fulcrum iii, vii, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14</p> <p>High investment viii, 20, 25, 29</p> <p>Jepang iv, v, 34, 35, 36, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89</p> <p>Ketimpangan gender v, 62, 69</p>	<p>Lansia vi, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82</p> <p>Legal framework viii, 6, 20, 28, 29, 30,</p> <p>Masyarakat berisiko v, 47, 48, 49</p> <p>Middlepowermanship iii, vii, 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15</p> <p>NPO v, ix, 4, 62, 65, 72, 73, 75</p> <p>Nuklir v, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61</p> <p>Organic farming viii, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32</p> <p>Organic market viii, 20, 21</p> <p>Pariwisata vi, 76, 77, 80, 81</p> <p>Tiongkok iii, vi, 1, 17, 76, 77, 78, 79, 80, 81</p> <p>Tunanetra iv, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44</p> <p>Ubin tekstur pemandu iv, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44</p> <p>Waktu luang vi, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82</p>
---	--